

20013

KOMPILASI TEMUAN GOOD PRACTICES OTONOMI AWARDS 2013

Berikut adalah kompilasi temuan temuan good practices JPIP dalam tahun 2013 pada wilayah pantauan Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan pada lingkup parameter Pelayanan Publik, Ekonomi, Akuntabilitas, dan Lingkungan Hidup.



KOMPILASI



TEMUAN GOOD PRACTICES OTONOMI AWARDS 2013

KOMPILASI
TEMUAN GOOD PRACTICES OTONOMI AWARDS 2013
JAWA TIMUR

PERTUMBUHAN EKONOMI

Banyuwangi Festival (Banyuwangi Ethno Carnival- Banyuwangi)

Selama hampir dua bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan menggelar sembilan rangkaian acara yang bermuatan kultural mulai. Gawe besar Pemkab Banyuwangi untuk memeringati Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-214 itu dikemas dalam sebuah festival bertajuk Banyuwangi Festival 2012.

Kegiatan pertama kali yang dilangsungkan adalah Festival Anak Yatim, yaitu mengajak para pengusaha dan para dermawan di Banyuwangi pada 15 November 2012 berkumpul di Taman Balmbangan dengan melibatkan 3.000 anak yatim piatu dari tingkat SD hingga SLTA se- Kabupaten Banyuwangi.

Acara kedua Parade Gandrung Sewu, pada 17 November 2012. Seperti namanya festival ini melibatkan seribu lebih penari Gandrung dari pelajar SD-SMA, 200 di antaranya adalah penari profesional pelaku sendratari pertunjukan sejarah Gandrung. Usai berpesta rakyat dengan Parade Grandrung Sewu, para pecinta musik khususnya jazz dimanjakan dalam Banyuwangi Jazz Festival (BJF) pada 17 November 2012 yang digelar di Gesibu. Menampilkan ESQI:EF: Syaharani and Queenfireworks, Monita Tahalea and Friends, dan Rieka Roeslan-Reza (The Groove). Kegiatan ini digelar untuk menjajaki animo music jazz di Banyuwangi, 2.000 tiket gratis yang disebar disambut antusias masyarakat. Acara ini menjadi ucapan selamat datang bagi penonton Banyuwangi Festival, bersama Gandrung Seweu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) digelar pada 18 November 2012, ini merupakan event budaya berupa parade berskala internasional yang kedua dalam kemeriahan Banyuwangi Festival 2012. Inilah parade fashion yang kental dengan nuansa etnik dengann mengambil tema Re-Barong Osing yang didominasi warna merah, hijau dan kuning. BEC sengaja digelar untuk menjembatani antara modernitas dengan seni budaya tradisional khas Banyuwangi agar lebih memiliki nilai jual dalam pengembangan pariwisata, seni dan budaya.

Lalu ada Banyuwangi Tour de Ijen (BTdI), yaitu lomba balap sepeda berskala internasional dengan menempuh jarak sekira 340 kilometer. BTdI dilaksanakan pada tanggal 7-9 Desember 2012 dan akan diikuti sekira 115 atlet dari 16 negara. BTDI yang telah resmi terdaftar dalam agenda rutin (calender of event) badan balap sepeda dunia Union Cycliste Internationale di Prancis, ini merupakan event internasional resmi pertama yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyuwangi.

Pengembangan Kawasan Agropolitan PASEBAN (Palang-Semanding-Tuban)-Kab. Tuban

Wilayah Tuban memiliki wilayah pertanian. Untuk pengembangan mutu wilayah pertanian, ditetapkan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan dirancang dan dilaksanakan dengan mensinergiskan berbagai potensi yang ada untuk mendorong

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah. Pembiayaan untuk fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang tetap mengacu pada kemampuan dan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing instansi.

Tujuan pengembangan agropolitan adalah (1) meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan agrobisnis/agroindustri serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di pedesaan; (2) memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang. .

Kawasan agropolitan memiliki luas minimal 500ha. Kawasan merupakan gerakan dari dan untuk masyarakat di wilayah/kawasan, oleh karenanya peran institusi pemerintah lebih diarahkan pada tindakan motivasi, fasilitasi, stimulasi dan stabilisasi gerakan tersebut. penetapan kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrative pemerintah tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skaladan scope ekonomi .

Pembangunan Jember Sport Garden (Kab. Jember)

JSG merupakan salah satu upaya Pemkab Jember untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada disekitar JSG. JGS merupakan kompleks olahraga dan rekreasi. Didalamnya dibangun stadion dengan standar internasional. Tujuannya untuk memenuhi keberadaan stadion di kawasan timur Jawa Timur, khususnya untuk menampung kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Jember seperti Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Stadion didalam kompleks JGS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan olahraga, tetapi juga digunakan untuk keperluan konser music, pameran, gedung pertemuan, try out dan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan oleh raga.

Berdasarkan hasil perhitungan RAB, jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 472.425.000.000 yang terdiri atas Rp 200.000.000.000 untuk pembangunan stadion utama yang berkapisat 20 ribu penonton, sedangkan dana sisasnya diperuntukkan untuk pembangunan taman dan fasilitas lainnya. Bangunan utama terdiri atas dua tribun yaitu tribun terbuka dan tertutup. Tribun beratap setara bangunan empat lantai yang memiliki berbagai fungsi.

- Lantai I luasnya 80.000 m² yang merupakan ruangan untuk panitia pelaksana, manajer, pelatih, official, wasit, ruang ganti, loker, sekuritu, klinik dan ruang dokter.
- Lantai II memiliki 4.500 m² yang berfungsi sebagai lobi penerima tamu, ruang manajer, staf, areal komersial.
- Lantai III memiliki luas 1300 m² yang meliputi hall, ruang VVIP, areal komersial dan gudang
- Lantai IV memiliki luas 800 m², untuk ruang tamu dan tandon atas.

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja (Kota Probolinggo)

Setiap tahun penambahan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan terus berjalan. Dan keberadaannya tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia, belum lagi ditambah dengan fenomena pekerja yang di PHK, semakin menambah ketat persaingan pencarian kerja. Melihat kondisi tersebut, maka UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo memiliki program *Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja* dengan bekerja sama dengan berbagai instansi dan kalangan masyarakat untuk berupaya menangani problematika ketenagakerjaan ini.

Sejak 2005 sampai saat ini UPT BLK berusaha mengurangi angka pengangguran dengan melakukan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat dengan dukungan pendanaan dari APBN, APBD maupun CSR. Pada tahun 2012 saja telah melatih 943 orang dan menyalurkan 891 orang untuk bekerja atau setara dengan 94,5% penempatan kerja.

Program *Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja* dilaksanakan dengan beberapa skema kegiatan, yaitu :

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, semisal penyelenggaraan Job Fair;
2. Bursa Kerja On-Line, semisal penyediaan PC untuk para pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan;
3. Usaha Mandiri Sektor Informal, ini diprioritaskan kepada para korban PHK;
4. Ketrasmigrasian;
5. Panduan dan Bimbingan Tenaga Kerja Mandiri, semisal tenaga kerja yang memiliki embrio usaha diberikan panduan dan bimbingan pengembangan usaha mandiri;
6. Alih Profesi Abang Becak, ini salah satu bagian pengembangan rencana kerja dari kegiatan kongres Abang Becak. Abang becak diberikan pelatihan dan pembekalan untuk menggeluti usaha lain sebagai alternatif tambahan income selain menarik becak, tentunya dengan diberikan bantuan modal usaha dan alat kerja/usahanya. Bentuknya bermacam-macam sesuai minat masing-masing abanga becak, seperti toko pracanagan, ternak ayam, ternak kambing, warung kopi, sablon, tukang kayu, menjahit/bordir, dan lain-lain. Harapannya jika bantuan usaha ini bisa berkembang, maka profesi sebagai tukang becak akan ditinggalkan.

Alih Profesi Abang Becak, ini salah satu bagian pengembangan rencana kerja dari kegiatan kongres Abang Becak. Abang becak diberikan pelatihan dan pembekalan untuk menggeluti usaha lain sebagai alternatif tambahan income selain menarik becak, tentunya dengan diberikan bantuan modal usaha dan alat kerja/usahanya. Bentuknya bermacam-macam sesuai minat masing-masing abanga becak, seperti toko pracanagan, ternak ayam, ternak kambing, warung kopi, sablon, tukang kayu, menjahit/bordir, dan lain-lain. Harapannya jika bantuan usaha ini bisa berkembang, maka profesi sebagai tukang becak akan ditinggalkan.

Pembangunan pasar hewan terpadu (Kabupaten Blitar)

Salah satu komoditas utama Blitar adalah hewan ternak, namun belum memiliki pasar hewan yang mencukupi baik dari segi daya tampung maupun dari segi fasilitas. Pasar hewan yang ada cuma satu yaitu di Kecamatan Wlingi, itupun letaknya ada dalam satu lokasi dengan pasar tradisional. Luas pasar juga terbatas, sekitar 3000-4000 m². Sempitnya pasar semakin terasa ketika harus menampung pedagang-pedagang yang tidak hanya ada di dalam lingkup wilayah kabupaten Blitar. Akibatnya, setiap aktivitas

pasar, maka aktivitas perdagangan menjadi luber ke jalan. Upaya perluasan di lokasi yang sama juga tidak memungkinkan akibat tidak adanya lahan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka pemerintah Kabupaten membangun dua pasar hewan terpadu di kecamatan Wlingi dan Kecamatan Srengat. Terpadu dalam artian memadukan jenis hewan potong (rojokoyo), unggas dan hewan hobby. Pasar hewan di kecamatan Wlingi memiliki luas 2,7 hektar; sedangkan pasar hewan di kecamatan Srengat memiliki luas 3,2 hektar. Strategi yang diterapkan tidak hanya dengan membuat pasar hewan baru, tapi juga membuatnya dalam dua lokasi yang berbeda. Pemisahan dalam dua lokasi ini diperlukan untuk menekan biaya transportasi. Pasar hewan Kecamatan Wlingi untuk wilayah Blitar Timur dan Kecamatan Srengat untuk Blitar wilayah Barat.

PEMERATAAN EKONOMI

Pelayanan Kredit Dana Bergulir (Kota Probolinggo)

Problem permodalan yang lazim dialami para pegiat Usaha Mikro, dijawab oleh pemerintah Kota Probolinggo dengan melakukan kerjasama penyaluran permodalan yang dibiayai dari APBD Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Cabang Probolinggo, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Probolinggo. Dengan persyaratan dan alur pengajuan yang mudah Usaha Mikro Kota Probolinggo, setiap pengajuan kredit dana bergulir bisa diakses dengan besaran sampai dengan maksimal Rp. 20 juta, bungau 6% flat pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun.

Uraian	2010	2011	2012
Nasabah	65	160	106
Realisasi	Rp 658.000.000	Rp 2.093.000.000	Rp 1.268.000.000

Pemberdayaan KUMKM Melalui Perkuatan Kredit Dana Bergulir APBD II (Kab. Sampang)

Pergerakan perekonomian di Kabupaten Sampang berjalan lamban. Hal ini dikarenakan investasi yang ada belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan juga angka kelulusan dengan angka lapangan kerja tidak sebanding. Keadaan ini apabila dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, ditakutkan akan semakin meningkatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang. Kemiskinan ini lah yang menyebabkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sampang terhambat.

Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Sampang mulai tahun 2001 melakukan intervensi ke arah penguatan sektor ekonomi informal yaitu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Lembaga Keuangan Masyarakat dan Sentra UKM melalui Program Pemberdayaan KUMKM Melalui Perkuatan Kredit Dana Bergulir APBD II . Dari beberapa sektor itulah, banyak yang menyumbang angka kemiskinan dan pengangguran. Intervensi yang dilakukan adalah dengan bentuk memperkuat arus permodalan yaitu memberikan dengan syarat yang lunak dan bunga yang relatif kecil. Mulai tahun 2001 sampai sekarang, Pemerintah Kabupaten Sampang yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada 1.527 unit UMKM, 178 Koperasi dan 2 unit Sentra UKM dengan jumlah sebanyak Rp. 35. 594.200.000,-.

Bantuan Infrastruktur Desa (Kab. Kediri)

Wilayah kabupaten Kediri memiliki delapan titik rawan banjir yaitu di Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kepung, Kecamatan Puncu, dan Kecamatan Kandangan. Selama ini setiap musim hujan, wilayah-wilayah ini digenangi banjir sampai dengan ketinggian satu meter.

Selain banjir, beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri juga langganan kekeringan. Pada awalnya kekeringan hanya ada di Kecamatan Ngancar, namun sekarang sudah meluas di Kecamatan Tarokan, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Semen, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Kepung. Wilayah-wilayah ini harus mendapatkan bantuan air melalui tangki-tangki PDAM yang datang secara periodic. Namun sejak tahun 2011 dianggarkan bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan. Masing-masing bantuan tersebut jumlahnya beragam, mulai 15 juta sampai 60 juta. Mekanisme pencairan bantuan dan manajemen bantuan mengikuti pola PNPM. Awal ide ini juga untuk pemeratakan bantuan infrastruktur ke semua desa. Selama ini ditanggung melalui dana PNPM, namun karena PNPM sifatnya kompetisi, selektif dan terbatas maka sebarannya juga terbatas. Hal ini dikhawatirkan akan memicu gesekan antara daerah yang mendapatkan PNPM dan daerah yang belum mendapatkan PNPM. Berangkat dari permasalahan ini, maka pemerintah Kabupaten Kediri melalui BPPMD mengulirkan bantuan infrastruktur desa.

Bantuan Keuangan untuk Jaringan Listrik Pedesaan (Tuban)

Ada 140 dusun masih tidak dialiri listrik. Jaringan listrik PLN tidak menjangkau desa-desa tersebut dikarenakan sedikitnya jumlah penduduk di desa-desa tersebut. Salah satu permasalahan terkait ketidakberadaan listrik adalah sering terjadi kasus pencurian sapi dan warga otomatis tidak memiliki kegiatan produktif selepas senja.

Berangkat dari latar belakang tersebut, pemerintah Kabupaten melakukan terobosan dengan memberikan bantuan keuangan untuk jaringan listrik pedesaan. Pemkab membantu biaya pembangunan jaringan infrastruktur listrik berupa tiang listrik, kabel listrik, dan travo melalui mekanisme bantuan keuangan kepala desa. Karena listrik ini tetap diambil dari PLN, maka semua pengawasan teknis, spesifikasi, dan instalasi bantuan dikonsultasikan dengan PLN. Sedangkan instalasi ke rumah-rumah penduduk dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, termasuk pendanaan. Swadaya masyarakat juga digunakan untuk biaya sertifikasi laik operasi (SLO) dan biaya operasional panitia. Lebih lanjut, hal yang dilakukan oleh pemkab meliputi: (1) melakukan pembinaan proses perencanaan baik teknis dan administrative; (2) memfasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan jaringan listrik pedesaan, khususnya koordinasi dgn PLN dan asosiasi kontraktor listrik yang ada; (3) mengadakan pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan jaringan listrik pedesaan; (4) memfasilitasi proses pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikasi laik operasi; (5) memfasilitasi pelaksanaan serah terima operasional jaringan listrik dengan pihak PLN areal pelayanan dan jaringan Bojonegoro; (6) melaksanakan pemantauan lapangan terhadap laporan perkembangan fisik jaringan listrik yang dibuat oleh desa; dan (7) mengadakan evaluasi mengenai kegiatan bantuan pembangunan jaringan listrik yang telah dilaksanakan.

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Bantuan Modal Koperasi dan UMKM (Kota Blitar)

Dalam Penguatan Sektor koperasi dan UMKM Sebagai Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan sebagai pondasi melalui pembangunan ekonomi kerakyatan melalui Program bantuan modal koperasi dan UMKM,serta sebagai mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkompetensi serta berkualitas dan mencapai misi:

- (1) meningkatkan SDM koperasi melalui penerapan standart kopetensi kerja.
- (2) Meningkatkan daya saing UKM melalui penerapan menejemen aplikatif.
- (3) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kopersi.
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatkan kinerja sumber daya waktu.

Program unggulan bantuan modal koperasi dan UMKM diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perwali nomor 3 tahun 2010 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir untuk penguatan pemodaln bagi koperasi dan UMKM di kota Blitar yakni melalui teknis dan tatacara pelaksanaan permodalan koperasi dan UMKM. Lalu sasaran dari program koperasi dan UMKM adalah:

- (1) Koperasi fungsional, misalnya koperasi pegawai negeri dan lembaga pencitra lainnya seperti, Primpopol, Primkopat, Primkodim.
- (2) Koperasi non-fungsional, seperti KSB, USB, Top-One, KUY, dan pom bensinan dan sebagainya.
- (3) UMKM berpolanya selain PNS, anggota TNI-POLRI, karyawan BUMD dan BUMN.
- (4) UMKM dalam bentuk kelompok, yang menjadi sasaran ditempat ini ada dua bidang yang langsung menangani/ bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan UMKM dan salah satu bidang lagi penguatan yang penguatan ini adalah bidang-bidang kelembagaan.

Untuk kekuatan permodalan per jenis usaha tersebut maksimal berada pada angka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Teknis dan mekanisme serta kriteria pemodaln koperasi dan UMKM tersebut sudah tertera pada Perwali Nomor 3 tahun 2010 tersebut.

Koperasi Abang Becak (ABA MESRA = Abang Becak Menuju Kesejahteraan) dan Penataan PKL (Kota Probolinggo)

Setelah melakukan kongres abang becak serta melakukan rakor abang becak, puluhan abang becak yang tergabung dalam paguyuban abang becak hasil konggres becak, mengikuti rapat pembentukan koperasi abang becak. Dengan difasilitasi oleh Bappeda, forum ini menghadirkan narasumber diantaranya ibu April dari Diskoperindag yang menyampaikan tatacara pendirian koperasi. Beberapa hal yang dibahas dalam acara ini diantaranya tujuan, landasan dan asas koperasi, nilai-nilai koperasi, prinsip koperasi, paradigma baru koperasi, hakekat koperasi, serta tata cara pendirian koperasi.

Prinsip koperasi adalah menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan serta kesetiakawanan. Membangun suatu koperasi diperlukan kerja

sama agar tidak ambruk lagi. Miskan ketua paguyuban abang becak, terpilih sebagai bendahara dalam pembentukan koperasi abang becak ini. Dalam Rakor pembentukan koperasi abang becak ini, disepakati nama koperasi ABBA MESRA, dengan Ketua Toyan, Sekretaris Ahmad Mudofar, serta Bendahara Miskan, dengan pembina Walikota H.M.Buchori serta Kepala BLH Budi Krisyanto.

Untuk penataan PKL, PKL yang ada di Kota Probolinggo terdapat sekitar 908 PKL dengan sebaran di jalan-jalan protokol diseluruh wilayah Kota Probolinggo. Untuk proses penertiban dibuat kebijakan penataan PKL antara lain relokasi PKL JL. Dr. Sutomo ke GOR A. Yani dan memfasilitasi Pusat Kuliner di Areal RTH Brantas. Pembinaan dan memberdayakan PKL dengan kegiatan Pasar Tugu di Alon-alon, kegiatan MPS2, Bazaar Ramadhan, penyediaan tempat dan tenda PKL di Alon-alon, bantuan bagi PKL yang kurang mampu.

Proverty Solution Program (PSP) (Situbondo)

Sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*). Program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor dan terfokus pada aspek pemberdayaan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis *cluster*. Yang dimaksud dengan berbasis *cluster* yaitu suatu bentuk keterkaitan antara kelompok-kelompok yang terletak pada satu wilayah (desa dan kecamatan) yang terintegrasi dari tiga bidang yaitu pertanian, peternakan, dan kelautan dan perikanan yang dihubungkan dengan suatu sistem baik pasar maupun non pasar.

Tujuan umum dari PSP adalah penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha produktif kelompok masyarakat miskin yang berbasis *cluster*. Sedangkan tujuan khusus dari PSP adalah meningkatkan kegiatan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin, memperluas lapangan usaha dan kapasitas produksi kelompok masyarakat miskin yang berpotensi melalui usaha produktif yang berbasis *cluster*, mendorong terciptanya kesempatan kerja dan wirausaha baru dilokasi PSP, dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab.

Sasaran PSP adalah masyarakat miskin Kabupaten Situbondo yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS-2008) oleh Badan Pusat Statistik yang tergabung dalam suatu Kelompok Masyarakat Miskin (PokMas Miskin) yang diverifikasi oleh BAPPEDA bersama dengan Tim Pendamping PSP dan Tim Pendamping Desa yang kemudian disahkan oleh Kepala BAPPEDA.

Aksi Menyelamatkan Keaslian Varietas Tembakau Madura (Kab. Pamekasan)

Tembakau jenis Prancak-95 merupakan tembakau asli madura yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis tembakau lainnya. Selain itu juga memiliki tingkat kepercayaan tersendiri di pasar tembakau nasional, bahkan internasional. Kondisi ini ternyata kurang dipahami oleh kalangan petani yang lebih

banyak menanam tembakau luar madura. Heterogenitas tanaman tembakau yang ditanam oleh petani mengakibatkan penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas tembakau asli madura sehingga otomatis kepercayaan pasar pun turun dengan sendirinya. Ketidak tahuan akan kondisi ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau petani yang rata-rata masih rendah. Disamping itu juga, pengetahuan akan keterampilan dalam bertani masih menggunakan cara-cara tradisional.

Dengan luas areal tanam tembakau yang semakin meningkat mencapai 39,44% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan, yaitu pada tahun 2012 mencapai 31.251 Ha, merupakan potensi yang luar biasa untuk pengembangan tanaman tembakau. Apalagi dengan budaya masyarakat madura, khususnya Pamekasan yang sangat erat dengan bertani tembakau. Program Aksi Menyelamatkan Keaslian Varietas Tembakau Madura sangat bermanfaat untuk menjaga varietas asli madura, khususnya Prancak-95 dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas perekonomian masyarakat.

Program Inseminasi Buatan dan Sapi Perah (Kabupaten Situbondo)

Program inseminasi buatan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan populasi sapi potong dan juga mencukupi permintaan dari dalam maupun luar Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2011, jumlah sapi potong di Kabupaten Situbondo mencapai 204.925 ekor. Dari jumlah tersebut, lebih banyak peternak rumah tangga, belum berorientasi pada bisnis. Permintaan dari luar Kabupaten Situbondo dari 3 (tiga) Pasar Hewan yang dimiliki yaitu Pasar Hewan Asembagus sebanyak \pm 9000 (sembilan ribu) ekor, Pasar Hewan Situbondo sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) ekor, dan Pasar Hewan Besuki sebanyak \pm 12.000 (dua belas ribu) ekor. Kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan di sekitar surabaya dan sekitarnya. Program inseminasi buatan ini dilakukan dengan menempatkan 51 (lima puluh satu) petugas inseminasi buatan yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan seluruh Kabupaten Situbondo. Dan juga pembentukan Paguyuban Inseminator Simpati Situbondo.

Untuk mendukung program tersebut, Dinas Peternakan mengeluarkan aturan hukum, yaitu: Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo Nomor: 800/640/431.203.1/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Definitif Mantri Hewan dan Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Kabupaten Situbondo

Program pengembangan agribisnis sapi perah merupakan alternatif yang diberikan oleh Dinas Peternakan kepada peternak. Hal ini didasari bahwa peternakan sapi perah lebih menguntungkan secara ekonomis yaitu susu. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan bantuan kepada Kelompok Ternak Rojokoyo di Desa Wonorejo sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor. Sedangkan pada tahun 2013 mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 80 (delapan puluh) ekor yang menyebar di seluruh Kabupaten Situbondo.

Bina Taruna Mandiri (Kabupaten Magetan)

Pada bulan Juni 2010, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyambut pembentukan sebuah kelompok yang

berlatarbelakang pemuda tani yang berkeinginan membangun 'Desa Hijau' (Green Village), namun memberi nilai tambah bagi perekonomian di kawasan Sarangan. Para pemuda ini semula melakukan aktivitas perekonomian yang belum tertata dan terfokus. Mereka sudah mempunyai ketrampilan untuk mengelola tanah di sekitar kawasan Sarangan, tapi kegiatan mereka masih dilakukan secara sendiri-sendiri sehingga belum bisa melakukan diversifikasi usaha sekaligus pengembangan potensi yang ada. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak BKP pada tahun 2010, para pemuda tani ini kemudian menggulirkan inisiatif pembentukan sebuah kelompok tani yang identik dengan jiwa pemuda yang mandiri, kreatif dan berniat menggali potensi yang ada.

Prakarsa para pemuda tani ini disambut oleh BKP dan terbentuklah kelompok Bina Taruna Mandiri pada tahun 2011 yang memperoleh perhatian bukan saja dari Pemkab Magetan, melainkan juga dari Pemprov Jatim. Sepanjang tahun 2011, kelompok ini melakukan pendataan potensi perekonomian berbasis pertanian dan peternakan yang bisa dilakukan di kawasan Sarangan. Sesudah data itu terkumpul, mereka pun mulai melakukan langkah-langkah pengembangan yang dibantu oleh BKP.

Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM (Kabupaten Pasuruan)

Secara Umum, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan, yang terbagi menjadi 341 Desa dan 24 kelurahan. Ke-24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu 14 kecamatan di daerah datar, yakni Kejayan, Wonorejo, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok dan Nguling. Wilayah yang mempunyai ketinggian rata-rata 100 hingga 500 m dpl (di atas permukaan laut) sebanyak 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Purwodadi, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Sukorejo dan Pandaan. Sedang wilayah yang mempunyai ketinggian rata-rata di atas 500 m dpl sebanyak 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tuttur, Puspo, Tosari dan Kecamatan Prigen. Koperasi yang tumbuh berkembang tersebar di kecamatan-kecamatan tersebut dengan berbagai bidang usaha.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kembali memperoleh perhatian serius di Kabupaten Pasuruan, meskipun pada tahun 2012 jumlah usaha kecil di Kabupaten Pasuruan mencapai 3.981 unit, menurun sebanyak 530 unit atau menurun sebesar 11,75% dibanding tahun 2011 yang berjumlah 4.511 unit. Jumlah usaha kecil menurun sebanyak 11,64% dibanding jumlah keseluruhan UMKM. Penurunan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berhasil membangun sektor yang lain sehingga banyak usaha kecil yang melakukan alih profesi. Selain itu menurunnya jumlah usaha kecil juga disebabkan oleh semakin banyaknya pelaku usaha kecil yang tidak mampu bertahan karena persaingan antar pelaku usaha kecil yang semakin ketat, pengelolaan manajemen keuangan yang kurang bagus serta kemampuan SDM pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan yang lebih komprehensif dari Pemkab Pasuruan, seperti Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, kewirausahaan dan model-model pelaporan UKM, Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, dimana sebanyak 65 koperasi telah mengikuti program sosialisasi ini.

Pusat Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (Kota Mojokerto)

Sejak bulan Mei 2012, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui tiga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yakni Kantor Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DKPP), melaksanakan upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui relokasi ke sepanjang jalan Benteng Pancasila (Benpas). Tujuan relokasi di bawah Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 (Perwali 19/2012) ini terfokus pada dua hal, pertama, untuk menata sekaligus memberdayakan PKL di sebuah lokasi agar tidak tersebar. Kedua, untuk membangkitkan dinamika perekonomian warga di lokasi baru di mana PKL berada. Relokasi PKL di Kota Mojokerto berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah relokasi PKL dari kawasan jalan Jaksa Agung Suprpto ke Benpas sekitar bulan Mei-Juni 2012, kemudian relokasi tahap dua dari kawasan Alun-Alun Kota Mojokerto ke Benpas sekitar bulan Oktober 2012.

Para PKL yang berasal dari jalan Jaksa Agung Suprpto kemudian menempati area Benpas tidak mau disebut sebagai 'Pedagang Kaki Lima', melainkan mereka lebih suka diakronimkan dari 'Pedagang Kreatif Lapangan'. Bahkan untuk menghapus kesan negatif, para pedagang yang sekarang ini sudah berada di bagian barat dari Benpas kemudian mengukuhkan diri menjadi 'Paguyuban Pedagang Joko Sambang' (PPJS) yang sudah menerima legalitas dari Pemkot Mojokerto berupa sertifikat. Jumlah anggota PPJS sekitar 125 lapak pedagang yang masing-masing berjualan variatif, seperti aksesoris, pakaian dan kuliner. Sejak dipindahkan ke lokasi baru ini pada pertengahan tahun 2012, para pedagang yang tergabung dalam PPJS memperoleh pinjaman dana bergulir tanpa bunga sesuai besar-kecil dagangan, berkisar 2-4 juta untuk tiap pedagang. Luas keseluruhan area Benpas yang digunakan PPJS adalah 1958 m², dengan masing-masing lapak berukuran 3x3 m. Sekitar 977 m² dari area ini sudah dipaving oleh Pemkot Mojokerto.

Menjaga Pendapatan Petani Melalui Patokan Harga Gabah (Kota Pasuruan)

Kondisi lahan pertanian di kota Pasuruan kian susut akibat semakin banyak lahan pertanian produktif yang berubah menjadi lahan hunian. Namun, perubahan fungsi lahan ini tidak serta-merta mengubah para petani atau buruh tani untuk alih profesi, terutama mereka yang tinggal di beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota. Mereka ingin tetap bercocok-tanam dan memanen padi, karena ketiadaan lapangan pekerjaan sesuai dengan keseharian mereka yang sudah berketetapan memilih profesi sebagai petani. Melihat kenyataan ini, Pemkot Pasuruan melalui koordinasi antara Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) memprakarsai kebijakan penetapan pembelian harga gabah melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2012. Jika semula Dinas Pertanian Kota Pasuruan yang lebih banyak berkiprah menentukan harga gabah, maka sejak pemberlakuan Perwali tersebut, pihak KKP yang berwenang menentukan harga gabah sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2012, yang menjadi rujukan Perwali. Sedangkan pihak Dinas Pertanian kemudian hanya berfungsi menampung gabah yang telah dibeli oleh Pemkot Pasuruan.

Pembelian oleh Pemkot Pasuruan dengan menggunakan alokasi APBD sesuai Perwali 22/2012 ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan petani. Baik KKP maupun Dinas Pertanian berusaha menjaga tingkat pendapatan petani stabil meski ada dinamika harga gabah. Data dari KKP tahun 2011, bahwa pada tahun 2010, luas panen

tanaman padi yaitu 3.265 hektar dengan produksi sejumlah 21.744,46 ton. Produktivitas tanaman padi mencapai 6,66 ton/ha. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen dari tahun 2009 yaitu sebesar 21.385,75 ton. Dengan angka konversi bahwa 63,2% GKG menjadi beras, maka pada tahun 2010 produksi beras di Kota Pasuruan sebanyak 13.742,49 ton. Namun, data dari Dinas Pertanian Kota Pasuruan menyebutkan, pada tahun 2012, terjadi penyusutan lahan pertanian di Kota Pasuruan hingga 45 hektare, meski produksi beras masih berada pada kisaran 6-7 ton/hektare pada tahun yang sama. Produktivitas ini terkait dengan perhatian Pemkot Pasuruan pada ketersediaan sarana pertanian, penyediaan bibit unggul, pupuk dan jaminan pembelian gabah yang membuat para petani tak perlu resah usai panen raya.

Menjaga Pendapatan Petani Melalui Patokan Harga Gabah (Kota Pasuruan)

Kondisi lahan pertanian di kota Pasuruan kian susut akibat semakin banyak lahan pertanian produktif yang berubah menjadi lahan hunian. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan kota Pasuruan, dimana lahan pertanian sebenarnya mulai banyak dilirik oleh para pengembang perumahan atau para investor.

Namun, perubahan fungsi lahan ini tidak serta-merta secara keseluruhan mengubah para petani atau buruh tani untuk alih profesi, terutama bagi para petani yang secara turun-temurun sudah tinggal di kecamatan yang jauh dari pusat kota. Sebagian besar dari mereka ingin tetap mempertahankan usaha pertanian, walaupun pada generasi yang lebih muda di dalam keluarga para petani ini umumnya lebih memilih berkecimpung dalam profesi lain, bahkan kaum muda ini berani melangkah ke luar kota Pasuruan demi memperoleh pekerjaan lain di perusahaan, pabrik atau di sektor jasa.

Data hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 (st2013) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan memperlihatkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Pasuruan mengalami penurunan sebanyak 2.262 rumah tangga, dari 6.053 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi hanya 3.791 rumah tangga pada tahun 2013. Artinya, terjadi penurunan sebesar 3,74 persen per tahun. Penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul. Dua kecamatan ini terletak agak ke timur dari kota Pasuruan. Masing-masing kecamatan mengalami penurunan sebesar 53,74 persen dan 34,12 persen selama sepuluh tahun terakhir.

Budidaya Ikan Cupang (Kota Kediri)

Budidaya Ikan Cupang berkembang di Kota Kediri. Daerah yang menjadi sentral dari pembudidayaan Ikan Cupang adalah wilayah Ketami, Kota Kediri. Sejarah budidaya ikan cupang diawali dengan adanya pemberdayaan masyarakat ketami untuk pembudidayaan ikan jenis lele sebagai tambahan pendapatan bagi masyarakat di wilayah ketami yang menjalankan usaha pertanian. Program budidaya lele sebagai usaha tambahan masyarakat petani di wilayah ketami berkembang namun tidak bisa dioptimalkan untuk menjadi tambahan penghasilan yang memberikan dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat ketami. Dengan melihat situasi tersebut, pada tahun 1996 mulai ada masyarakat di Ketami yang berinisiatif untuk mengembangkan budidaya ikan jenis ikan cupang sebagai alternative usaha diluar budidaya ikan lele. Pilihan dari pembudidayaan ikan cupang oleh masyarakat Ketami adalah melihat potensi pengembangan dan pembudidayaan ikan cupang yang masih cukup besar karena masih belum banyak

masyarakat yang mengembangbiakkan padahal permintaan masyarakat terhadap ikan cupang cukup besar. Potensi pasar yang cukup besar ini yang kemudian dioptimalkan oleh masyarakat ketami, Kota Kediri untuk semakin menekuni budidaya Ikan Cupang. Setidaknya terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dalam proses budidaya ikan cupang, yakni:

1. tidak memerlukan lahan yang luas, bisa dengan lahan yang kecil dalam bentuk kolam-kolam kecil
2. hasil yang diperoleh memuaskan dibandingkan melakukan budidaya ikan konsumsi
3. perawatan relative mudah dan kendala tidak terlalu banyak
4. modal usaha tidak membutuhkan biaya yang besar.

Secara umum program budidaya ikan cupang ditujukan untuk meningkatkan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kota Kediri pada umumnya dan masyarakat Ketami pada Khususnya. Budidaya ikan cupang setelah mulai menggeliat di daerah Ketami mulai diminati oleh beragam kalangan termasuk dari anak-anak muda yang telah lulus sekolah namun belum mendapatkan pekerjaan/ menjadi pengangguran.

Setelah semakin berkembang, aktifitas usaha selanjutnya diwadahi dalam Kelompok pembudidaya ikan karya mina, yang mana anggota-anggotanya melaksanakan dua aktifitas usaha yakni pembenihan dan pembesaran.

Pengembangan Wilayah Atsiri (Kab. Blitar)

Wilayah Blitar Utara merupakan wilayah pertanian. Sebelumnya telah ada petani-petani untuk kebutuhan menanam dengan produk akhir minyak atsiri. Namun dalam perkembangannya, petani-petani ini tidak melakukan akibat trauma ditipu oleh salah satu tengkulak. Sedangkan disatu sisi potensi atsiri amat besar dan kebutuhan pasar juga besar

Diawali oleh program PHKI UB ttg pengembangan minyak atsiri, kemudian sinergi dengan program pemkab dalam koridor Putri Kencana untuk pengembangan java atsiri. Atsiri yang dikembangkan adalah dari bahan baku nilam, jeruk purut, akar wangi dan kenanga.

Program dimulai 2011, dana yg digulirkan untuk 2011 500 juta dari pemkab, sedangkan 2012 dana yg digulirkan sebesar 450 juta.

Kemitraan Gapoktan-BULOG (Kota Kediri)

Menjadi petani saat ini dirasa kurang memberi keuntungan secara ekonomi. Tidak heran jika semakin banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk melakukan aktifitas pertanian dan cenderung untuk melakukan aktifitas usaha lain yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Situasi ini jika terus berlangsung akan mengakibatkan sector pertanian terancam. Pemerintah Kabupaten Jombang melihat adanya kerawanan pada sector pertanian dan mencoba mencari solusi bagi persoalan di sector pertanian.

Berdasarkan analisa dari dinas pertanian pemerintah Kabupaten Jombang salah satu factor yang menjadikan sector pertanian kurnag menguntungkan secara ekonomi adalah para petani dalam melaksanakan aktifitas pertanian masih menggunakan pola yang sederhana, bekerja secara sendiri-sendiri/ individu dan kurang mampu melakukan

kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa mendukung terlaksananya aktifitas pertanian yang menguntungkan. Berpijak dari analisa diatas maka dinas pertanian kabupaten Jombang menyusun program untuk para petani yakni Program Kemitraan Gapoktan-BULOG.

Tujuan dari program kemitraan Gapoktan-BULOG adalah untuk meningkatkan peningkatan pendapatan petani melalui perubahan pola pertanian dari pola budidaya menuju bisnis melalui pemberdayaan Gapoktan. Program kemitraan Gapoktan-BULOG disini merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan salah satu masalah yang dihadapi petani yang cenderung melakukan pola pertanian tradisional dan kurang berorientasi bisnis. Dengan adanya pola pertanian berorientasi bisnis melalui program kemitraan GApoktan-BULOG maka bisa diharapkan adanya perubahan hasil dari aktifitas pertanian yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi para petani.

Ketika Sampah Menggantikan Rupiah

Sampah merupakan problem yang dihadapi semua daerah. Di wilayah perkotaan, persoalan tersebut semakin terasa karena padatnya penduduk dan tingginya volume sampah. Hal tersebut juga dirasakan kota yang terdiri dari 57 kelurahan ini.

Berangkat dari keinginan kuat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bebas dari sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang merintis pengembangan bank sampah sejak pertengahan 2011. Pelopornya adalah para kader lingkungan yang dipimpin oleh Rahmat Hidayat.

Bank Sampah Malang (BSM) sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia. Lembaga serupa telah ada di beberapa daerah lain, ketika Kota Pendidikan ini bertekad mendirikan BSM. Tapi, keseriusan para pengurusnya telah mengubah program ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, bukan sekadar program Pemkot Malang.

Hingga November 2013, BSM yang berkantor pusat di Jalan S Supriyadi No. 38 Malang ini telah memiliki 303 unit BSM Masyarakat dan 174 unit BSM Sekolah. Juga 24 BSM instansi, 14 unit lapak pengepul dan 542 anggota perorangan.

Dari jumlah itu, sekitar 90 persen BSM Masyarakat yang dinilai aktif. Sedangkan untuk BSM Sekolah, jumlah unit yang dinilai aktif lebih kecil lagi (sekitar 60 persen). “Tapi, total nasabah kami telah mencapai lebih dari 22 ribu orang,” tutur Rahmat yang kini menjabat Direktur BSM.

Dari sisi volume, BSM awalnya hanya mampu mengolah dua ton sampah per hari. Saat ini, kemampuan tersebut telah meningkat menjadi tiga ton per hari. Omzetnya pun tidak bisa dibilang kecil, berkisar antara Rp 4-5 juta per hari atau sekitar Rp 150 juta per bulan. “Keuntungan bruto yang diperoleh BSM sekitar 30-35 juta per bulan,” imbuhnya. Nilai omzet tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kondisi setahun lalu. Pada awal November 2012, Kepala DKP Kota Malang Wasto sempat menyatakan bahwa nilai transaksi BSM baru mencapai dua juta rupiah per hari.

Keberhasilan Rahmat mengembangkan BSM memang tidak bisa dilepaskan dari peran DKP yang dipimpin oleh Wasto. Juga, dukungan penuh dari tim penggerak PKK pada saat kepemimpinan Peni Suparto. “Pak Wasto *all out* membantu BSM. Baik dari aspek pemikiran, pendanaan, maupun pengawasan dan pembinaan,” aku Rahmat.

Jika dibandingkan dengan total volume sampah Kota Malang yang berkisar antara 400-600 ton per hari, jumlah sampah yang berhasil diolah oleh BSM tentu belum seberapa. Namun, dari sisi partisipasi masyarakat, kota ini relatif telah berhasil menjadikan bank sampah sebagai sebuah gerakan yang bersifat massif.

P3EL (Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) (Kota Surabaya)

Program yang mensasar kaum perempuan ini dilaksanakan sejak 2010. Program ini dilaksanakan dengan beberapa latar belakang. Yang pertama adalah masih tingginya angka kemiskinan di Surabaya. Dari data di Bappenas pada 2010, jumlah KK miskin yang ada adalah 112.465 keluarga. Keluarga miskin ini terbagi menjadi tiga kategori: mereka yang Sangat Miskin: 7.396 keluarga, Miskin: 58134 keluarga, dan Hampir Miskin mencapai 47035 keluarga. Patokan yang digunakan sebagai acuan untuk penggolongan miskin adalah dengan menggunakan syarat-syarat dari Badan Pusat Statistik, seperti lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, jenis lantai bangunan dari tanah/bambu/kayu murahan, tidak memiliki fasilitas buang air besar, etc.

Urban Farming (Surabaya)

Program kedua di bidang pemberdayaan adalah Urban Farming. Sama dengan P3EL, program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Ada dua jenis pertanian perkotaan ini: tanaman agrobisnis dan perikanan.

Ada dua latar belakang lahirnya program urban farming. Yaitu, masih tingginya kemiskinan di kalangan masyarakat perkotaan, dan lahan konvensional yang semakin sempit karena alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Program ini bertujuan untuk:

1. Memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah.
2. Upaya untuk memberdayakan keluarga miskin dan menekan angka kemiskinan.
3. Hasil panen difokuskan untuk makan anggota keluarga sendiri (untuk pemenuhan gizi keluarga).
4. Perbaiki lingkungan (lahan yang dimanfaatkan untuk urban farming kebanyakan adalah lahan tidur).

Ada dua jenis kegiatan untuk urban farming: pertanian dan peternakan. Kedua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah. Untuk pertanian, difokuskan untuk tanaman hortikultural (sayur-sayuran). Sedangkan untuk perikanan difokuskan untuk peternakan lele. Untuk tanaman sayuran, menggunakan metode *polybag* atau di tanah atau dengan menggunakan metode vertical garden. Sedangkan untuk perikanan dilakukan dengan menggunakan kolam terpal.

Program Penataan PKL (Surabaya)

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya memang menjadi persoalan yang sangat pelik. Tidak jarang kita membaca di surat kabar atau menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri bentrok antara PKL dengan kesatuan polisi pamong praja (Satpol PP). ini terjadi karena kebanyakan PKL di Surabaya menggunakan fasilitas social dan fasilitas social ketika mereka berjualan ini. Sehingga, “merusak” keindahan pemandangan kota.

Berbekal PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Dinas Koperasi dan Perdagangan-pun melakukan penataan PKL. Ada dua tujuan yang ingindicapai dengan program ini: yaitu terwujudnya kehidupan usaha PKL di wilayah Surabaya yang didukung oleh perilaku usaha sesuai dengan ketentuan, dan adanya lingkungan usaha yang tertib, aman, bersih, dan indah sesuai dengan ketentuan. Sebagai kota metropolis, Surabaya memiliki begitu banyak jumlah PKL yang tersebar di Surabaya. Untuk mempermudah pendataan, PKL di Surabaya dibagi berdasarkan wilayah.

- (a). Wilayah Barat yang meliputi kecamatan Tandes, Suko Manunggal, Asemrowo, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, dan Pakal. Di wilayah ini terdapat 2603 PKL.
- (b). Wilayah Timur terbagi dalam kecamatan Sukolilo, Gununganyar, Rungkut, Mulyorejo, Gubeng, dan Tenggilis Mejoyo.
- (c). Wilayah Utara meliputi kecamatan Pabean Cantian, Semampir, Krembangan, Kenjeran, dan Bulak. Di kawasan ini terdapat 2208 PKL.
- (d). Pusat yang meliputi kecamatan Tegalsari, Simokerto, Bubutan, dan Genteng.
- (e). Selatan meliputi kawasan Karangpilang, Wonocolo, Sawahan, dukuh Pakis, Jambangan, Gayungan, Wiyung, dan Wonokromo. Terdapat 3309 PKL di tempat ini.

Dalam penataan PKL, Dinas UKM dan Koperasi biasanya memberdayakan para PKL yang sudah ada (berjualan) di kawasan-kawasan tertentu. Sebelum melakukan penataan PKL, Dinas UKM dan Koperasi biasanya mengadakan pendekatan dengan para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan tersebut. Dinas biasanya “memegang” beberapa orang pedagang yang ada di kawasan itu untuk mengkoordinir pedagang-pedagang lainnya. Seperti misalnya yang terjadi pada para PKL yang ditempatkan di sentra PKL Taman Prestasi Ketabang Kali. Sebelum ditempatkan di sentra ini, mereka pada umumnya adalah para PKL yang berjualan di sekitar Taman Prestasi, Ketabang Kali, sekitar Balai Pemuda/Kantor DPRD/Jl. Yos Sudarso, dan Jalan Wuni. Di Surabaya, sentra PKL yang dibangun pertama kali adalah di dekat rumah susun Urip Sumoharjo.

PELAYANAN PENDIDIKAN

Meningkatkan Minat Baca Lewat Taman Baca Masyarakat (Kota Surabaya)

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal: yang pertama adalah rendahnya minat baca masyarakat di Surabaya. Ini diketahui dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan terhadap

20 ribu orang di Surabaya. Hasilnya sungguh memprihatinkan. Sebab, rata-rata minat baca hanya 26 persen. Hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, yang secara fasilitas, infrastruktur buku sangat mendukung, tapi sayangnya dimiliki dan dikelola oleh swasta.

Sebab lainnya adalah tidak semua warga Surabaya mampu mendapatkan akses ke sumber bacaan karena alasan ekonomi dan ketidakadaan akses. Sehingga, masyarakat kelas bawah sangat susah untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan.

Kurang meratanya minat baca masyarakat juga turut “didukung” oleh sarana perpustakaan yang sebenarnya bisa menjangkau ke masyarakat luas seperti perpustakaan kelurahan dan perpustakaan sekolah kurang optimal. Fenomena yang terjadi di Surabaya, banyak perpustakaan kelurahan dan perpustakaan sekolah mati suri. Perpustakaan sekolah pada umumnya kurang difungsikan dengan baik – seperti misalnya, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah tidak dipinjamkan. Atau, perpustakaan sekolah yang dijadikan gudang.

Kondisi ini direspon dengan rencana didirikannya Surabaya Learning Center (SLC) di masa kepemimpinan Bambang DH. SLC ini bakal dibangun di kompleks Pemerintah Kota Surabaya (di dekat pojokan SMAN 5 Surabaya). Akan tetapi muncul kritik, kalau SLC dibangun di pusat kota dan pusat pemerintahan, ini akan menguatkan terpusatnya pendidikan di satu titik saja. Dan, akan mengabaikan perkembangan pendidikan di wilayah-wilayah pinggiran Surabaya. Menyikapi hal ini, anggaran dan rencana program kemudian di-switch ke program yang lebih bisa secara massif menjangkau wilayah-wilayah lainnya di Surabaya. Oleh karena itu, lahirlah program Taman Baca Masyarakat (TBM).

Rangkaian Program Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Blitar (Kota Blitar)

Dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan *multiintelengensi*, Pemkot Blitar memiliki sejumlah program Pendidikan terpadu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Keterpaduan program tersebut diwujudkan dalam rangkaian program Inovasi PAUD.

Rangkaian Program Inovasi PAUD diimplementasikan dalam beberapa program, yaitu:

- (1) Satuan PAUD /Pos PAUD terpadu.
- (2) program *parenting* bagi wali murid PAUD.
- (3) program inovasi dari lembaga PAUD Sabana yaitu Becak gaul sebagai wahana edukasi murid dan wali murid.

Program Satuan PAUD diimplementasikan melalui standart SAUD itu sendiri yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Blitar pada PAUD yang tersebar di 21 Kecamatan di Kota Blitar ini sendiri dengan serangkaian program, diantaranya tempat penitipan anak, Kelompok Bermain, Taman kanak-kanak, Posyandu terpadu serta program pemberdayaan PAUD lainnya. Program PAUD ini dikembangkan sesuai dengan visi misi dari PAUD itu sendiri yakni membentuk siswa yang cerdas dan komprehensif, sedangkan untuk mencapai visi misi tersebut seluruh elemen pendukung PAUD harus mengembangkan 6 aspek bagi para siswa, yaitu : kognitif, afektif, bahasa, sosial, emosi, dan psikomotorik.

Program *parenting* bagi wali murid yang anaknya berada di PAUD diimplementasikan melalui:

- (1) Memberikan materi tentang pendidikan anak.
- (2) Tentang kesehatan anak.
- (3) Tentang status gizi anak.
- (4) Memberikan materi seputar manfaat dan kegunaan asi.

Tujuan diadakannya program ini adalah memberi bekal sebanyak-banyaknya bagi wali murid untuk diterapkan di rumah yang nantinya diharapkan agar para siswa PAUD dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, dan komprehensif yang disesuaikan kreatifitas sesuai dengan PAUD masing-masing.

Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (Kota Blitar)

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Blitar yakni berupa pendidikan dan sebagai peningkat Indeks Pertumbuhan manusia serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) masyarakat di Kota Blitar, Pemkot Blitar memiliki program pendidikan unggulan yakni Rintisan Wajib belajar 12 Tahun yang diimplementasikan dalam rencana dan agenda yang strategis yang akan dijelaskan lebih terperinci selanjutnya.

Program rintisan wajib belajar 12 tahun ini diimplementasikan melalui jaminan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak-anak/siswa yang berada dalam binaan Pemerintah Kota Blitar yaitu berupa:

- 1) Membebaskan biaya sekolah dari tingkatan sekolah Dasar (SD) sampai Pada tingkatan Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA) dan sederajat yakni berupa SPP Gratis dan uang gedung gratis bagi Sekolah Negeri dan rincian Bantuan bagi sekolah non Negeri dan madrasah yakni:
 - (a) SD/MI = Rp. 15.000,- per anak per bulan
 - (b) SMP/MTs = Rp. 25.000,- per anak per bulan
 - (c) SMA/MA/SMK = Rp. 75.000,- per anak per bulan serta uang praktek khusus siswa SMK = Rp. 125.000,- - Rp. 150.000,-Setahun per anak yang kesemuanya akan didistribusikan kepada UPTD yang diberi kuasa sebagai pengguna anggaran yang diestimasikan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.
- 2) Pemberian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) serta buku teks sekolah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut besarannya yang nantinya akan didistribusikan kepada masing-masing siswa.
- 3) Pemberian Seragam, sepatu, dan tas (alat penunjang) sekolah agar para siswa dapat merasa nyaman, bahagia dan semangat dalam menempuh masa-masa pendidikannya.

Program unggulan di atas dilatarbelakangi masalah utama/isu strategis sektor pendidikan, yakni WaliKota Blitar terpilih Bapak Samanhudi Anwar dalam visi misinya ingin menjadikan Kota Blitar sebagai Kota yang memiliki *trade mark* berupa pemenuhan hak pendidikan yang prima bagi seluruh anak-anak siswa Kota Blitar tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan sebelum masa WaliKota Blitar terpilih ini sendiri masalah pendidikan belum ada gagasan dan formulasi yang mampu menguraikan masalah di Kota Blitar, yakni masalah angka partisipasi sekolah yang masih rendah

serta Indeks pertumbuhan Manusia di Kota Blitar yang masih stagnan, maka dari itu dengan kebijakan politik anggaran yang sangat *concern* terhadap isu-isu pendidikan maka dirumuskanlah rintisan wajib belajar 12 tahun.

Siswa Asuh Sebaya (SAS) (Kab. Banyuwangi)

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) sebagai inovasi dikalangan Pendidikan untuk meringankan beban siswa kurang mampu, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Melalui program SAS, telah dibudayakan kepedulian siswa untuk menyisihkan sebagian dananya kepada siswa yang kurang beruntung, dan ini menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2012 infaq yang diperkirakan terkumpul mencapai 480 juta rupiah, yang akan di-shodaqoh-kan kepada 1.333 siswa yang kurang mampu. Namun hasilnya sungguh diluar dugaan, berkat kepedulian, kerja keras dan dukungan semua pihak, SAS di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 750 juta lebih, sehingga target sasaran awal yang hanya sebesar seribu lebih, meningkat menjadi 6.142.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang digulirkan Dinas Pendidikan Banyuwangi (Dispendik) sejak 2012 sukses menekan angka drop out siswa. Melalui program inovasi tersebut, siswa dari keluarga miskin dapat menuntaskan pendidikan. SEJAK diluncurkan pada Oktober 2012 hingga Mei 2013, program SAS sudah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 1,5 miliar. Penghimpunan dana partisipasi siswa dilakukan dengan cara berbeda-beda.

Penerapan IT dalam Proses Penyusunan dan Updating Data Pendidikan (Kota Probolinggo)

Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah/Tools for Reporting Information Management by School (TRIMS) merupakan sistem informasi pendidikan yang diharapkan dapat mensinkronkan data-data penting yang telah dikumpulkan oleh sekolah/madrasah. Aplikasi ini dapat dijalankan dengan praktis dan mudah dengan menggunakan Ms. Excel versi 2003 dan 2007.

TRIMS merupakan alat bantu yang dikembangkan melalui Program Basic Education Capacity – Trust Fund (BEC-TF) dalam rangka memperkuat EMIS di Indonesia. Kehadiran TRIMS tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau meniadakan jenis perangkat aplikasi pendataan lainnya, namun justru untuk memperkuat perangkat aplikasi yang sudah ada sebelumnya terutama pada aspek kemudahan baik input maupun output terkait dengan pendataan di sekolah/madrasah dan juga dalam pemanfaatan data dan informasi serta pelaporan.

TRIMS memperkuat Education Management Information System (EMIS) dalam rangka mendukung monitoring dan evaluasi, pelaporan, kebijakan strategis, serta perencanaan dan penganggaran. Hal ini terjadi karena TRIMS tidak hanya sebagai pengumpul data tetapi secara otomatis menyediakan bahan dan informasi bagi sekolah/madrasah berupa grafik dan tabel indikator utama dalam pendidikan, termasuk capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Awal mula dikenalkannya aplikasi TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by Schools) yang dikembangkan oleh Tim dari World Bank yaitu ketika pada tanggal 2-5 Juni 2010 Kota Probolinggo ditunjuk team dari World Bank sebagai piloting dalam penggunaan aplikasi TRIMS.

Optimalisasi Fungsi Satgas Jam Wajib Belajar (Kota Mojokerto)

Pemerintah Kota Mojokerto terus memotivasi warga kota agar benar-benar memperhatikan jam belajar para siswa saat berada di rumah. Bermula dari Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2009, yang kemudian disosialisasikan ke berbagai lembaga, kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat RT/RW secara gencar dan terus-menerus dilakukan, maka pada tahun 2012 Pemkot Mojokerto mulai menerjunkan satuan tugas (satgas) yang juga bertugas sebagai tim motivator ke RT/RW atau hunian penduduk. Tujuannya, untuk memantau jam belajar anak-anak di tiap rumah dan sekaligus memberi motivasi kepada orang-tua anak agar terus memonitor kegiatan belajar dan membaca putra-putri mereka mulai pukul 18.00 hingga pukul 19.00. Selagi anak-anak membaca materi pelajaran dari sekolah, menyalin catatan atau mengerjakan pekerjaan rumah, anggota tim motivator mengajak orang-tua berbincang seputar kesulitan yang dihadapi dalam membimbing pembelajaran anak-anak di rumah.

Secara hirarkis, Kelompok Kerja Program KMBP (Pokja KMBP) dibentuk oleh Walikota dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan, baik Kecamatan Magersari maupun Prajurit Kulon. Sedangkan Pos Koordinasi Program KMBP (Posko KMBP) dibentuk oleh Pokja KMBP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah satu Kelurahan (untuk sub program Keluarga Berlingkungan Pendidikan (SBP) dan Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP)). Posko KMBP dipimpin oleh Lurah (untuk Sub Program KBP dan MBP), dan dipimpin oleh Kepala Sekolah (untuk Sub Program SBP) yang dibantu oleh beberapa orang anggota terdiri dari tenaga pendidik, komite sekolah, perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat. Lurah atau Kepala Sekolah bertugas mengkoordinir Satgas Jam Wajib Belajar.

Radio Suara Pendidikan (Kabupaten Jombang)

Pada 2007, studio SP FM adalah sebuah ruangan kecil yang melekat di sisi selatan ruang tata usaha dinas pendidikan. Saat itu, Pri Adi masih berstatus staf di bagian keuangan. Kini, dia telah menduduki posisi kepala bidang ketenagaan. Radio SP FM pun telah memiliki dua unit studio yang cukup luas dan fasilitas yang cukup memadai.

Minimnya anggaran yang dialokasikan dari program Jardiknas, tidak menciutkan nyali tim kecil yang dipimpin Pri Adi. Sebab, dia bersama dua temannya punya cita-cita besar terkait pengelolaan pendidikan di Kabupaten Jombang. “Kami ingin mempercepat informasi dari dinas pendidikan ke sekolah dan menerima pengaduan dari guru, sehingga terwujud pelayanan yang *clean*, bebas suap dan pungli,” tegasnya.

Tapi, cita-cita mulia itu bukan tanpa hambatan. Pada awal beroperasi, resistensi terhadap keberadaan Radio SP FM justru datang dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Pasalnya, tidak jarang informasi dari dinas justru lebih cepat diterima guru

dibandingkan staf atau pimpinan UPTD. “Akhirnya, UPTD juga kami haruskan memantau radio agar tidak ketinggalan informasi,” kisahanya.

Sejak awal, keberadaan radio ini memang dimaksudkan untuk memutus mata rantai birokrasi dalam distribusi informasi. “Guru tidak perlu lagi menunggu info dari kepala sekolah atau kepala UPTD. Setiap penyimpangan atau pungutan terhadap pelayanan juga dapat langsung diterima oleh dinas, sehingga penanganannya lebih dini,” tandas peraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang ini.

Perlahan tapi pasti, pengakuan akan manfaat kehadiran radio ini pun mengalir. Berawal dari materi dan program siaran yang didominasi nuansa pengumuman, Radio SP FM kini telah berkembang menjadi media komunikasi dan transparansi informasi pendidikan di daerah.

Pengembangan Pelayanan Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren (Bondowoso)

Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten yang memiliki kultur masyarakat yang agamis. Tak heran jika pelayanan publik pada sektor pendidikan menyusun program pengembangan pelayanan pendidikan berbasis pondok pesantren. Oleh karena kentalnya kultur agamis di Bondowoso masyarakat dapat dikatakan sangat patuh pada pemimpin lokal (tokoh agama/Kyai). Hal tersebut juga dijadikan landasan program bagi dinas pendidikan Kab.Bondowoso untuk mengoptimalkan pola interkasi masyarakat dengan pemimpin lokal mereka guna percepatan dan ooptimalisasi program tersebut.

Di sisi lain masyarakat Bondowoso memiliki angka pernikahan pada usia dini yang cukup tinggi. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada kualitas generasi berkualitas yang menjadi target utama dari pemerintah Kab.Bondowoso melalui dinas pendidikan. Karena pada pernikahan dini secara langsung akan memutuskan proses wajib belajar dari anggota masyarakat yang melakukan pernikahan dini, permasalahan ini semakin kompleks jika di korelasikan dengan tingkat keesejahteraan pasangan nikah usia dini. akhirnya guna memutus rantai kompleksitas dari permasalahan yang bersinggungan langsung dengan pendidikan ini maka dinas pendidikan dengan programnya berupaya semakin mendekatkan sarana pendidikan melalui pondok pesantren.

Melihat semakin pesatnya perkembangan zaman yang menuntut masyarakat yang memiliki life skill yang memadai, hal ini juga harus terintegrasi pada satu pola pendidikan yang kompherhensif maka dinas pendidikan dalam program ini juga mengembangkan PAUD, TK, SD, SMK. Dengan banyaknya pondok pesantren dengan lokasi yang tersebar di daerah-daerah pelosok maka pengembangan pelayanan pendidikan berbasis pondok pesantren sangat cocok untuk perluasan dan pemertaan kesempatan memperoleh pendidikan. Program ini juga menekankan pola pendidikan *vocational*, dimana pendidikan diarahkan untuk dapat memberikan life skill yang tepat guna sekaligus sesuai dengan potensi lokal.

BOSDA (Kab. Tuban)

Untuk pendidikan, pemkab sudah memiliki rencana jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Visi untuk tahun 2011-2016 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religious, sejahtera dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih. Misi adalah (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3)

meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan; (4) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; (5) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Tujuan strategis yang ini dicapai adalah (1) tersedia dan terjangkau layanan PAUD berkualitas dan berkarakter; (2) tersedia, terjangkau, dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dan berkarakter; (3) tersedia dan terjangkau layanan pendidikan berkualitas, berkarakter, relevan dan berdaya saing internasional; (4) tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan; dan (5) tersedianya sistem tata kelola yang handal.

Program yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban untuk tahun 2012 adalah (1) PAUD); (2) pengendalian biaya pendidikan dan reward beasiswa bagi yang berprestasi; (3) peningkatan kesejahteraan pegawai (GT, GTT/PTT, ustad dan ustadzah)

PELAYANAN KESEHATAN

Kadarzi Anak Tokcer dan Harga Pas

Program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (Harga Pas) direncanakan sejak 2010 dan Anak Tumbuh Optimal Berkualitas dan Cerdas (Anak TokCer) sudah direncanakan sejak awal 2011.

Program Harga Pas dan Anak Tokcer merupakan program yang digagas Pemkab Banyuwangi guna mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis keluarga. Kedua program ini mengajak semua keluarga peduli kesehatan anak sejak dini, yakni sejak masa anak di dalam kandungan.

Melalui program Harga Pas, pemerintah daerah mengajak semua keluarga memilih alat kontrasepsi yang sesuai, pemeriksaan dini kehamilan, pemberian ASI dan imunisasi, membiasakan mencuci tangan dalam keluarga dengan sabun, dan membiasakan anggota keluarga BAB di jamban. Program Anak Tokcer mengajak semua keluarga memberikan gizi seimbang dan mencegah permasalahan gizi setiap anggota keluarganya, seperti menimbang berat badan bayi secara rutin, pemberian ASI eksklusif, pemberian Suplemen Gizi untuk ibu hamil, bayi dan balita, makan makanan yang beraneka ragam, dan menggunakan garam beryodium. Program inovasi harga Pas dan Anak Tokcer saling berkaitan.

Program Harga Pas dan Anak Tokcer disosialisasikan secara terus-menerus melalui kader-kader kesehatan di puskesmas dan posyandu. Tokoh agama dan masyarakat dilibatkan melalui pengajian dan acara kemasyarakatan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan anak sejak dini. Untuk menarik perhatian ibu-ibu datang ke posyandu, posyandu memberikan door prize. Bahkan, ada juga muncul inisiatif dari kader posyandu disosialisasikan lewat media arisan, sehingga mereka bisa saling share masalah kesehatan.

Ambugellu (Kabupaten Situbondo)

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan inovasi dalam bidang Pelayanan Kesehatan yaitu AAMBUGELLU dan AMBULAN RENGGANIS. Program AMBUGELLU merupakan program ambulan gerakan langsung layanan umum yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan diluar gedung pada tempat keramaian. Program ini berlangsung mulai Bulan Juli Tahun 2012 dengan berlangsung di Alun-alun Kota Situbondo.

Pelayanan kesehatan yang diberikan melalui Program Ambugellu adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan yang meliputi pelayanan pemeriksaan fisik dan pelayanan pemberian obat;
2. Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif;
3. Pelayanan Konsultasi meliputi konsultasi medik dan konsultasi Gizi
4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk pelayanan ini dikenai biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

5. Pelayanan Laboratorium Sederhana meliputi GDA (Gula Darah Acak), Asam urat dan kolestrol. Tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan Promotif digunakan untuk penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan merubah perilaku sakit menjadi sehat.

Program ini juga melibatkan Puskesmas disekitar Kecamatan Situbondo yaitu Puskesmas Panarukan, Puskesmas Panji, Puskesmas Kapongan, Puskesmas Situbondo, Puskesmas Mangaran dan Puskesmas Kendit. Selain itu juga melibatkan dokter muda yang sedang pengabdian untuk membantu dalam program ini. Waktu pelaksanaan setiap sabtu malam minggu di Alun-alun Kota Situbondo, untuk tahun 2013 ditambah di Alun-alun Besuki. Program Ambugellu selain memberikan pelayanan kesehatan, juga melakukan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat, antara lain penyuluhan tentang HIV/AIDS, JAMPERSAL, Narkoba dan lain sebagainya. Masyarakat yang menikmati pelayanan ambugellu pun menunjukkan kenaikan angka tiap bulannya.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Tidak Mempunyai Kartu JAMKESMAS, JAMKESDA, dan JAMPERSAL (Kabupaten Pamekasan)

Sejak Tahun 2008 sampai sekarang, Pemerintah Pusat melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Namun, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, JAMKESMAS tidak mampu menyebar secara merata, masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan JAMKESMAS. Selain itu, adanya JAMKESDA juga belum mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan, dinamisnya pergerakan angka masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Tidak Mempunyai Kartu JAMKESMAS, JAMKESDA, dan JAMPERSAL di Kabupaten Pamekasan.

Program yang dilaksanakan mulai tahun 2011 ini prosedur pelayanannya sama dengan pemegang kartu JAMKESMAS, JAMKESDA ataupun JAMPERSAL, namun prosedural pengajuan yang berbeda. Kalau masyarakat miskin pemegang kartu tinggal menunjukkan kartu yang dipegang, masyarakat miskin diluar pemegang kartu dapat menunjukkan KTP, KSK, dan SKTM yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Kecamatan.

Peningkatan Sarana Puskesmas (Magetan)

Puskesmas di Kabupaten Magetan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kecamatan. Sampai dengan Tahun 2012, Puskesmas di Kabupaten Magetan berjumlah 22 unit yang terdiri dari 17 Puskesmas perawatan (6 Puskesmas PONE) dan 5 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 18 Kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap penduduk sebesar 3,54 per 100.000 penduduk, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 Puskesmas atau 1 Puskesmas melayani 28.240 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten

Magetan sudah memenuhi dari target nasional (1 Puskesmas rata-rata melayani 30.000 penduduk).

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Magetan (Pembkab Magetan) mulai lebih fokus pada pembangunan sarana kesehatan yang diharapkan bisa menciptakan kenyamanan bagi pasien. Dari hasil pemantauan seksama Dinas Kesehatan (Dinkes) Pembkab Magetan selama 2010-2011 kepada puskesmas-puskesmas yang sudah ada, diketahui bahwa faktor kenyamanan ini sering dikeluhkan oleh pasien yang berobat. Sejak 12 Oktober 2009, Pembkab Magetan telah membebaskan biaya berobat untuk layanan kesehatan dasar di puskesmas.

Hasilnya, warga ber-KTP Magetan, terutama dari masyarakat miskin, berhak memperoleh layanan kesehatan gratis. Mereka tak lagi enggan untuk datang ke puskesmas, meski sekadar memeriksakan kesehatannya, sebab sudah tak ada lagi biaya berobat. Namun, pasien merasa kurang nyaman berada di puskesmas yang sempit, apalagi jika jumlah pasien bertambah dari hari ke hari, maka pasien acap berkeluh-kesah soal suasana yang sumpek dan tidak nyaman. Padahal, faktor kenyamanan berobat di puskesmas diakui memberi dorongan kepada pasien untuk lekas sembuh dan kembali beraktivitas.

Kader Asuh (Kabupaten Pasuruan)

Program Kader Asuh ini merupakan model intervensi pemberdayaan masyarakat di DESA SIAGA. Program ini di Kabupaten Pasuruan telah mulai dilaksanakan di wilayah Puskesmas Ngempit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Setelah melakukan pemantauan seksama, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan segera mereplikasi program ini untuk 33 puskesmas lain di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun ini. Sebab, setelah berlangsung beberapa tahun, ternyata Program Kader Asuh terbukti mampu memberikan daya ungkit terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui informasi, data dan peranan pendampingan kader asuh yakni salah satunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Puskesmas Ngempit. Oleh karenanya pada tahun 2013, dengan dukungan dan peran serta aktif Tim Pembina Desa Siaga & Tim Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), Tim Gerakan Memberdayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Berbasis Masyarakat (GEMERLAP BERSAMA) untuk dilaksanakan di satu desa percontohan di seluruh puskesmas Kabupaten Pasuruan.

Kader asuh merupakan kader kesehatan yang kegiatannya lebih fokus pada pendampingan dan pemantauan terhadap sasaran kesehatan yang ditentukan dalam satu wilayah posyandu. Kader Asuh lebih mengoptimalkan peran kader di luar posyandu melalui pola surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, yang terfokus pada keluarga binaannya. Kader tersebut memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan yang ada di wilayah keluarga binaannya, terutama masalah Kesehatan Ibu dan Anak. Jati diri seorang kader asuh adalah ibu rumah-tangga yang telah memperoleh ijin suami untuk aktif dalam upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat di lingkungan tempatnya berada. Aktivitas mereka bersifat sukarela, meski ada alokasi honorarium untuk mereka, namun honorarium ini masuk ke kas paguyuban kader asuh.

IUD Pasca Placenta (Kab. Blitar)

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan RS Pemerintah Klas B non pendidikan yang menjadi pusat rujukan di Kabupaten Blitar. Pasangan usia subur di kabupaten Blitar cenderung tinggi. Untuk data tahun 2010, ada 227.218 pasangan usia subur di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, dinas kesehatan Kabupaten Blitar menargetkan peningkatan pemakaian kontrasepsi sampai dengan 65% sampai dengan tahun 2014. Untuk menuju target tersebut, diakhir tahun 2010 RSUD Ngudi Waluyo menerapkan inovasi berupa IUD pasca placenta.

Keuntungan IUD Pasca Placenta dibanding dengan alat kontrasepsi lainnya adalah: (1) dapat dipasang tanpa menggunakan alat, langsung pakai jari petugas segera setelah placenta lahir; (2) portio masih membuka, untuk petugas mengerjakan lebih mudah, dan bagi pasien hal ini mengurangi rasa sakit jika dibanding harus memakai IUD biasa setelah masa nifas; dan (3) lebih praktis untuk pasien karena sudah dalam keadaan posisi siap dipasang serta lebih nyaman.

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi (Kab. Jember)

Selama ini periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu (AKI). Disisi lain, pertolongan persalinan masih besar dilakukan oleh dukun. Hal ini menjadikan tingkat resiko AKI menjadi besar. Ini menjadi perhatian utama munculnya program ini.

Program kemitraan bidan dan dukun bayi adalah program nasional yang sudah ada sejak tahun 2006. Tujuan dari program ini adalah (1) meningkatkan jumlah referral dari dukun bayi ke bidan; (2) meningkatkan alih peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra bidan dalam merawat ibu nifas dan bayinya; dan (3) meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Kemitraan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra bidan dalam perawatan ibu dan bayi pada aspek non medisnya.

Dukun tetap dilibatkan pada kegiatan yang terbatas, yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Meski sudah ada sejak tahun 2006, namun keikutsertaan dukun dalam program ini masih rendah. Rendahnya tingkat kompensasi terhadap dukun menjadikan dukun enggan untuk melakukan referral ke bidan. Dianggap penanganan sendiri lebih menguntungkan. Berdasarkan informasi dari Ibu Titi, kepala seksi kesehatan keluarga dinas kesehatan pemkab Jember, dikatakan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan kepada dukun bayi pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 100.000/3 orang pasien.

'Transfer of Knowledge' Kesehatan Jiwa Tingkat Puskesmas (Kota Probolinggo)

Sejak 10 Januari 2012 Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berinisiatif untuk melakukan upaya 'transfer of knowledge' (transfer ilmu pengetahuan) tentang kesehatan jiwa dan penanganan pasien penyakit kejiwaan di tingkat Puskesmas, bukan tingkat Rumah Sakit. Pemilihan di tingkat Puskesmas ini dikarenakan untuk lebih bisa dijangkau oleh masyarakat tak mampu. Selain itu, khalayak umum di Kota

Mojokerto sudah lebih akrab dengan pelayanan di tingkat puskesmas yang sederhana dan murah.

Di kota Mojokerto terdapat lima puskesmas (Puskesmas Blooto, Puskesmas Kedundung, Puskesmas Mentikan, Puskesmas Wates serta Puskesmas Gedongan), dan Puskesmas Gedongan yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 54 dipilih sebagai percontohan untuk penanganan pasien penyakit kejiwaan sekaligus sebagai lokasi untuk 'transfer of knowledge' dari dokter spesialis kejiwaan kepada tenaga medis setempat. Puskesmas Gedongan dipilih selain karena kerap menjadi rujukan berbagai pihak untuk riset kesehatan masyarakat di kota Mojokerto, juga disebabkan mudah dijangkau oleh warga masyarakat kota Mojokerto.

Dalam pemantauan Dinkes Pemkot Mojokerto selama tahun 2009-2011, terdapat kasus-kasus kesehatan jiwa yang menimpa warga miskin yang membutuhkan penanganan khusus. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Wahidin Sudiro Husodo di Kota Mojokerto, sebab belum ada tenaga medis spesialis penyakit kejiwaan (psikiatri) di lingkungan rumah sakit tersebut, sedangkan kasus-kasus penyakit jiwa tercatat oleh Dinkes, cenderung naik tiap tahun. Penyakit jiwa itu meliputi stres, depresi, halusinasi hingga ke tingkat yang lebih parah yang membutuhkan pemantauan intensif. Sebaliknya, pemahaman tenaga medis di lingkungan Dinkes Kota Mojokerto tidak memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut, sementara keluarga pasien kerap berharap ada unit perawatan kejiwaan yang bisa menjadi rujukan untuk penyembuhan anggota keluarga yang terjangkau gejala penyakit jiwa.

Di awal tahun 2012 Dinkes Kota Mojokerto kemudian melakukan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jawa Timur di Jalan Menur 120, Kota Surabaya. Perjanjian bernomor 400/96/417.302/2012 antara kedua instansi bertujuan meningkatkan kompetensi petugas kesehatan di lingkungan puskesmas di Kota Mojokerto. Dalam perjanjian disebutkan, pihak puskesmas melalui dukungan spesialis kedokteran kejiwaan dari RSJ Menur, melakukan kegiatan berupa pemeriksaan klinis, penegakan diagnosa, penetapan terapi, pemberian resep, konsultasi, pelaksanaan bimbingan transfer of knowledge kepada dokter dan perawat di puskesmas. Dokter spesialis jiwa dari RSJ Menur yang ditugaskan terjun ke Kota Mojokerto melaksanakan tugasnya sebanyak 12 kali dalam tahun 2012. Sebulan sekali dokter terkait hadir di Puskesmas Gedongan untuk melakukan pelayanan kesehatan jiwa, pemeriksaan pasien sekaligus pembimbingan tenaga medis di puskesmas tersebut.

Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Non-Kuota (Kota Pasuruan)

Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah berinisiatif untuk mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) miskin. Alokasi anggaran ini berada di luar skema Jamkesmas dan Jamkesmasda dan langsung diletakkan di dalam struktur APBD Kota Pasuruan. Penjaminan kesehatan bagi warga miskin ini dikelola oleh RSUD Dr Soedarsono, sebuah rumah sakit tipe C+, dengan nomenklatur anggaran 'Benar-Benar Miskin' (BBM). Alokasi anggaran ini merupakan prakarsa Pemkot Pasuruan yang disetujui oleh DPRD sejak tahun 2008, yang awalnya direalisasikan sebesar Rp. 1.996.771.540 untuk 2.295 kunjungan rawat jalan dan 1.549 kunjungan rawat inap. Kemudian, pada tahun 2009, meningkat menjadi Rp. 2.798.857.241, yang dimanfaatkan untuk 3.934 kunjungan rawat jalan dan 2.506 kunjungan rawat inap. Memasuki tahun

2010 dianggarkan sebesar Rp. 3,6 M untuk masyarakat BBM. Diharapkan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit tetap dapat memanfaatkan dana BBM, meski Pemkot Pasuruan telah mengadakan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait realisasi Jamkesmas.

Koordinasi Pemkot Pasuruan dan Pemprov Jatim terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah atau yang akrab disebut Jamkesda terbit. Petunjuk Pelaksanaan Perda ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Mengingat pelayanan kesehatan masyarakat miskin berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah dicakup oleh Jamkesmas, maka masyarakat miskin yang belum termasuk dalam kuota Jamkesmas ditanggung oleh Jamkesda.

Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (IPPT) sebagai Pusat Bantuan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Kabupaten Malang)

Di Kabupaten Malang sejak awal tahun 200-an kasus KDRT mulai merebak. Dari 2003 – 2011 rata-rata per tahun kasus KDRT berkisar >100 kasus. Dan pada tahun 2012 melonjak menjadi 159 kasus. Secara umum kasus KDRT meningkat. Selain daripada itu juga terjadi peningkatan kekerasan seksual yang menyebabkan trauma pada korban baik perempuan maupun anak.

Adanya kejadian yang mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini menjadi keprihatinan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selanjutnya menyusun program khusus yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak. Program yang dikembangkan adalah Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (IPPT) sebagai Pusat Bantuan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Tujuan dari dikembangkannya IPPT adalah Menjadi instalasi yang peduli terhadap korban perempuan dan anak yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak serta mengembangkan jaringan kerjasama dalam pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

SUTERA EMAS (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat/Community Based of Integrated Epidemiological Surveillance (Kab. Malang)

Program SUTERA EMAS adalah program yang menerapkan sistem kewaspadaan dini untuk penyakit berpotensi wabah dan upaya mendukung penanggulangan kematian ibu dan anak. Latar Belakang dari program ini adalah adanya potensi wabah penyakit di Kabupaten Malang yang membutuhkan respon cepat sehingga bisa meminimalisir terjadinya wabah penyakit di Kabupaten Malang. Program SUTERA EMAS didesain untuk mengantisipasi Kondisi Luar Biasa.

Tujuan dari program SUTERA EMAS ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari program SUTERA EMAS adalah : mencapai visi/misi bidang kesehatan: masyarakat sehat, berkeadilan dan mandiri. Adapun tujuan spesifik dari program SUTERA EMAS adalah: Membangun system kewaspadaan dini, menurunkan angka kematian, mempercepat pelaporan, pengambilan keputusan dan pencegahan.

Program SUTERA EMAS dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kader kesehatan RT memberi informasi kepada bidan desa tentang adanya warga di lingkungan Rt-nya yang mengalami sakit dengan potensi wabah (misalnya: diare, DBD)
2. Informasi dari kader RT selanjutnya direspon oleh Bidan dengan melakukan pengecekan ke warga yang sedang mengalami sakit dengan potensi wabah
3. Setelah didapatkan informasi terkait jenis penyakit yang diderita, Bidan Desa selanjutnya mengirim SMS ke server yang ada di Puskesmas Kepanjen dan dinas Kesehatan. Isi sms termasuk: nama, lokasi. Jenis keluhan
4. Server secara programatik melakukan pencatatan dan ketika SMS-SMS yang masuk ke server memberikan informasi terkait jumlah warga yang mengalami sakit dengan potensi wabah. Data tersebut langsung di share ke nomor-nomor tertentu yang sudah diintegrasikan dengan server (No hp Kepala Dinas,dll)
5. Ketika jumlahnya melampau batas yang ditentukan, server selanjutnya memberi alarm terkait potensi wabah berikut memberikan peta lokasi wilayah yang berpotensi wabah untuk member warning agar segera melakukan turun lapangan
6. Informasi tersebut selanjutnya direspon oleh Bagian penanganan penyakit / bagian penanganan kematian ibu dan anak

Program SUTERA EMAS mulai diinisiasi sejak tahun 2004. Embrio program ini adalah aktifitas-aktifitas pemantauan yang dilaksanakan oleh Dr. Hadi Puspita mulai dari Sensus Harian penyakit yang selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi. Program SUTERA EMAS mulai diuji coba sejak tahun 2010 dan efektif dilaksanakan di Puskesmas Kepanjen pada tahun 2012, untuk tahun 2013 telah dirancang penambahan Puskesmas yang terlibat dengan mentargetkan 8 Puskesmas terlibat dalam SUTERA EMAS

PELAYANAN ADMINISTRASI DASAR

Tawarkan Sistem Paket, Pangkas Proses Perijinan

Dalam konteks desentralisasi, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mengawali penerapan pelayanan perijinan secara terpadu. Pada 2001, daerah ini telah membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM). Satuan kerja ini merupakan penyempurnaan unit pelayanan terpadu (UPT) yang telah dirintis sejak 1997.

Mengutipiklan salah satu produk, daerah ini terus berinovasi tiada henti. Pada 2003, DPPM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Keberanian inilah yang menjadi salah satu pertimbangan JPIP menganugerahkan *Otonomi Award* kategori pelayanan administrasi pada 2005.

Pada 2008, terjadi perubahan nomenklatur DPPM menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Hal itu sebagai implementasi PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sistem manajemen mutu yang diterapkan pun di-*upgrade* menjadi ISO 9001:2008 pada 2010.

Setahun berikutnya, badan yang berkantor di Jalan Pahlawan Sidoarjo kali ini merintis inovasi pelayanan perijinan satu paket. Program ini diluncurkan pada akhir 2011 dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No 39/2011 tentang Penerbitan Perijinan Satu Paket. Dalam tataran implementasi, peraturan ini baru efektif berlaku pada Januari 2012.

Inovasi yang berasal dari inisiatif staf BPPT ini dikenalkan kepada publik dalam Pameran Pelayanan Publik di Madiun. Program ini merupakan upaya BPPT untuk menggabungkan prosedur dan tahapan pengurusan beberapa ijin menjadi satu proses terpadu, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

Ada dua jenis paket perijinan yang ditawarkan. Paket I terdiri dari enam jenis perijinan dan Paket II terdiri dari tiga jenis ijin perijinan. Dalam proses pengurusan secara reguler (satu persatu), keenam ijin dalam Paket I baru akan selesai dalam 24 hari kerja setelah semua syarat dinyatakan lengkap. Sedangkan tiga jenis ijin dalam Paket II baru bisa selesai dalam 21 hari kerja.

Good Governance Award (GGA)

Pemerintahan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang memadai terkait dengan kapasitas organisasi, kinerja dan pencapaian programnya. Selain itu, standar pelayanan masyarakat dari pemerintahan tingkat kelurahan yang bersandar pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi perlu diaktualisasikan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dibentuknya Good Governance Award (GGA) oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo, dengan leading sector Bappeda, mengadakan Sosialisasi tentang Good Governance Award, di gedung Sabha Bina Praja dengan mengundang 29 Kelurahan dan kecamatan se-Kota Probolinggo sebagai peserta dan tim penilai dari bagian umum, bagian organisasi, bagian pemerintahan sekretariat daerah, inspektorat, asisten 2, Bappeda, serta perwakilan Perguruan Tinggi dari FISIP UB.

Dari 29 kelurahan yang ada, tim penilai kemudian melakukan uji melalui pemberian kuisisioner dan score card. Hasilnya, ada 15 perwakilan kelurahan yang mewakili 5 kecamatan yang ada di Kota Probolinggo lolos menjadi perwakilan. Lewat uji akuntabilitas, transparansi dan partisipatif, 15 perwakilan ini kemudian disaring lagi menjadi 9 nominasi. Di tahap nominasi, tim penilai melakukan observasi lapangan guna mencocokkan data yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Di tahap ini, lewat diskusi dan penelaahan yang mendalamlah akhirnya muncul 3 nama kelurahan yang terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan ditingkat kelurahan dan memberikan apresiasi bagi pemerintahan ditingkat kelurahan terkait pencapaian kinerjanya. Serta melembagakan kesadaran akan pentingnya mengelola pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance. Mengenai program GGA sendiri merupakan program penilaian capaian kinerja berdasarkan prinsip good governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Ada beberapa indikator penilaian dalam program GGA ini. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam sebuah program, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, serta peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, dan lainnya. Dalam Good Governance Award ini, ada 3 metode penilaian, yaitu: kuisisioner kelurahan yang dipaparkan oleh Lurah dengan poin 40%, kemudian data pendukung dengan poin 25% serta observasi penilaian publik sebesar 35%.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Tuban)

Untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Bupati melimpahkan sebagian wewenangnya kepada camat. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Tuban no 52 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat. Sebelum aturan ini dibuat, camat menyelenggarakan 7 tugas umum pemerintahan yaitu: (1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; (6) membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Tugas ini kemudian ditambahkan dari beberapa wewenang bupati terkait penanganan sebagian urusan pemerintahan yang terbagi kedalam 20 bidang

Bupati Menyapa Rakyat (Kabupaten Malang)

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki Program untuk mendekati diri kepada masyarakat melalui program payung bernama Bupati Menyapa Rakyat. Program Bupati Menyapa Rakyat terdiri dari tiga program yakni:

- Ngobrol pagi bersama bung rendra
- Anjongsana ke33 kecamatan
- Bina Desa (Bakti Sosial Menata Desa)

Tiga program diatas diorientasikan untuk semakin mendekatkan pemerintah Kabupaten Malang dengan masyarakat. Program Bina Desa (Bakti Sosial Menata Desa) menjadi salah satu program yang secara langsung berorientasi pada pelayanan public kepada masyarakat Sasaran dan dirasa menjadi program yang penting untuk pemeratakan pelayanan public ke tingkat desa yang selama ini kurang tersentuh oleh pemerintah daerah.

Latar belakang dari pelaksanaan Bina Desa adalah dengan melihat Karakteristik desa desa di kabupaten malang yang sangat beragam dengan jumlah 378 desa. Pimpinan daerah memiliki tantangan untuk mampu mendorong bagi percepatan pembangunan sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat desa sebagai basis wilayah di kabupaten malang. Dalam rangka merespon tantangan diatas maka dilaksanakanlah program Bina Desa. Dilaksanakannya program Bina Desa juga diorientasikan untuk melakukan Percepatan tercapainya visi kabupaten malang yakni mewujudkan masyarakat kabupaten malang yang MADEP MANTEP (Mandiri, Agamis, Demokratif, Produktif, Aman, Tertib dan Berdaya Saing).

Secara umum tujuan dari dilaksanakannya program Bina desa adalah dalam ranga melakukan percepatan eskalasi pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan membantu pengentasan kemiskinan di kabupaten malang. Bina desa merupakan sebuah kegiatan dimana bupati beserta seluruh pejabat pemerintah kabupaten malang melaksanakan p[elayanan dan berbagai kegiatan di desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat

Program Single ID (Kota Kediri)

Program SingleID merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Dinas Perijinan Kota Kediri. Secara ringkas program SingleID merupakan program yang menerapkan metode pengarsipan dokumen perizinan berdasarkan subyek/ pemohon dengan memberikan nomor unik di setiap identitas (ID).

Latar belakang diluncurkannya program ini adalah sebelumnya masyarakat ketika melakukan pengurusan perijinan usaha di kota Kediri selalu menyertakan berbagai persyaratan untuk setiap ijin usaha yang akan dibuat, seperti IMB, SIUPP maupun HO. Berbagai persyaratan untuk setiap ijin usaha dimungkinkan ada yang sama dengan permohonan ijin usaha yang pernah diajukan sebelumnya. Namun demikian dikarenakan belum adanya system dokumentasi yang baik maka setiap akan mengurus ijin usaha-ijin usaha yang lain, masyarakat harus selalu melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pada Maret 2011, Dinas perijinan kota Kediri meluncurkan program SingleID. Tujuan dari diluncurkannya program SingleID ini adalah untuk Efisiensi pengurusan perijinan dan efisiensi penyimpanan data. Secara prinsip program SingleID dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dinas perijinan membangun system pengarsipan secara digital dan terpusat. Sistem pengarsipan digitan dan terpusat ini dirancang untuk menggantikan system pengarsipan manual yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya yang dirasa sudah tidak efisien, tidak efektif dan menyulitkan penelusuran.

2. Pada system pengarsipan digital yang dirancang, proses pengarsipan didasarkan pada subyek (SIAPA YANG MENGAJUKAN IJIN), bukan lagi mengarsipkan dengan mendasarkan pada obyek (IJIN SIUPP, IJIN HO, IJIN IMB, DLL).
3. Subyek pencari ijin usaha diarsipkan dengan menggunakan singleID. Nama-nama berkas disusun berdasarkan identitas subyek sehingga di masing-masing data subyek sudah terdokumentasikan data-data yang sudah pernah dikirim ke dinas perijinan dan bisa dipergunakan kembali ketika akan mengurus ijin usaha yang lain
4. ID untuk subyek pencari ijin usaha dibagi menjadi dua, yakni ID perseorangan dan ID Badan Usaha. Contoh untuk ID sebagai individu: (Y1.13.0026). Contoh untuk ID sebagai Badan Usaha (T2.12.0054).
5. Dengan telah dilaksanakannya perekaman berkas secara digital, maka berkas-berkas yang telah diserahkan oleh subyek pencari ijin usaha sudah terdokumentasikan dan bisa dipergunakan kembali untuk pengurusan ijin usaha selanjutnya. Proses digitalisasi yang telah dirancang akan meminimkan berkas yang hilang.

Pelayanan KTP di Mall (Surabaya)

Sebagai kota metropolis yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kota Surabaya lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan pengurusan KTP di beberapa mall yang ada di Surabaya. Ini dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Dengan mayoritas penduduk yang bekerja pada siang hari, mengurus dokumen kependudukan seperti KTP bisa menjadi masalah tersendiri bagi warga yang bekerja. Mereka tidak ada waktu untuk mencari dokumen ini karena mereka harus bekerja di siang harinya.

Dengan adanya pelayanan KTP di mall ini, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk persoalan yang mereka hadapi. Mengapa di mall? Pilihan ini lebih familiar bagi masyarakat, terutama yang bekerja atau mereka bisa jalan-jalan di mall sambil mendapatkan dokumen kependudukan. Pelayanan ini dibuka di dua pusat perbelanjaan di Surabaya. Yaitu, Royal Plaza , PTC, dan ITC Mega Grosir. Disini, Dispenduk Capil Surabaya menempatkan dua orang pegawainya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam. Pelayanan juga buka pada hari Sabtu. Petugas yang bertanggung jawab di counter di mall ini dilakukan secara bergilir diantara pegawai Dispenduk Capil.

Pelayanan di counter di mall ini relative lebih cepat karena untuk mendapatkan KTP baru hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Dua pengunjung yang ketika itu sedang mengurus KTP mengaku, mereka datang ke outlet Dispenduk Capil di mall ini karena mereka disarankan datang ke tempat itu oleh Ketua RW mereka karena pengurusan lebih cepat.

PARTISIPASI PUBLIK

Peningkatan Kualitas Musrenbang, Pelaksanaan Broadband, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lokal (Kabupaten Banyuwangi)

Problem perencanaan pembangunan hampir sama dihadapi disetiap daerah, tak terkecuali Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

- Apriori masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang;
- Musrenbang hanya sebagai formalitas dan rutinitas tahunan;
- Masyarakat lebih tertarik mengikuti musyawarah PNPM Mandiri;
- Usulan kegiatan yang tidak berkualitas

Melihat problem itu, Bappeda Kab. Banyuwangi mencoba melakukan terobosan untuk merubah stigma Musrenbang tersebut dengan hal-hal yang lebih berkualitas, yaitu dengan menerapkan :

1. Pagu Indikatif Kecamatan, ini diterapkan untuk menghilangkan apriori masyarakat terhadap perhelatan Musrenbang, dimana secara garis besar ada kepastian alokasi pendanaan pembangunan disetiap kecamatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 ttg SPPN dan Permendagri 54 tahun 2010.

2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan, ini dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang dengan membangun sistem perencanaan pembangunan yang bisa diakses setiap saat, mudah memonitornya dengan nama Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD).

SIPKD dibangun sejak 2008 oleh Tim BPPT dan Bappeda, 2009 dilakukan uji coba ke beberapa SKPD sambil melakukan penyempurnaan, 2010 mulai diaplikasikan untuk seluruh SKPD guna menunjang Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten, dan pengembangan sistem hingga ke Kelurahan/Desa, 2011 diimplementasikan ke 217 desa/kelurahan dan semua SKPD guna menunjang Musrenbang Desa hingga Musrenbang Kabupaten, 2012 sistem ini telah sepenuhnya dipergunakan seluruh desa se-Kab. Banyuwangi dan seluruh SKPD untuk semua tahapan perencanaan pembangunan mulai tingkat desa sampai Kabupaten.

Pengembangan sistem ini dilakukan bersama lintas SKPD yaitu, Dishubkominfo untuk server dan menu serta format pada sistem, BPKAD (bidang Anggaran) dalam integrasi perencanaan dan penganggaran, BPMPD dalam pelaksanaan musrenbang integrasi di desa, SKPD Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai pengguna aplikasi dan terus memberi saran masukan untuk pengembangan.

Integrasi Musrenbangcam (PNPM Mandiri), ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi over laping antara pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan MAD (di PNPM Mandiri), mensinkronkan waktu pelaksanaan, mensinkronkan tujuan dan sasaran serta subyek perencanaan pembangunan.

e-Musrenbang (Kota Surabaya)

Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Surabaya, sejak 2009, Pemkot meluncurkan program e-musrenbang. Dengan sistem yang sudah dibangun di Bappeko dan terkoneksi dengan seluruh kelurahan, kecamatan, dan SKPD di Surabaya. E-musrenbang merupakan rangkaian dari *e-government* di Kota Surabaya. Ini adalah step pertama untuk pelaksanaan *e-gov* di Surabaya.

Dengan adanya *e-government* ini, hasil usulan rapat di Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan yang masuk ke dalam SKPD dapat diakses langsung oleh

warga. Dengan adanya e-musrenbang ini, hasil rapat yang dibahas di tingkat kelurahan langsung bisa di-unggah ke web yang disediakan di Bappeko. Kemudahan yang ditawarkan oleh e-musrenbang ini adalah ketika satu usulan pembangunan sulit untuk diwujudkan karena tidak sesuai dengan pagu atau prioritas, dia bisa diganti dengan cepat oleh usulan di bawahnya. Di *e-musrenbang* ini, warga bisa membuat beberapa prioritas kegiatan yang diajukan. Kegiatan mana yang disetujui atau disetorkan ke kecamatan/SKPD berdasarkan dengan prioritas yang paling penting.

Dengan *e-musrenbang* ini pula, warga bisa melakukan pengecekan rencana kegiatan apa yang akan dilakukan, sudah dijalankan, dan bagaimana evaluasinya, termasuk dengan biaya yang dihabiskan. Kegiatan ini bisa terwujud karena didukung oleh fasilitasi internet yang sudah sampai di kelurahan. Selain itu, penggantian program tidak perlu menunggu waktu yang lama karena kegiatan yang tidak sesuai dengan pagu atau prioritas bisa langsung diganti.

Biayai Usul Konkret Sesuai Duit (Banyuwangi)

Setelah dirintis sejak 2008, Bupati Azwar Anas terus menggerakkan sinergi inovasi kebijakan agar suara rakyat bisa berubah menjadi pembangunan berkualitas. Fokusnya, memperkuat efektivitas pagu indikatif dan integrasi musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Implementasi kebijakan pagu indikatif memang bukan satu-satunya di Jawa Timur.

Daerah di Jatim yang telah mengimplementasikan, antara lain, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten/Kota Probolinggo. Lewat pagu indikatif, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencoba untuk menghilangkan stigma bahwa musrenbang hanya basabasi. Caranya melalui kepastian alokasi pendanaan pembangunan di setiap kecamatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pagu indikatif kecamatan memastikan jumlah anggaran yang disediakan pemerintah dari usul yang disetujui dalam musrenbang desa/kelurahan.

Pada 2012 disediakan pagu Rp 100 miliar yang dibagi secara proporsional ke-24 kecamatan. Pertimbangannya dengan variabel, antara lain, jumlah penduduk miskin, indeks kesehatan, dan indeks pendidikan. Musrenbang tidak lagi menyusun rentetan daftar usul panjang, namun konkret dan realistis sesuai dengan duit yang disediakan pemerintah atau yang bisa diswadayakan.

Keunggulan Banyuwangi terletak pada caranya menyiasati luas wilayah. Kabupaten berwilayah terluas di Jatim (5.782 km²) ini membangun Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) pada musrenbang. Sistem ini meng-onlinekan usul desa/kelurahan dengan kecamatan dan dinas terkait di kabupaten. Karena itu, proses pembangunan pun terpantau secara integratif.

Pengelolaan Barang Daerah (Kab. Blitar)

Tanah Ketajek selama ini dikuasai oleh pemkab dan digunakan sebagai wilayah perkebunan dibawah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Klayangan. Komoditas yang dihasilkan adalah kopi dan karet. Berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jatim no 1/Agr/XI/122/HM/III tahun 1964 dan Peraturan Mendagri no 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, maka tanah Ketajek dibagikan kepada warga yang berhak. Tahun 2010 dilakukan penelusuran nama-nama ahli waris dengan pembentukan tim verifikasi berdasarkan SK Bupati no 188.45/403/012/2010. Verifikasi nama-nama masyarakat di wilayah tanah Ketajek dilanjutkan dengan membentuk tim verifikasi lanjutan berdasar SK Bupati no 188.45/217/012/2012. Dari 803 pengajuan nama ahli waris, telah diverifikasi 605 nama ahli waris. Selanjutnya nama-nama tersebut telah dilegalisasi melalui SK Bupati no 188.45/218/012/2012. Sedangkan sisa 198 nama belum terverifikasi akibat kekuranglengkapan data .

Tahun 2012 juga dilakukan diskusi dengan masyarakat yang menghasilkan tiga model pengajuan tidak langsung yaitu (1) kemitraan untuk pengolaannya; (2) hibah; (3) redistribusi per nama. Berdasarkan hasil diskusi dengan warga dan rekomendasi tim verifikasi maka mekanisme yang dipilih adalah hibah. Namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala karena Permendagri 153 tahun 2004 hanya mengatur pengelolaan barang daerah yang dipisahkan melalui mekanisme kerjasama, jualbeli serta tukar menukar; sedangkan mekanisme hibah tidak diatur dalam aturan tersebut.

Jika disetujui, pelaksanaan hibah dilakukan melalui Koperasi Ketajek Makmur yang dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak tanam dimana pemilihan tanaman ditentukan oleh PDP. Hal ini dilakukan agar warga tidak menanam tanaman yang bisa mengakibatkan longsor. Berikut adalah alur pelaksanaan hibah tanah ketajek dari PDP kepada koperasi Ketajek Makmur.

AKUNTABILITAS PUBLIK

Temuan BPKP Sempurnakan e-Government

Kota Roma tidak dibangun dalam waktu semalam. Begitu pula penerapan *e-government* di Kota Surabaya. Pada tahap awal, implementasi *e-government* di kota ini tidak pernah dirumuskan bagaimana konsep besarnya. Semuanya dikembangkan secara bertahap sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah kota.

Perjalanan panjang itu dimulai pada 2003, diawali dengan program lelang serentak (*e-procurement*) yang dimotori Bagian Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Saat itu, Kepala Bina Bangda dijabat oleh Tri Rismaharini. Kini, dengan posisi sebagai wali kota, Risma terus mengembangkan upaya mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang dulu telah dirintisnya.

Secara konseptual, penerapan *e-government* Kota Surabaya baru memiliki gambaran utuh pada 2008. Semuanya dibagi ke dalam empat kelompok besar. Yaitu, perencanaan pembangunan daerah, sistem manajemen pemerintahan, layanan masyarakat, dan komunikasi masyarakat.

Dalam konteks belanja untuk pembangunan daerah, kota ini memiliki enam produk unggulan. Yaitu, *e-budgeting*, *e-project planning*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling*, dan *e-performance*. Sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan yang mengintegrasikan aktivitas birokrasi mulai hulu sampai hilir ini diberi titel *Government Resources Management System* (GRMS).

Laporo Rek (Kota Probolinggo)

Radio Suara Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo membuat sebuah terobosan inovasi dalam hal mekanisme pengaduan masyarakat melalui program Laporo Rek sebagai sebuah bentuk usaha peningkatan partisipasi dan komunikasi publik. Pembuatan program inovatif penanganan aduan masyarakat melalui program Kilas Bestari dan Super News ini merupakan bentuk respon dari pihak radio dan pemerintah untuk memperkuat partisipasi dan komunikasi publik sebagaimana yang telah dicanangkan pada strategi pembangunan Kota Probolinggo. Program ini muncul karena masyarakat tidak mempunyai sarana atau wadah untuk mengutarakan keluhan, aduan, kritik dan saran mereka terhadap kinerja institusi pemerintahan dan lembaga pemberi layanan non pemerintah baik dalam kinerja institusi, pemberian pelayanan publik, dan kebijakan publik.

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi berbagai keluhan masyarakat, aspirasi, saran dan kritik yang konstruktif. Memberikan respon langsung kepada masyarakat dengan cara menindaklanjuti aduan masyarakat ke instansi terkait dengan meletakkan Radio Suara Kota Probolinggo sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi pemerintah melalui program Laporo Rek, Kilas Bestari dan Super News.

Program inovatif ini digagas oleh Rahim Arif ini didukung penuh oleh Wali Kota Probolinggo H. M. Buchori beserta DPRD. Gagasan ini bekerja dengan mekanisme yang terintegrasi dan simultan, yaitu mulai dari mekanisme pengaduan melalui program Laporo Rek hingga mekanisme penanganannya melalui program Kilas Bestari dan Super News. Gagasan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan cara koordinasi dengan

semua instansi ataupun lembaga pelayanan publik, diawali dengan mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Walikota agar semua instansi merespons laporan masyarakat.

Penjaringan Aspirasi Lewat Jember Ngopi, Bedah Potensi Desa, Jember Kita, Kamisan, dan Rembug Kampus (Jember)

Selama ini program-program yang dilakukan oleh pemda kurang mendapat respon dari masyarakat. Pemkab memiliki program-program pembangunan yang bisa diakses oleh warga. Keberadaannya perlu dikomunikasikan ke masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan masukan dari warga atas kinerja pemda. Jember Ngopi disiarkan tiap hari dari Pk. 08.00-09.00 WIB melalui Jember1TV. Narasumber untuk acara ini adalah para kepala SKPD secara bergantian. Di dalam acara ini, setiap SKPD memaparkan program-programnya dan bagaimana masyarakat bisa mengakses program-program tersebut

“Bedah Potensi Desa” dilakukan tiap dua bulan sekali oleh Bupati. Bupati dan seluruh jajaran SKPD melakukan kunjungan ke kecamatan. Desa-desa yang ada dalam satu kecamatan tersebut dapat berdialog langsung dengan bupati dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan.

Majalah “Jember Kita” yang merupakan majalah resmi pemerintah Kabupaten Jember yang terbit tiap bulan. Majalah ini disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya agar seluruh potensi kabupaten dapat diketahui oleh semua pihak yang pada akhirnya dapat menarik minat investor luar negeri. Untuk semakin menajamkan pada tujuan tersebut, majalah “Jember Kita” dikirimkan ke perwakilan-perwakilan asing, korporasi besar dan universitas.

Acara “kamisan” pk. 08.00-12.00 WIB di pendopo pemkab. Berbeda dengan “Bedah Potensi Desa” yang sifatnya lebih resmi dan structural, acara “kamisan” dikemas lebih informal dan isu-isu yang disampaikan warga ke bupati lebih banyak permasalahan pribadi dibanding permasalahan terkait pembangunan.

Acara “Rembug Kampus” dilakukan 6x dalam setahun. Acara ini ditujukan untuk menampung saran-saran akademisi untuk pembangunan Kabupaten Jember selanjutnya. Karena banyaknya kampus yang ada di Kabupaten jember, maka acara ini dilakukan dua bulan sekali dan tempatnya berpindah-pindah dari kampus satu ke kampus lainnya.

Nyab Bhe Dhesa (Kabupaten Situbondo)

Program Nyab Bhe Dhesa atau Kunjungan Kerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat dilakukan oleh Bupati beserta Dinas Teknis Kabupaten Situbondo sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap desa-desa yang berada di pelosok Kabupaten Situbondo. Hal ini dikarenakan, selama ini pembangunan serta perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih banyak terfokus di area sekitar Kota Situbondo. Selain itu, akses terhadap pelayanan dasar yang diberikan juga masih sulit dikarenakan sarana dan prasarana yang ada kurang memadai.

Tujuan diadakannya Nyab Bhe Dhesa adalah dalam rangka melihat sejauhmana perkembangan penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Desa dan untuk memberikan motivasi penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pelayan masyarakat. Program ini dimulai pada tahun 2011, namun baru resmi diprogramkan mulai tahun 2012.

Kegiatan Nyabbhe Dhesa dimulai tahun 2011, namun baru dibuat dalam bentuk program resmi dengan anggaran Tahun 2012. Format kegiatan adalah menyerap aspirasi masyarakat dan juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dilaksanakan tiap hari kamis sampai jum'at. Hari pertama diisi dengan acara dialog dan juga sosialisasi langsung kepada masyarakat, sedangkan hari kedua dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembuatan administrasi kependudukan, pemberian sembako gratis dan murah, pemberian hewan ternak kepada kelompok dan lain sebagainya.

Rencana pada tahun 2012 diadakan 17 (tujuh belas) kali kegiatan namun yang terealisasi 11 (sebelas). Hal ini dikarenakan banyak Kepala Dinas yang diwakilkan, waktu yang kurang karena menyesuaikan dengan agenda Bupati serta ada dugaan politik pencitraan dari Bupati. Hasil yang dicapai setelah adanya Program Nyab Bhe Dhesa adalah Bupati mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pembangunan secara fisik maupun pembangunan perekonomian lebih tepat sasaran. Selain itu, potensi-potensi yang ada di desa lebih bisa dimaksimalkan karena mendapat perhatian langsung dari Bupati.

Program Penyederhanaan Prosedur Kenaikan Pangkat PNS Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi (Kabupaten Sampang)

Salah satu aspek penting terkait dengan reformasi birokrasi adalah prosedur kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, periodisasi kenaikan pangkat dibagi 2 (dua) yaitu periode 1 April dan 1 Oktober. Kewenangan menetapkan kenaikan pangkat PNS dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kewenangan menetapkan kenaikan pangkat PNS untuk menjadi Pembina Utama Muda atau Golongan Ruang IV/c, Pembina Utama Madya atau Golongan Ruang IV/d dan Pembina Utama atau Golongan IV/e dilaksanakan oleh Presiden.
- b. Kewenangan menetapkan kenaikan pangkat PNS untuk menjadi Pembina atau Golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I atau Golongan ruang IV/b dilaksanakan oleh Gubernur.
- c. Kewenangan menetapkan kenaikan pangkat PNS untuk menjadi Juru Muda Tingkat I atau Golongan Ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I atau Golongan Ruang III/d dilaksanakan oleh Bupati.

Fokus utama dalam penyederhanaan ini adalah untuk kenaikan pangkat PNS untuk menjadi Juru Muda Tingkat I atau Golongan Ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I atau Golongan Ruang III/d yang dilaksanakan oleh Bupati. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001, secara umum prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala BKN yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Regional BKN. Ada beberapa kunci utama yang menyebabkan proses kenaikan pangkat bagi PNS lamban dan berbelit, diantaranya adalah prosedur, kewenangan bupati dan juga teknologi yang digunakan.

Pertama, prosedur yang ada tidak efektif dan efisien. Adanya keharusan BKD Kabupaten membuat Nota Usul kenaikan pangkat ke Kantor Regional II BKN ditafsirkan bahwa berkas usulan kenaikan pangkat harus diserahkan kepada Kantor

Regional II BKN di Surabaya. Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Regional II BKN yaitu penerbitan pertimbangan teknis pun diselesaikan secara bertahap (tidak langsung sesuai dengan jumlah berkas yang diserahkan) sehingga membutuhkan biaya perjalanan dinas, waktu serta tugas yang terbengkalai dikarenakan harus bolak-balik ke Surabaya.

Hal lainnya yang berpotensi menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas adalah bercampurnya berkas dari berbagai kabupaten se Jawa Timur yang seringkali adanya berkas yang hilang sehingga menimbulkan hasil berkas tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak lengkap (TL) yang harus diperbaiki oleh BKD Kabupaten dengan cara dikirim kembali.

Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan (Kabupaten Malang)

Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan Otonomi Daerah yang berlangsung bisa memberikan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Momentum pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Malang direspon oleh masyarakat dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Kebutuhan akan adanya pelayanan yang berkualitas sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat direspon oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan menyusun desain program yang diarahkan untuk melakukan perubahan system penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Perubahan system penyelenggaraan difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM dan mengubah paradigma dari dilayani menjadi melayani.

Dalam rangka melakukan perubahan system penyelenggaraan dan peningkatan SDM di Kabupaten Malang, salah satu hal yang didorong adalah mengoptimalkan peran Kecamatan. Menurut Pemerintah Kabupaten Malang, optimalnya peran kecamatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi langkah strategis dalam rangka menghadirkan system penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan yang berkualitas dan bertanggungjawab. Pada konteks inilah program Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan yang memberikan penilaian terhadap Kecamatan dalam konteks melakukan penilaian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan pada proses pelayanan.

Tujuan dari program Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan adalah:

- Menemukan inovasi baru yang dilakukan Camat dalam rangka mengakomodir semua kegiatan yang ada di kecamatan
- Menilai Camat dalam melaksanakan sinergitas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya
- Memotivasi Camat agar selalu meningkatkan kinerjanya

Program Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan dilaksanakan dengan mencari Kecamatan terbaik dalam bidang-bidang yang dinilai. Bagi Kecamatan yang menjadi juara pada bidang-bidang tersebut diberikan Panji-Panji dan bagi Kecamatan yang paling banyak memperoleh Panji-Panji akan diajukan sebagai Camat Berprestasi untuk mewakili Kabupaten Malang dalam penilaian di Tingkat Provinsi dan Nasional. Penyerahan panji-panji diberikan pada saat Hari Jadi Kabupaten Malang sebagai wujud apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Malang atas jerih payah Camat dalam

mengkoordinasikan perangkat-perangkatnya dalam melakukan kegiatan pelayanan di level kecamatan maupun dalam aktifitas mengkoordinasikan kerja-kerja pihak desa-desa di wilayah kecamatan mereka.

LINGKUNGAN HIDUP

IPAL Komunal untuk mewujudkan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Dinas Kesehatan Kota Blitar (Kota Blitar)

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka menjamin kesehatan warga kota Blitar, gambaran program ini dilaksanakan adalah agar sanitasi masyarakat menjadi terjamin dan sehat, dengan sanitasi yang terjamin diharapkan agar kualitas kesehatan masyarakat kota Blitar semakin tinggi, higienitas semakin terjaga serta kondisi lingkungan semakin asri dan bernuansa sehat.

Program IPAL komunal ini diimplementasikan melalui pembangunan Jamban pada 7 Kelurahan di Kota Blitar dengan sistem yang terintegratif dan higienis. Selain pada pembangunan fisik yakni dengan pendirian jamban tersebut yang bekerjasama dengan Dinas PU Kota Blitar, yang menjadi *core* dari program ini adalah penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat sekitar pembangunan jamban melalui sosialisasi di masing-masing RT oleh BAPEMAS terkait kesehatan dan masalah-masalah ekskresi (BAB) maupun masalah kesehatan yang lainnya, selain itu program ini ditunjang melalui penyadaran yang dilakukan dengan diberikan liflet dan buku-buku pedoman terkait kesehatan tersebut.

Guna mewujudkan 5 pilar STBM di Kota Blitar, yaitu: (1) Stop BAB di sembarang tempat. (2) cuci tangan pakai sabun. (3) permulaan air minum. (4) pengelolaan sampah pada DKP. (5) pengelolaan air limbah. Maka salah satu elemen penting dari pemenuhan 5 pilar STBM ini terkait dengan IPAL Komunal adalah dengan membangun secara fisik maupun secara sosialisasi dari BAPEMAS yang hingga saat ini tersebar di 7 kelurahan di kota Blitar.

Pohon Asuh untuk Ngawi Hijau (Kab. Ngawi)

Kegiatan Ngawi Hijau di Kabupaten Ngawi tertera pada Program REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN. Kegiatan : Penghijauan hutan masyarakat (Ngawi Hijau).

Perencanaan dibuat guna menentukan arah kegiatan pohon asuh untuk menuju Ngawi Hijau agar sesuai harapan dengan sasaran lokasi: halaman sekolah, halaman perkantoran, bahu jalan, lapangan, makam, dan sebagainya.

Adapun untuk 3 tahap pertama diprioritaskan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

1. Halaman perkantoran.
2. Halaman sekolah-sekolah baik SD, SLTP, SLTA Dan Perguruan Tinggi termasuk Pondok Pesantren.
3. Bahu-bahu jalan.
4. Lahan kosong milik warga baik tegalan dan pekarangan.
5. Lapangan.

Sedang untuk lokasi lain di teruskan pada kegiatan di tahun mendatang.

Perencanaan dibuat dengan menghitung kebutuhan bibit sesuai pentunjuk teknis serta usulan-usulan dari berbagai masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Kehutanaan dan Perkebunan memberikan sosialisasi kepada para Kepala Satuan Kerja, Camat dan membuat surat tentang kebutuhan bibit di wilayahnya. Baik jenis dan

jumlah untuk di usulkan ke Dinas Kehutanaan dan Perkebunan. Usulan tersebut selanjutnya direkap, diverifikasi sesuai agroklimat setempat.

IPAL Komunal (Kota Batu)

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu pada 2012 lalu telah membangun IPAL di Puskesmas Beji dan IPAL Komunal industri rumahan tahu tempe di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Limbah tahu dan tempe juga bisa diolah menghasilkan biogas yang kini sudah bisa dimanfaatkan pemilik industri kecil tersebut. Energi alternatif berupa biogas menjadi prioritas Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu untuk memanfaatkan potensi limbah peternakan dan industri kecil tahu tempe.

Limbah-limbah itu nantinya ditampung dalam instalasi pengelolaan air limbah (ipal) komunal. Dari Ipal komunal ini akan menghasilkan biogas, diharapkan bisa dimanfaatkan bagi warga yang berkeonomi rendah, dan mengurangi pencemaran. Karena memang pencemaran ada beberapa sumber, pertanian, industri, peternakan, pemukiman, dan hotel. Rata-rata pencemaran yang rawan potensi adalah yang dilakukan oleh masyarakat bertaraf ekonomi lemah.

Kinerja pengelolaan sungai dan saluran terbuka/salter (Kota Probolinggo)

Kota Probolinggo dialiri 6 sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancor. Berbagai kerusakan telah dicatat dan memberikan indikasi penurunan kualitas air sungai yang berdampak negatif pada kondisi kelestarian air, padahal peruntukannya dibutuhkan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan.dibutuhkan peran serta masyarakat yang intens dalam melakukan pemeliharaan kelestariannya.

BLH Kota Probolinggo memiliki inovasi pendidikan lingkungan sejak dini, dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Problinggo meluncurkan program pendidikan lingkungan keliling (dik ling ling) dan detektif kecil sungai (diksun).

Program Diklingling diwujudkan dalam bentuk mobil yang dimodifikasi menjadi sarana edukasi lingkungan yang informatif dan menarik. Dilengkapi dengan fasilitas mini teater dan buku-buku yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Setiap minggu mobil diklingling ini keliling kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya kelestarian lingkungan sejak dini.

Program yang lain yang masih berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah detektif kecil sungai (diksun). Murid-murid SD ditunjuk sebagai “detektif”/kader dan dibekali sebagai “detektif” sungai, dimana dengan membawa peralatan observasi dan survey sederhana, merek diterjunkan ke lingkungan sungai dan saluran terbuka disekitar sekolahnya untuk meneliti kualitas sungai.

Pasar Sejahtera (Revitalisasi Pasar Tradisional) (Kota Probolinggo)

Keberadaan pasar tradisional memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan banyak pedagang (kecil) bergantung pada mata pencarian di pasar tradisional. Sampah menjadi salah satu dampak yang dihasilkan oleh aktifitas pasar. Pasar adalah salah satu penghasil terbesar. Pengelolaan sampah yang belum maksimal dan kurangnya

kesadaran pedagang membuang sampah pada tempatnya dikebanyakan pasar tradisional menjadi salah satu penyebab kondisi pasar tradisional yang kurang layak dari segi kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan.

Untuk merubah stigma pasar tradisional tersebut diluncurkan Program Pasar Sejahtera (Sehat, Hijau, Bersih dan Terawat) yaitu program kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Yayasan Danamon Peduli yang dimulai sejak 2010. Program ini bertujuan mendukung upaya revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kesehatan lingkungan pasar tradisional dengan mengacu pada standar nasional sebagaimana ditetapkan dalam panduan Pasar Sehat. Berdasarkan pembelajaran dari program-program sebelumnya, upaya revitalisasi pasar bukan sekedar mengenai pembangunan dan perbaikan fisik saja tetapi bagaimana dukungan semua pihak baik itu pemerintah, partisipasi masyarakat dan peran aktif komunitas pasar dalam memelihara, merawat dan mengembangkan pasar-pasar tradisional yang dapat menjamin kesuksesan upaya pemerintah dalam merevitalisasi pasar tradisional.

Bank Sampah/Bank Sakera (Kab. Sampang)

Timbunan sampah yang berada di Kabupaten Sampang, utamanya di Kecamatan Kota Sampang semakin hari semakin banyak. Timbunan sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga maupun industri semakin tidak tertangani. Selain itu juga, pola pikir masyarakat yang masih menganggap sampah itu barang tidak berguna, kotor, sumber penyakit perlu untuk diubah dan juga dengan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Oleh karena itulah, Badan Lingkungan Hidup bersama dengan warga Ajigunung berinisiatif untuk membentuk Bank SAKERA (Sampah Kebanggaan Madura).

BLH sebagai wakil dari Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa bangunan fisik, peralatan pengolahan sampah dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Sementara masyarakat sebagai pengelola teknis dan penerima manfaat Bank SAKERA dituntut untuk berpartisipasi aktif. Tidak lupa juga sosialisasi-sosialisasi yang terus digencarkan oleh BLH bersama pengelola BANK SAKERA.

Masyarakat dapat menyerahkan sampah yang sudah dibagi oleh pengurus Bank Sakera dengan imbalan uang tunai yang dicatatkan dalam rekening tabungan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan.

Prokasih Plus Gerobak Mini untuk Sungai Kota (Kota Pasuruan)

Sungai Gembong merupakan sungai utama di tengah kota Pasuruan. Sungai ini berpangkal mulai dari percabangan Sungai Brantas yang masuk melalui Kelurahan Pohjentrek, lalu ke Kelurahan Purutrejo (dimana terdapat RSUD Dr Soedarsono), kemudian masuk ke kelurahan Petamanan, membelah kelurahan Kandang sapi dan kelurahan Bangilan (kedua kelurahan ini terletak di Kecamatan Panggungrejo), berlanjut ke kelurahan Mandaranrejo (Kecamatan Panggungrejo) dan langsung ke laut. Kelurahan Mandaranrejo sudah merupakan kawasan pesisir, di mana terdapat beberapa tambak garam, namun seringkali mengering. Penduduk di sepanjang aliran sungai Gembong berlatarbelakang profesi beragam, mulai dari para pedagang barang kelontong atau tukang becak. Duapuluh tahun silam, mereka masih bisa menggunakan air sungai

untuk kebutuhan mencuci pakaian, mandi, bahkan buang hajat. Namun kini, kondisi sungai mengalami pendangkalan di beberapa ruas, diantaranya di kawasan Kelurahan Kandang sapi dan Kelurahan Petamanan, akibat dari kotoran yang sering di buang begitu saja ke sungai tersebut.

Awal tahun 2013, Pemkot Pasuruan mulai lebih gencar lagi melakukan upaya normalisasi sungai Gembong. Proyek normalisasi ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan pemkot melalui Dinas PU Bidang Pengairan. Normalisasi dikerjakan pada sepuluh titik sungai kecil di luar sungai lintas yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Ke-10 titik yang dipantau untuk normalisasi ini meliputi aliran sungai di jalan Pati Unus, Jalan Gatot Subroto, kemudian Sungai Ketepeng, Calung, sungai di Kelurahan Gentong dan samping timur Kantor Dishub Kominfo Jalan A. Yani. Lokasi-lokasi normalisasi itu sering terjadi luapan banjir. Selain dikerjakan oleh pihak Dinas PU, pihak lain yang ikut memantau kualitas air sungai Gembong adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Pasuruan.

Melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pihak BLH kemudian juga menggelar program kali bersih (prokasih) yang ditindaklanjuti dengan penyediaan gerobak sampah yang didesain lebih ramping sehingga bisa masuk ke gang-gang kecil dimana gerobak sampah biasa ukuran standar tidak mampu menjangkau warga penduduk bantaran sungai Gembong.

Program Hutan Lestari (Kabupaten Jombang)

Program Hutan Lestari dilatarbelakangi oleh adanya urgensi terhadap perlindungan lingkungan Hidup. Pada tataran global, ada komitmen global dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen global dalam pembangunan berkelanjutan juga menjadi komitmen pemerintah Indonesia dan dinas kehutanan di Kabupaten Jombang ingin berpartisipasi secara aktif dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Respon yang dilakukan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Jombang terkait dengan komitmen pembangunan berkelanjutan adalah menjalankan program konservasi yang memfokuskan sasaran pada penanaman tanaman Jati dan Sengon di wilayah Kabupaten Jombang.

Konservasi tanaman Jati dan Sengon tidak hanya dalam rangka menjadikan daerah Jombang semakin asri dengan hadirnya tanaman-tanaman produktif, namun demikian dalam rangka menjadikan aktifitas konservasi juga memiliki nilai ekonomi bagi pelaku. Dinas Kehutanan Kabupaten Jombang memiliki prinsip bahwa konservasi perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi. Dalam konteks itulah, program konservasi tanaman Jati dan Sengon juga ditujukan untuk mendorong dihasilkannya produk hutan yang bisa dijadikan bahan ekspor ramah lingkungan karena menerapkan prinsip-prinsip *eco label*.

Untuk itulah pemerintah Kabupaten Jombang memfasilitasi perolahan sertifikasi layak ekspor bagi produk-produk kehutanan di Kabupaten Jombang. Dengan adanya sertifikasi layak ekspor untuk produk kehutanan Kabupaten Jombang maka masyarakat bisa didorong untuk melakukan konservasi tanaman jati dan sengon dan hanya menebang ketika sudah layak dan memenuhi tuntutan yang disyaratkan dalam sertifikasi

layak ekspor. Tujuan dari program Hutan Lestari yang dilaksanakan oleh Kabupaten Jombang adalah mengintegrasikan pelestarian lingkungan hidup dengan “keuntungan” ekonomi

Program Karamba Ikan (Kota Kediri)

Program Karamba Ikan dilaksanakan di daerah pinggir sungai Brantas yang melewati Kota Kediri. Program Karamba Ikan merupakan program yang dirancang khusus untuk memberikan alternative bagi keluarga mantan penambang pasir sungai Brantas dalam mencari pendapatan melalui aktifitas ekonomi yang menopang bagi kelangsungan ekonomi keluarga mantan penambang pasir Sungai Brantas.

Program karamba Ikan secara umum ditujukan untuk memberikan alternative usaha bagi keluarga mantan penambang pasir di sungai Brantas. Program karamba Ikan dilatarbelakangi oleh adanya larangan aktifitas penambangan pasir di sungai Brantas. Pelarangan aktifitas penambangan pasir di Sungai Brantas ditujukan agar tidak terjadi eksploitasi pada sungai Brantas dan untuk menjaga sungai Brantas. Adanya pelarangan penambangan pasir di Sungai Brantas menyebabkan warga-warga di sekitar sungai Brantas yang sebelumnya menumpukan diri pada aktifitas penambangan / penggalian pasir kehilangan mata pencahariannya.

Dalam rangka memberikan alternative usaha bagi keluarga mantan penggali pasir, pemerintah kota Kediri selanjutnya menyusun program Karamba Ikan sebagai salah satu solusi alternative bagi alih aktifitas keluarga mantan penambang pasir. Program karamba ikan dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Koran Radar serta Perusahaan Gudang Garam. Program Karamba Ikan selanjutnya menjadi program kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan media massa untuk membantu keluarga mantan penggali pasir mendapatkan keuntungan ekonomi. Program karamba ikan ini juga diharapkan akan meminimalisir potensi terjadinya penggalian pasir secara illegal oleh para mantan penggali pasir karena telah mendapatkan alternative aktifitas ekonomi.

Kampung Berseri (Keramba Ikan Kali Temi dan Bank Sampah) (Kab. Lumajang)

Kondisi Sungai Temi di daerah kelurahan Ditontrunan banyak ditumbuhi oleh rumpun bambu liar (Barongan) yang membentuk stigma angker bagi masyarakat. Di sisi karena masyarakat sekitar enggan merawat , banyak warga lain yang akhirnya membuang sampah dispanjang bantaran kali temi tersebut. Sementara itu aliran sungai yang cukup deras sebenarnya menyimpan potensi untuk di kembangkan oleh masyarakat sekitar.

Sejak Pak Hariadi Eko Romadhon, yang karab di panggil Pak Eko ini terpilih mejadi ketua RW, kesadaran masyarakat RW llima terus-menerus meningkat. Sebagai aktivis yang telah mengenyam banyak pengalaman di bidang pengorganisasian masyarakat, Pak eko pun memiliki kepekaan sosial dan rasa kepedulian yang tinggi. Oleh karenanya Pak eko yang merasa besar dan tumbuh di daerah Ditontrunan maka dia mendedikasikan ilmu dan semangatnya untuk mengajak masyarakat RW 5 bangkit.

Kerja bakti dan berinteraksi dengan warga adalah cara yang dipakai oleh Pak Eko untuk mendapatkan hati warga guna mau untuk diajak berubah dan menlestarikan alam sekitarnya.

Pada gilirannya warga yang telah tergugah dapat digerakkan secara massiv untuk pertama kalinya membersihkan barongan di bantaran kali temi, menurut Pak Eko karena Barongan itulah potensi yang ada di aliran kali temi tak dapat terekplorasi. Setelah berhasil menggerakkan warga untuk mebersihkan kali temi, maka Pak eko berinisiatif menggerakkan warga untuk membangun keramba ikan guna memmaksimalkan lairan air sungai kali temi sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah warga kembali membuang sampah dan buang hajat di bantaran kali temi.

Pemanfaatan Aliran Sungai Untuk Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Lumajang)

Salah satu daerah yang memiliki potenski sumber air yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik di daerah Kab.Lumajang adalah kawasan lereng gunung semekru yaitu di Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kab.Lumajang. Kemiringan dan debit air di daerah tersebut ideal untuk digunakan sebagai pembangkit listrik meskipun dalam sekal kecil (mikro). Hal itulah yang mendorong kreatifitas masyarakat dengan dipimpin oleh Sucipto yang sekarang menjadi ketua pengelola PLTMH Gunung Sawur mencoba untuk merancang perangkat dan konstruksi untuk dapat memanfaatkan aliran air dari sungai poncosumo sebagai tenaga listrik.

Kondisi topografi dan jarak yang cukup jauh menyulitkkan penyaluran listrik PLN ke lingk Gunung Sawur dusun Kajar Kuning-Desa Sumber Wuluh-Kec.Candipuro sehingga 110 rumah/KK yang disana masih belum dapat teraliri Listrik. Di lingk Gunung Sawur-dusun kjar kuning-desa sumber wuluh-kec.candipuro terdapat kelompok/lembaga masyarakat PLTMH. kelompok in imerupakan salah satu kelompok yang berkembang dengan baik. Kemandirian dari kelompok ini menarik perhatian dari pemkab Lumajang.

Kemudian proses pembinaan intens sekaligus fasilitasi dilakukan oleh pemkab lumajang dengan wujud pengembangan kelembagaan kelompok dan pengembangan usaha ekonomi produktif (manufakturing). Ide awal pendirian PLTMH ini adalah mencukupi kebutuhan listrik murah bagi masayarakat di lingkungan tersebut. Kegiatan dimulai sejak 1985 dengan modal swadaya dari bapak Sucipto. Sampai saat ini Gunung Sawur telah mampu melayani 87 KK. Secara ekonomi listrik dari PLTMH lebih murah daripada tarif yang dikenakan PLN yaitu sebesar Rp 300 Per KWH. Untuk pemakaian per bulan rata-rata masyarakat membayar Rp 7.000 – Rp 15.000.

Peningkatan Integritas (Keterpaduan dan Harmoni) Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (Kab. Bondowoso)

Bondowoso sebagai Kabupaten dengan kondisi geografis yang mayoritas wilayahnya terletak pada dataran tinggi memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup besar. Pada sisi yang berbeda, kondisi geografis ini juga menjadikan Bondowoso sangat kaya sumber mata air. Namun sejalan dengan perkembangan zaman telah kerap terjadi penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang tentunya hal tersebut berakibat pada tanah longsor di sekitar titik mata air. Mata air yang belum sempat terkonservasi harus hilang tertimbun longsor atau bahkan mengering sebelum sempat dimanfaatkan. Tercatat jumlah mata air yang semakin menurun (dari 136 menjadi 115 dalam 10 tahun

terakhir). Ditambah lagi oleh kondisi lingkungan di sekitar sumber mata air yang belum terjaga kebersihan dan kelestariannya.

Letak geografis Bondowoso yang berada di dataran tinggi menjadikan Bondowoso memiliki peranan penting dalam hal pasokan aliran air ke daerah lain yang lebih rendah di sekitarnya termasuk diantaranya Kab.Situbondo. Kondisi inilah kirannya yang menjadi landasan sekaligus dorongan kuat bagi dinas lingkungan hidup Kab.Bondowoso yang bersinergi dengan dinas pengairan dan dinas kehutanan dan perkebunan untuk menjalankan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Tak lain program ini bertujuan untuk melestarikan mata air dan daerah resapan disekitar mata air. Selain daripada itu program ini memiliki target capaian yakni menyediakan sarana bagi masyarakat sekitar mata air untuk turut memanfaatkan dan menjaga kelestariannya

Penguatan tanggul sungai, Reboisasi, Peremajaan Mata Air, Biogas (Kab. Kediri)

Kabupaten Kediri dengan luas daratan mencapai 1.386,05 km² memiliki topografi wilayah yang beragam dengan rata-rata ketinggian 0-500 dpl yang dilalui aliran Sungai Brantas yang membelah dari Selatan ke Utara. Wilayah bagian Utara-Selatan merupakan dataran rendah. Kecenderungan kondisi topografi bergelombang dan berbukit berada di bagian Barat dan Timur. Secara umum permasalahan lingkungan di Kabupaten Kediri ada empat hal yaitu: (1) Kabupaten Kediri merupakan wilayah aliran lava Gunung Kelud yang masih aktif; (2) alih fungsi lahan yang masih cukup tinggi; (3) perkembangan industri manufaktur dan pariwisata menyumbang pencemaran dan sampah; (4) pengolahan limbah ternak.

Bank Sampah Sri Pekung (Nganjuk)

Sistem pengelolaan sampah dengan bank sampah adalah salah satu sistem baru dalam mengelola sampah yang berkembang. Sejalan dengan permasalahan sampah merupakan permasalahan yang kompleks yang hampir dihadapi oleh seluruh daerah. Tak terkecuali Kabupaten Nganjuk. Seiring dengan kemajuan daerah, permasalahan sampah dingajuk mendapatkan titik terang melalui pengelolaan Bank Sampah yang dimotori oleh masyarakat di Kelurahan Mangundikaran. Upaya ini akhirnya mendapatkan dorongan dari dinas Lingkungan Hidup Kab.Nganjuk untuk mengembangkan Program bank sampah tersebut.

Proses sosialisasi kepada masyarakat Kel. Magundikaran oleh Ibu Lurah (bu Sri) yang sekaligus kabid di Dinas LH Kabupaten Nganjuk. Sejak terbit PP nomor 81 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Pemkab nganjuk mencanangkan pilot project pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kel Mangundikaran. Setelah masyarakat dapat terkondisikan barulah dimulai proses Pembentukan bank sampah Sri Pekung yang tahapannya sebagaimana berikut:

- Penyusunan kepengurusan Bank Sampah Sri Pekung
- Pengelolaan keuangan Bank Sampah Sri Pekung.
- Penyediaan sarana dan prasarana (alat angkut berupa mini Pikcup)
- Pendampingan dalam pengelolaan bank sampah
- Menerima dan memilah sampah organik dan anorganik

Program ini masih terhitung sangat baru khususnya di Kab. Nganjuk pada khususnya di Kelurahan Mangundikaran yang menjadi pilot project dari Bank Sampah di Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya program ini belum dapat berjalan secara maksimal, faktor utama yang dikatakan sebagai hambatannya adalah belum semua warga masyarakat Kelurahan Mangundikaran memahami pentingnya pengelolaan sampah. Di lain sisi dinas Lingkungan Hidup sendiri masih terkendala dengan SDM yang kompeten dan mampu fokus menangani permasalahan ini.

Pengelolaan sampah di TPA menjadi Solar, Bensin, dan Gas Metan (Bojonegoro)

Terdorong dari terbitnya UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan menginisiasi program pengelolaan sampah terpadu di TPA Banjarsari Kecamatan Trucuk. Pada akhir 2012 DKP memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah di TPA untuk diolah menjadi gas metan, bensin dan solar. Ide ini muncul dari pelatihan yang diterima oleh DKP terkait dengan pengelolaan sampah (TPA). Tumpukan sampah yang menggunung di TPA dikelola menggunakan metode sanitary landfill sehingga tak ada lagi aroma busuk dari TPA. Setelah *Sanitary landfill* diterapkan, kemudian pemasangan untuk saluran gas metan yang dihasilkan oleh TPA. Sampah plastik di pilah untuk diolah dengan mesin pengolah untuk menjadi solar dan bensin. Uji coba hasil pengolahan sampah menjadi solar langsung pada operasional truk sampah.

Pada TPA tersebut juga dikembangkan mesin komposter yang telah mampu memproduksi pupuk organik yang memiliki pasaran sampai di luar Kab. Bojonegoro seperti Ngawi.

Dalam pemilahan sampah plastik yang nantinya akan diolah menjadi bensin dan solar harus di pisahkan menurut jenisnya terlebih dahulu. Jenis sampah plastik yang paling bermutu untuk pengolahan menjadi bensin dan solar adalah sampah plastik dari botol kemasan air minum mineral. Proses pemilahan dibantu oleh para pemulung yang sehari-hari bermata pencaharia di sekitar TPA, kemudian di potong-potong kecil untuk memaksimalkan proses pengolahan. Pemulung yang menyeetor sampah plastik yang telah terpisahkan dan telah dipotong kecil-kecil mendapat keuntungan lebih dari TPA karena harganya akan lebih mahal. Selain itu program ini direncanakan akan disenergikan untuk memaksimalkan kinerjanya dengan Bank sampah.

Transplantasi Trumbu Karang di Kecamatan Kepulauan (Sumenep)

Program Transplantasi Trumbu Karang ini merupakan program yang diusung guna menyelamatkan habitat trumbu karang. Dengan kata lain program ini adalah upaya untuk menumbuhkembangkan trumbu karang dengan menggunakan instrument transplantasi yang berupa substrat yaitu bahan campuran beton yang diambung dengan pipa paralon yang mana berfungsi sebagai pingkat sekaligus pijakan bagi pertumbuhan trumbu karang.

Sumenep sebagai kabupaten yang memiliki banyak kepulauan, tentunya sangat erat dengan ragam kehidupan bahari. Tak terkecuali trumbu karang. Melihat semakin maraknya penggunaan bom ikan dalam upaya nelayan dalam mencari ikan di laut, yang secara langsung hal ini menyebabkan rusaknya terumbu karang, ditambah lagi pembalakan liar terhadap terumbu karang semakin mengancam ekosistem trumbu

karang di kepulauan-kepulauan sumenep. Dinas LH menyadari peran strategisnya dan pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan perannya dengan tak melupakan melibatkan partisipasi masyarakat kendati masih terkendala teknologi yang harus memadai dalam proses monitoring.

Mengubah Audit Jadi Kultur Kompetisi

Menerapkan prinsip tiada kemajuan tanpa kompetisi, Kota Soto ini telah berhasil memotivasi warganya untuk melakukan banyak hal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasarannya mulai dari anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), hingga ibu-ibu rumah tangga di berbagai pelosok desa.

Konsep besar yang diusung daerah ini diberi payung bertitel *Empowerment Award*. Ada tiga komponen yang berada dalam program ini, yaitu HIPPA Award, Kudamas Award, serta Lamongan Green and Clean (LGC) Award.

Dari tiga program di atas, HIPPA Award dan LGC Award berkaitan erat dengan indikator pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus monitoring JPIP. Sedangkan Kudamas Award lebih banyak beririsan dengan indikator pemberdayaan ekonomi lokal karena terfokus pada pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Empowerment Award telah mengubah pendekatan audit menjadi kultur kompetisi dan apresiasi. Dengan kata lain, kelompok-kelompok masyarakat yang menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) didorong untuk memanfaatkan dana yang diterima agar menghasilkan keluaran yang optimal.

Hasilnya, dana stimulan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat ternyata malah berkembang. Pasalnya, berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan dana yang diterima untuk mencapai hasil maksimal. Meski nominalnya tidak terlalu besar, masyarakat senang karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dan memiliki kebanggaan tersendiri.

Pengelolaan Mangrove di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya): Antara Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Surabaya)

Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) meliputi empat kecamatan di Surabaya Timur: Sukulilo, Manyarejo, Rungkut, dan Gunungayar. Di dalam Perda Nomor 3/2003 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), keempat kawasan ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi.

Potensi hutan mangrove mencapai 871 Ha, tetapi yang masih 51 Ha. Dengan luasan ini, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk konservasi bakau sekaligus pemberdayaan anggota masyarakat di lokasi ini. Kawasan hutan mangrove Wonorejo ini berada di dekat Bosem Wonorejo.

- a. *Rehabilitasi Bakau*
- b. *Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pembentukan Kelompok Masyarakat*
- c. *Pelibatan Anggota Masyarakat*

Jumlah total hutan mangrove di Surabaya 605,71 HA. Luasan ini terbagi antara kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Adapun di PAMURBAYA luasan

mencapai 471.74 HA.

SANITASI

Blusukan, Bupati Genjot Promosi STBM

Jauh dari ibukota provinsi tidak membuat kabupaten di tapal batas Jawa Timur ini abai terhadap perbaikan sanitasi. Justru sebaliknya, daerah yang dipimpin Bupati Indartato ini menjadikan sektor sanitasi sebagai tantangan tersendiri.

Bupati yang punya hobi *blusukan* ini menuturkan, upaya membangun sanitasi di daerah miskin seperti Kabupaten Pacitan tidaklah mudah. Sebab, tantangan yang dihadapi bersifat ganda. “Kami harus mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus membantu sebagian warga yang punya keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, Pak In –panggilan akrab Bupati Indartato-- berusaha mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mengatasi problem yang dihadapi daerah. Khususnya problem sanitasi. Tidak heran jika pria yang mengawali karier dari bawah ini kemudian memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempromosikan pentingnya sanitasi yang sehat.

Salah satu momentum yang selalu dimanfaatkan untuk promosi sanitasi adalah kegiatan Tilik Warga. Momen *blusukan* yang digelar setiap bulan ini hampir selalu digunakannya untuk menantang para kepala desa mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang bebas dari kegiatan buang air besar sembarangan alias *open defecation free* (ODF).

Sebagaimana diketahui, indikator stop buang air sembarangan alias ODF merupakan satu dari lima pilar penting STBM yang telah dicanangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008. Empat pilar lainnya adalah cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten Blitar)

Selain Harga Pas dan Anak Tok cer, Kabupaten Banyuwangi sukses mendorong lima desa menjadi open defecation free (ODF) atau desa bebas BAB sembarangan. Kelima desa tersebut adalah Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro; Desa Wonosobo, Kecamatan Bangorejo; dan Rejoagung, Kecamatan Srono; serta Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo. Keberhasilan ODF, dikarenakan program ini dijalankan melalui penyadaran kepada masyarakat. Masyarakat diberikan informasi dan terus di gugah untuk membuat WC di tiap rumah. Program ini memunculkan kemandirian masyarakat mewujudkan sanitasi mandiri. Melalui program ini, masyarakat dipicu agar sadar, sehingga timbul rasa malu kepada masyarakat untuk BAB sembarangan tempat. Program ini akan dikembangkan lebih luas.

Mensukseskan STBM dengan enterpreneuership (Kota Probolinggo)

Berkutat dengan STBM bukan tanpa peluang income. Justru income besar bisa didapat dari sektor ini. Peluang usaha ini masih sangat terbuka, karena belum banyak pelaku usaha yang berkonsentrasi disektor ini. Meskipun memiliki peluang bisnis yang besar, bukan tanpa kendala dalam menjalankannya. Yang paling umum dihadapi adalah kendala merubah perilaku masyarakat untuk bisa memiliki jamban sendiri dan kendala pembiayaan pembangunan jamban sendiri yang dirasa sangat berat dan membebani.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo berupaya untuk menjalankan STBM dengan menjadikannya sebagai peluang usaha. Harapannya bisa mendorong masyarakat Kota Probolinggo menjadi sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan dan menjadikan seluruh wilayah Kota Probolinggo menjadi wilayah bebas ODF.

Berbagai strategi dijalankan dengan melakukan pelatihan STBM, pemicuan STBM,FGD-FGD, Studi Banding, Pembangunan Jamban, Koperasi Sanitasi Mandiri, Wirausaha Sanitasi, dan kerjasama teknologi sanitasi bersama dengan perguruan tinggi dilakukan. Memang belum tampak masif hasilnya, karena memang program STBM ini baru berjalan kurang lebih 2 tahun.

Dengan melakukan intervensi ke daerah yang dianggap sulit di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, dilakukan perubahan perilaku ODF, lambat laun telah bisa merubah perilaku ODF masyarakat sekitar, bahkan kebutuhan untuk pembangunan jamban di tiap rumah sudah mulai banyak dan belum bisa terlayani semua. Dengan memakai sistem kredit lunak tanpa bunga, dicicil tiap minggu dan memakai sistem menabung, kepemilikan jamban rumah yang sesuai standar sanitasi bisa didapat oleh warga.

MCK ++ (Kabupaten Pasuruan)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mutiara Laut dari Desa Mlaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, merupakan KSM yang sangat prihatin terhadap perilaku Buang Air Besar (BAB) sebagian besar warga masyarakat setempat. Akibat dari BAB sembarangan, maka timbul berbagai dampak lingkungan, seperti tinja yang bertebaran di sejumlah lokasi, sampah berserakan di mana-mana, dan keseharian warga masyarakat yang jauh dari kebersihan apalagi mengindahkan sanitasi yang baik.

Melihat situasi itu, KSM yang dibentuk pada 2011 kemudian berupaya mencari solusi melalui pembuatan sebuah bangunan di pesisir pantai menghadap ke laut. Isi bangunan itu adalah sistem Mandi Cuci Kakus (MCK) yang didesain meliputi komponen toilet di bagian atas, yakni tiga kamar mandi, empat WC dan satu tempat cuci. Sedangkan di bawah dari bangunan MCK ini, terdapat komponen pemipaan untuk bak kontrol dan pemipaan di bawah MCK, lalu ada bak peluapan, bak sedimentasi, baffle reactor dan anaerobic filter.

Dibutuhkan total biaya Rp 324.860.000 untuk mewujudkan bangunan MCK++ di desa Mlaten. Dana tersebut berasal dari tiga pihak, yakni DAK Pemerintah Pusat untuk Sanitasi 2011, Dinas PU Pemkab Pasuruan dan masyarakat. Dusun yang dihuni oleh 300 jiwa itu kemudian mulai melakukan rapat rutin mematangkan rencana pembangunan, dan langkah awal adalah pembentukan badan hukum KSM Mutiara Laut melalui SK Kepala Desa Mlaten Nomor 141/01/424.221.2.11/2011, dengan H Abdul Majid, warga setempat, didaulat sebagai ketua. Rapat rutin pun digelar di rumah warga sejak bulan April 2011.

Paket Jamban Murah (Jombang)

Kabupaten Jombang telah lama melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program STBM di kabupaten Jombang dirasa telah berhasil menjadikan masyarakat sadar dan peduli dalam hal pentingnya sanitasi. Pada tahun

2010 program STBM di kabupaten Jombang juga telah mendapat apresiasi dari JPIP pada program OA tahun 2010.

Program STBM yang telah diluncurkan di kabupaten Jombang melalui program pemicuan telah sukses dalam membangun *demand*/ kebutuhan terhadap urgensi meningkatkan kesehatan dan sanitasi di tingkat masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan selanjutnya melanjutkan program STBM dengan melaksanakan program dari sisi *Supply* yakni menyediakan infrastruktur sarana sanitasi yang murah, mudah, dan terjangkau oleh masyarakat. Program penyediaan sisi *supply* ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sanitasi di masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi yang terjangkau murah dan memenuhi aspek kesehatan

Secara ringkas Program yang dikembangkan oleh dinas Kesehatan adalah mengembangkan program *Supply*, yakni menyediakan sarana bagi pembuatan jamban yang murah. Pengembangan program ini didasari dengan kenyataan di lapangan dimana masyarakat sudah memahami arti penting sanitasi dan mau untuk merubah dari BAB sembarangan ke BAB pada tempat yang ditentukan. Namun demikian terdapat kendala, yakni ketiadaan sarana Jamban sehat yang murah atau masyarakat belum memiliki dana untuk pembuatan jamban sehat.

Dinas Kesehatan melakukan empat aktifitas, pertama menguatkan komitmen di masyarakat untuk melakukan iuran secara berkala, dalam rangka mengumpulkan dana bagi pembuata jamban sehat. Aktifitas kedua mendorong munculnya *entrepreneur* lokal yang bisa menyediakan jamban sehat yang murah. Aktifitas ketiga adalah mencari toko bangunan yang bersedia untuk memfasilitasi terlebih dahulu dalam penyediaan bahan bagi pembuatan jamban sehat dan murah. Aktifitas keempat adalah melakukan pelatihan fasilitator.

**TEMUAN GOOD PRACTICES OTONOMI
(KALIMANTAN BARAT)
MONITORING DAN EVALUASI OA 2013
PONTIANAK POST INSTITUTE OF PRO-OTONOMI**

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Aksesibilitas Daerah Terpencil dan Kepulauan (Kabupaten Kayong Utara)

Masih minimnya sarana transportasi laut baik untuk keperluan mobilisasi barang maupun mobilisasi orang. Karakteristik wilayah kepulauan cenderung sulit untuk di akses, karena dipengaruhi faktor jarak dan faktor cuaca. Wilayah kepulauan memiliki sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat kepulauan, namun tidak dapat dioptimalkan karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi laut.

Melalui program ini, *Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Kayong Utara berhasil membuka daerah terisolasi* sebanyak 167 Dusun pada 43 Desa yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara. Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, yaitu berupa Pengadaan Kapal (**KM. Karimata**). Tujuannya untuk membuka keterisolasian wilayah Masyarakat Desa Padang, Pelapis dan Betok Jaya yang ada di Kecamatan Pulau Karimata dan Pulau Maya Kayong Utara.

Selama ini masyarakat di dua kecamatan itu sangat sulit untuk berpergian ke Sukadana. Sebab tidak ada transportasi yang rutin melayani arus penumpang dan barang. Dengan di bukanya jalur transportasi melalui KM Karimata, harapan utama tentu meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa yang diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat kepulauan. Selain itu tentunya mempermudah mobilisasi orang maupun barang.

Pendampingan Peningkatan Produksi Amplang (Kab. Ketapang)

Kerupuk Amplang adalah makanan ringan yang merupakan hasil karya dari sebuah industri kecil rumah tangga (home industry) masyarakat Ketapang. Ina (30 th), salah satu pengusaha di bidang pembuatan kerupuk amplang Sari Belida yang berada di Desa Kauman Kecamatan Benua Kayong Ketapang ini mengatakan, keuntungan dari hasil usaha ini cukup lumayan dan harga jualnya bervariasi mulai dari Rp. 2.500/bungkus ada juga yang Rp. 25.000/bungkus dan harga juga bisa tergantung pesanan.

Selanjutnya ibu Sriyati menambahkan Kerupuk Amplang memang banyak diminati masyarakat baik masyarakat Ketapang sendiri maupun masyarakat luar. "Setiap orang yang datang berkunjung ke Ketapang sudah pasti akan mencari amplang untuk oleh-oleh sanak family, kerabat, teman dan rekan kerjanya," katanya. Karena banyaknya permintaan dan tingginya minat terhadap amplang, oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Perdagangan dan Industri-nya, sebanyak 15-20 pengusaha amplang di berikan perhatian khusus.

Mulai dari penyuluhan tentang heginitas produk, peningkatan produksi, sampai marketing. Tak hanya itu, Pemkab. Ketapang juga menjadi penjamin bagi pengusaha amplang yang membutuhkan dana kredit dari bank untuk memperluas usahanya. Selain itu, pengusaha amplang diberikan perhatian khusus dengan cara menambahkan peralatan produksi. Sepertinya misalnya, mesin pengolahan daging ikan yang awalnya manual dan tradisional, kini sudah di tingkatkan yang modern dengan menggunakan tenaga listrik.

Pasar Malam Sepakat (Kab. Ketapang)

Ketapang di waktu malam sangat hidup. Malah, pasar rakyat di kawasan lapangan Sepakat, menjadi pasar malam yang luar biasa ramainya. Meja dan kursi bersusun padat. Jumlahnya, tak dapat saya menghitung. Dulu kawasan ini, sebelum di sulap Pemkab Ketapang menjadi pasar malam, terkenal tidak aman. Sebab banyak anak-anak muda yang nongkrong sambil mabuk-mabukan. Tapi setelah di jadikan pasar malam dan pengelolaannya melibatkan aparaturnya setempat, lokasi itu menjadi ramai dan tumbuh.

Uniknya lagi, hamper semua barang ada di jual pasar tersebut. Penjualnya ada yang berasal dari Pontianak dan sekitarnya. Bahkan ada yang langsung dari pulau Jawa. Pukul empat sore satu persatu para pedagang mulai berdatangan, dan mereka sudah pada sibuk memajang dan mengatur tempat jualannya. Dan satu persatu nampak pengunjung mulai berdatangan untuk berbelanja atau sekedar rekreasi bersama keluarga.

Aneka dagangan tersedia disini mulai dari pakaian, aksesoris dan kuliner pun ada. Bila anda ingin sekedar bersantai, duduklah di lapak warung es teler dan bila anda terasa lapar mie ayam mas joko siap memanjakan lidah anda. Dan malampun telah tiba, hiruk pikuk suara pedagangpun lantang menawarkan dagangannya. dampak dari pengelolaan pasar tersebut, sangat terasa bagi masyarakat Ketapang. Tak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga terhadap keamanan dan kebersihan lokasi tersebut sekarang sangat baik. Apalagi pedagang hanya di perbolehkan berjualan dari pukul 16.00-12.00. besoknya lokasi tersebut sudah bersih dan tertata rapi.

Desa Fokus (Kab. Sanggau)

Program ini merupakan ide langsung dari bupati Sanggau IR. H. Setiman H. Sudin, yang melatarbelakangi program ini adalah faktor geografis yang masih sulit dijangkau karena suprastruktur & infrastuktur penunjang pertumbuhan ekonomi masih belum tersedia, menurut bupati suatu daerah akan maju apabila pembangunan didesa-desa terpencil telah berjalan karena itu menjadi salah satu faktor untuk menekan angka kemiskinan didesa sebagai suatau bagian dari kabupaten yang dapat menunjang kemajuan daerah. Dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada di Kab. Sanggau untuk turut serta dalam program ini. Proses pembangunan disesuaikan dengan kelemahan atau kekurangan yang ada disuatu desa untuk kemudian ditunjuk SKPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sarana dan prasarana didesa tersebut.

Pada awalnya Camat dari setiap kecamatan mengirimkan data desa yang mereka usulkan, kemudian usulan itu diinfentarisir oleh BPMPEMDES untuk dibuatkan skala prioritas daerah mana yang lebih dulu akan dilaksanakan desa fokus. Setelah dilakukan infentarisir kemudian dilakukan rapat kordinasi untuk menentukan SKPD

mana yang akan menjadi kordinator untuk pelaksanaan program Desa Fokus di desa yang telah dipilih, Sebagai contoh apabila suatu desa masih belum memiliki akses jalan yang baik maka ditunjuklah Dinas Pekerjaan umum sebagai penanggung jawab untuk pembangunan didesa itu. SKPD diberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikan program tersebut yang berarti apabila ditahun pertama pelaksanaan belum selesai maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya, program ini dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dengan target desa fokus sebanyak 132 desa yang sudah harus selesai pada tahun 2014.

Pabrik Maggot (Kab. Sanggau)

Sanggau merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kucing (Malaysia ini) masih mengandalkan pasokan bahan baku ikan budidaya dari Malaysia dengan harga yang masih relatif mahal pada kisaran harga sekitar Rp. 12.000,- / kilogram. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk meminimalkan harga pakan di Kalimantan Barat adalah dengan membuat pakan alternatif. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau membangun pabrik pakan ikan berbahan maggot.

Maggot dipilih karena banyaknya PKM (Palm Kernel Meal) dari perkebunan kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan maggot. Dengan menggunakan bahan baku maggot ini.

Dengan adanya pabrik pakan ikan diharapkan harga pakan ikan bisa ditekan menjadi Rp. 5.000,00 per kilogramnya, sehingga harga ikan bisa lebih rendah lagi. Dengan demikian masyarakat akan lebih memilih daging ikan karena lebih ekonomis, bergizi tinggi, sehat dan baik untuk kecerdasan. Tidak hanya sebatas pada pengolahan maggot menjadi pakan ikan saja pabrik ini juga membudidayakan maggot itu sendiri yang digunakan sebagai bahan baku, selain itu pabrik ini juga dapat menyedot tenaga kerja dari masyarakat sekitar pabrik sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Produk pakan ikan dari pabrik ini diberi brand CORSETO (Cornelis Setiman) yang merupakan singkatan dari nama gubernur kalbar dan Bupati Sanggau. Pembangunan pabrik ini sudah dimulai sejak tahun 2010 dan masih beroperasi hingga sekarang.

Sapi Sawit (Kab. Sekadau)

Program yang sudah dirintis dari tahun 2007 ini adalah program yang mengintegrasikan antara sapi dengan kebun sawit. Untuk pengembangbiakan sapi menggunakan pakan yang berasal dari limbah kebun sawit berupa pelepah sawit untuk kemudian diolah menjadi pakan ternak sapi.

Hal ini dilakukan karena Kabupaten Sekadau memiliki potensi sawit dan ternak sapi yang cukup potensial apabila dioptimalkan yang akan berdampak kepada peningkatan maka Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan mencoba untuk mengintegrasikan antara ternak sapi dengan kebun sawit, selain untuk pengembangbiakan sapi, ternyata dengan menggunakan pakan dari hasil pengolahan pelepah sawit ini juga mampu meningkatkan hasil produksi dari ternak sapi itu sendiri.

Peremajaan Kebun Karet dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Terpencil (Kab. Bengkayang)

Program yang telah dirintis semenjak tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang ini bertujuan untuk meremajakan karet agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang ekspor yang cukup besar, namun modal yang diinvestasikan pada usaha perkebunan karet cukup besar dengan masa pengembalian investasi yang relatif lambat. Selain itu, produksi dan produktivitas karet yang masih rendah serta umur ekonomis yang sudah tidak mungkin dieksploitasi, maka perlu adanya usaha peremajaan karet dengan menggunakan klon unggul.

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Namun sebagai kabupaten yang memiliki areal luas kabupaten Bengkayang menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas. Rendahnya produktivitas kebun karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta kondisi kebun yang menyerupai hutan.

Oleh karena itu perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir. Dengan adanya bantuan berupa bibit karet Omat diharapkan beberapa tahun mendatang produksi karet masyarakat dapat meningkat karena selain umur yang relative cepat ditoreh bibit Omat juga rentan terhadap serangan hama. Program ini telah berjalan di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Bengkayang, Sungai Betung, Samalantan, Teriak, Suti Semarang, Sanggau Ledo, Ledo dan Lumar.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (Kab.Sanggau)

Kabupaten Sanggau memiliki potensi tambang yang cukup besar, sektor menjadi salah satu penyumbang bagi PAD daerah. Mulai tahun 2009 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya pada sektor pertambangan, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sektor pertambangan, mulai dari penyediaan informasi potensi komoditi pertambangan di seluruh wilayah kecamatan kepada calon Investor sekaligus pelayanan Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, pemantauan kegiatan Reklamasi dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam (sektor Pertambangan) yang optimal, terkendali, peduli terhadap lingkungan sekitar serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sektor Pajak Daerah maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Jenis komoditi/bahan tambang yang ada di Kabupaten Sanggau terdiri dari, Komoditi Mineral, Batubara, Bauksit, Emas, Bijih Besi, Zirkon, Felspar, Kaolin, Granit, Grafit, Barit yang tersebar di seluruh Kecamatan. Hingga tahun 2013 jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kab. Sanggau sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Izin dengan 7 (tujuh) komoditi, dan 20 (dua puluh) IUP diantaranya merupakan IUP Operasi Produksi. Pada tahun 2012 sektor pertambangan ini berhasil menyumbang pendapatan bagi Sanggau sebesar Rp. 30.878.134.460,-.

Cap Go Meh sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi (Kota Singkawang)

Menurut keyakinan orang tionghoa dimana pun mereka berada, bahwa setiap tahunnya para dewa kembali ke khayangan untuk menyampaikan semua bentuk laporan atas apa yang mereka peroleh atau diperbuat selama didunia. Sekelumit kisah itulah yang menandai dan melatarbelakangi lahirnya festival Cap Go Meh Singkawang. Lebih dari 60% masyarakat kota Singkawang adalah etnis tionghoa oleh karena itu pemkot Singkawang melalui dinas pariwisata menggelar festival CGM guna mempromosikan kota Singkawang ke tingkat Nasional dan Internasional.

Dinas Pariwisata membentuk kepanitiaan yang secara keseluruhan merupakan anggota MABT, selanjutnya MABT bertugas mencari pendanaan yang diperuntukan membayar honor peserta CGM (tatung) diperkirakan dana yang diperlukan untuk perayaan CGM mencapai 1 Milyar lebih. CGM dilaksanakan setiap tahun, dan pelaksanaannya 15 hari setelah perayaan imlek. Program ini telah ada sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Adapun tujuan dari program ini sebagai bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mempromosikan budaya dan pariwisata khususnya kota Singkawang ketingkat Nasional dan Internasional. Dengan motto “Jangan pernah katakan pernah ke Kalimantan Barat kalau belum pernah ke Singkawang”.

Dengan program ini sudah pasti mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara, membuka peluang usaha dibidang ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi kepada PAD melalui sector pajak hotel dan restoran. Adapun jumlah hotel dan penginapan (diluar kost) sebanyak 25 buah dan total kamar sebanyak 840 kamar. Jika rata-rata kamar seharga Rp. 500.000 maka total perputaran uang di Kota singkawang hampir Rp. 500 juta/malam.

Bantuan Alat Pengolah Hasil Perikanan(Kab. Kapuas Hulu)

Uncak Kapuas, demikian sebutan Kabupaten Kapuas Hulu. Uncak sendiri berarti perhuluan. Wajar memang disebut Uncak Kapuas, karena Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten paling hulu yang terdapat di Jalur Sungai Kapuas. Sungai Kapuas sendiri merupakan sungai besar dan merupakan salah satu jalur perhubungan utama yang mengitari sebagian besar daerah di Kalimantan Barat (Kalbar).

Dari sisi geografis, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah paling jauh dari jangkauan Kota Pontianak yang merupakan ibukota Provinsi Kalbar. Saat melakukan riset pada September 2013 yang lalu, peneliti mencoba melakukan perjalanan ke sana dengan menggunakan jalur darat via bus. Perjalanan memakan waktu hampir 17 jam. Berangkat dari Pontianak jam 2 siang dan peneliti tiba di Putussibau (Ibukota Kab. Kapuas Hulu) jam 8 pagi keesokan harinya.

Sungguh, perjalanan riset yang luar biasa memakan waktu lama di perjalanan. Dari pengamatan peneliti, infrastuktur jalan yang buruk adalah salah satu penyebab lamanya perjalanan. Tetapi bagaimanapun, peneliti tetap bersyukur karena pada saat riset September 2013, kondisi jalan tidak separah dan seburuk saat ini yang semakin memakan waktu lama yang konon kabarnya lebih dari 24 jam.

Jangkauan yang jauh, di satu sisi sepertinya merupakan kerugian bagi Kapuas Hulu. Namun, di sisi lain, tetap ada sisi positifnya. Salah satunya adalah, alam di Kapuas Hulu menawarkan pesona yang asri dan indah. Dua taman nasional ada di sana. Pertama Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan kedua Taman Nasional Betung Karihun (TNBK) yang menawarkan potensi alam arung jeram, pegunungan dan hutan rimba khas Kalimantan.

Potensi alam yang memadai, membuat Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu sumber penghasil sumber daya alam terbesar di Kalbar. Salah satu sumber daya alam terbesar di Kapuas Hulu yaitu sektor perikanan air tawar.

Sebagai daerah penghasil ikan air tawar terbesar di Kalbar, Kab. Kapuas Hulu merasa perlu untuk fokus pada sektor perikanan air tawar. Hal itu dibuktikan dengan pemandirian Dinas Perikanan dengan cara dipisahkan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Holtikultura sejak tahun 2005.

Sejak berdiri sendiri tersebutlah, Dinas Perikanan mulai merasakan atmosfer bebas dalam berinovasi untuk membantu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini melakukan pengolahan hasil perikanan. Inovasi tersebut dilakukan salah satunya dengan program bantuan alat pengolahan hasil perikanan.

Program ini dilaksanakan dengan cara pengajuan proposal bantuan oleh kelompok-kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan. Proposal tersebut kemudian diseleksi dengan sangat selektif oleh Dinas Perikanan.

Setelah dilaksanakan seleksi, Dinas Perikanan kemudian mengeluarkan SK pembentukan kelompok-kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan yang dinyatakan layak mendapat bantuan. Kategori kelayakan kelompok yang mendapatkan bantuan yakni kelompok tersebut benar-benar telah melaksanakan produksi hasil perikanan, minimal sudah berjalan selama satu tahun.

Adapun yang unik dari program ini adalah, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Adapun barang-barang tersebut adalah untuk mengolah hasil perikanan seperti mesin penggiling ikan, coolbox, freezer, wajan, baskom, fresto dll. Bantuan berupa barang inipun diberikan sesuai dengan skala prioritas (sesuai dengan kebutuhan kelompok).

Program yang terlihat sangat sederhana di atas, ternyata sangat efektif. Hal itu terlihat dari Hasil produksi pengolahan perikanan meningkat cukup signifikan dari awal program ini dilaksanakan 2009 dengan hasil 5.320 ton, 2010: 7.225 ton, 2011: 8.351 ton, sampai dengan 2012 menjadi 10.714 ton, dan dengan pemasaran tidak hanya di Kab. Kapuas Hulu, tetapi juga merambah ke Kuching (melalui PPLB Badau) serta kab. lain di Kalbar hingga ke Kota Pontianak.

Revitalisasi Pasar Tradisional Flamboyan dengan Biaya dari Pelaku Usaha (Kota Pontianak)

Selama ini pembangunan dan perbaikan pasar tradisional menggunakan biaya APBD. Semenjak masa kepemimpinan Walikota Pontianak, H. Sutarmiji, SH, MH (2009-2018), Pemerintah kota Pontianak mengembangkan suatu inovasi dalam kegiatan pembangunan pasar tradisional yang baru dan revitalisasi pasar tradisional yang sudah tidak layak melalui "Biaya dari Pelaku Usaha".

Salah satu contoh implementasi inovasi program adalah Revitalisasi Pasar Tradisional Flamboyan pada tahun 2012-2013. Program ini merupakan hasil perbaikan dan evaluasi yang pernah dilakukan pada pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional di tahun-tahun sebelumnya. Program pembangunan Pasar Flamboyan ini berarti menyempurnakan inovasi program pasar tradisional terdahulu yang dana pelaksanaannya bukan dibiayai oleh APBD. Sumber dana melainkan berasal dari dana kolektif pelaku usaha. Bahkan, Pemerintah Kota Pontianak memperoleh kelebihan dana dari pembangunan pasar tersebut. Sehingga sisa dana dapat disumbangkan sebagai pemasukkan PAD, selain dialokasikan untuk biaya perbaikan pasar tradisional lainnya.

Dana perbaikan atau pembangunan pasar dikenakan kepada pelaku usaha atau pedagang lama yang pernah menempati kios dan ingin melanjutkan usahanya. Mereka dibebani biaya sebesar 50% dari harga sebuah kios. Sedangkan pedagang baru yang berminat memiliki tempat usaha di pasar Flamboyan ini setelah pasar direvitalisasi ditetapkan tarif pembangunan dan perawatan sebesar 100% dari harga sebuah kios. Perjanjian sewa atau hak guna pakai tiap kios diberlakukan selama 25 – 30 tahun. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan hak-nya tidak diperbolehkan menjual kembali kepada pihak ketiga. Pembatalan hak harus langsung diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak.

Pasar yang baru diresmikan oleh Walikota Pontianak pada akhir bulan Desember 2013 ini berhasil memberikan sumbangan PAD sebesar 11-30 Milyar Rupiah. Menurut kepala Disperindag, Imbran, angka ini diperkirakan bisa bertambah apabila penyewaan kios mencapai semua kuota yang disediakan.

Jalan Lingkungan Mendorong Semangat Gotong Royong dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Kota Pontianak)

Jalan lingkungan di Kota Pontianak terdiri dari 4200 gang, belum termasuk gang di dalam gang dan gang baru akibat perkembangan permukiman. Secara historis, gang ini merupakan jalan setapak sejajar parit dimana kota Pontianak merupakan kota seribu parit yang meliputi parit primer, sekunder dan tersier. Parit dibangun untuk mempercepat proses konsolidasi lahan kota yang berjenis gambut dan rawa. Selain itu, parit yang disertai jalan setapak ini berguna untuk pengairan lahan kebun dan transportasi masyarakat Pontianak.

Perkembangan kota yang begitu dahsyat mendorong perubahan guna lahan dari perkebunan kelapa dan karet menjadi ruang permukiman dan fungsi ruang kota lainnya. Sehingga secara struktur ruang, parit dan jalan setapak ini tetap dipertahankan sebagai drainage dan jalan lingkungan atau dikenal dengan gang yang merupakan penghubung utama ruang-ruang kota. Tidak mengherankan, kota ini lebih dikenal sebagai kota gang yang dalam perkembangannya perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kualitas jalan lingkungan dan melebarkannya sebagai satu-satunya jalur darat di daerah ini.

Penyediaan infrastruktur sangat diperlukan dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Pontianak. Keterbatasan jalan darat menjadi masalah terbesar dalam pembangunan daerah ini. Kondisi tanah yang labil, jalan setapak yang sempit serta transportasi air yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat seiring peningkatan jumlah

angkutan darat merupakan faktor-faktor penyebab perlu ditingkatkannya jalan lingkungan.

Tentu saja rencana pembangunan jalan lingkungan harus didukung oleh sistem pendanaan yang kuat. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda adalah keterbatasan dana untuk membuat kualitas jalan darat yang baik, mengingat sering kali jalan yang sudah diperbaiki akan kembali mengalami kerusakan. Kondisi ini berlangsung akibat mahalnya biaya pembuatan jalan di lahan gambut dan labil. Di satu pihak, kurang kesadaran masyarakat ikut menjaga jalan lingkungan mereka. Di pihak lain, pembangunan jalan yang menggunakan sistem proyek atau lelang terbukti menghabiskan dana begitu besar. Dengan melalui sistem pendanaan bersama antara masyarakat dan pemerintah, solusi keterbatasan dana dan ketidakpedulian masyarakat dapat diatasi.

Menurut Walikota Pontianak H. Sutarmiji, SH, MH bahwa keterbatasan dana harus dicarikan solusinya, agar permasalahan kebocoran dana, ketidakpedulian masyarakat dan keterbatasan dana dapat ditangani secara bijaksana. Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kota Pontianak dapat diwujudkan untuk mendorong kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat Pontianak. Tanpa peningkatan jalan lingkungan, masyarakat Pontianak akan terus berada dalam lingkungan yang terisolasi dan sulit mencicipi program-program pembangunan, serta terus terpuruk dalam kondisi kemiskinan.

Program inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kota ini menjadi unik dengan kepiawaian pemerintah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi, baik berpartisipasi dalam menyediakan bahan pembuatan jalan yang lebih berkualitas, maupun tanpa disadari masyarakat mau ikut membuat jalan secara bergotong-royong. Pemerintah hanya menyediakan bahan dasar, seperti semen, pasir dan batu. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan proyek jalan dilakukan secara bergotong-royong atau dibiayai oleh masyarakat secara kolektif.

Bahkan, masyarakat semakin menyadari begitu penting menyediakan bahan dasar yang cukup banyak. Sehingga jalan yang mereka usahakan secara bersama dapat menghasilkan kualitas jalan yang lebih kuat, awet dan lebih tinggi terhadap muka air tanah di musim banjir. Lagi-lagi cara ini member efek positif, ada proses pembelajaran dan kepekaan bagi masyarakat, kesadaran mereka meningkat untuk berlomba-lomba menambah bahan dasar pembuatan jalan selain bahan dasar yang telah diberikan oleh pemda.

Mekanisme pelaksanaan program meliputi empat tahap. Tahap pengajuan proposal masyarakat diajukan ke Kantor Walikota dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat. Tahap prioritas penanganan harus memenuhi persyaratan, seperti: jalan berada di permukiman padat, tingkat kerusakan sesuai dengan hasil survey tim, serta belum pernah mendapat bantuan perbaikan jalan, kecuali melanjutkan pembangunan jalan yang harus dikerjakan. Tahap pemberian bantuan material disesuaikan dengan dana yang tersedia dan bantuan masyarakat. Sedangkan tahap laporan pelaksanaan dan evaluasi mengakhiri semua tahap yang telah dilalui.

Pajakku untukmu Kota Pontianakku (Kota Pontianak)

Kota Pontianak dianggap tidak memiliki sumber pendapatan daerah selain, sebagai daerah perdagangan, jasa dan pelabuhan. Tanpa didukung oleh sumber daya alam yang memadai, seperti kawasan pertanian, pertambangan dan perikanan, rasanya terlalu sulit Pemerintah Daerah Kota Pontianak mendongkrak Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Harapan terbesar adalah bagaimana pemda meningkatkan PAD kota melalui pungutan pajak daerah. Upaya dilakukan mulai dari memperbaiki sistem pelayanan pajak, melakukan sosialisasi pajak, pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi hingga razia dan denda pajak. Itu pun belum sepenuhnya memberikan pencapaian yang gemilang.

Tiga program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Program Pelayanan Prima difokuskan kepada tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah. Program Peningkatan Penerimaan Daerah dimaksudkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan dan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah. Sedangkan Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah dilakukan untuk mencapai sasaran jumlah realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan.

Secara umum, ketiga program unggulan ini mampu melebihi target pencapaian yang ditentukan oleh daerah. Dari tahun 2009 – 2012, realisasi pencapaian mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara berturut-turut, yaitu: 43.504,17 milyar, 58.769,56 milyar, 117.806,41 milyar dan 162.782,49 milyar.

Strategi Peningkat PAD Kab.Pontianak 2009-2013 (Kab.Pontianak)

Kabupaten Pontianak pernah mengalami masa kelam pada tahun 2009, setelah dua daerah Selatan dan Utara nya dipecah menjadi Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang. Kedua daerah ini merupakan kawasan berpotensi yang menyumbangkan 90% PAD Kabupaten Pontianak. Potensi ini berasal dari kawasan pantai yang dikenal sebagai daerah pertanian dan perikanan, serta kawasan perhuluan yang memiliki hasil tambang dan perkebunan sawit dan karet.

Dari tahun 2009-2011, difisit yang dialami Kabupaten ini mengakibatkan banyak program pemerintah daerah yang tidak dapat dilaksanakan. Bahkan Pemda harus meminjam dana kepada Bank KalBar untuk membayar gaji pegawainya. Untuk mengurangi permasalahan ini, Pemerintah berusaha keras meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perbaikan-perbaikan di dalam birokrasi perpajakan daerah, serta lebih giat melancarkan wajib pajak kepada masyarakat.

Salah satu yang dianggap ampuh atau berimbas kepada peningkatan pendapatan daerah adalah melakukan jemput pajak ke perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib pajak. Pemda Kabupaten ini juga memberikan penghargaan setiap tahun pada hari kelahiran Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak kepada perusahaan yang berprestasi dalam pembayaran pajak.

Selain itu, pemerintah melakukan mutasi pegawai yang menangani bidang keuangan dan perpajakan. Langkah ini dilakukan adalah untuk menciptakan iklim dan kinerja pemerintah yang lebih bersih, segar, cepat, tanggap dan kreatif. Staf-staf muda yang dibekali dengan ilmu perpajakan dan teknologi tepat guna diberikan peran lebih besar untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya. Melibatkan pihak independen adalah keputusan yang tepat untuk mengontrol kerja bidang pemerintahan ini.

PEMERATAAN EKONOMI

Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Kabupaten Ketapang)

Total perusahaan skala nasional baik BUMN mau pun swasta di Kabupaten Ketapang ada 135. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Sebab setiap perusahaan baik swasta mau BUMN yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau biasa dikenal dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Hal ini jelas tertuang dalam pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selama ini perusahaan tersebut dalam mengalokasikan CRS tidak terkendali oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Ketapang turun tangan untuk mengendalikan penyaluran bantuan CRS tersebut. Berkat kegigihan dan pendekatan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, akhirnya semua perusahaan yang berjumlah 135 itu mau tunduk dan patuh menyalurkan bantuan CRS berdasarkan arahan dan petunjuk Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Buktinya, implementasi program CRS di Kabupaten Ketapang sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan yaitu tahun 2012 yang ditargetkan Rp 50.000.000.000, per 31 Desember 2012 sudah terealisasi sebesar Rp. 59.829.863.044. dana CSR ini tentu bisa menjadi potensi besar dalam pembiayaan Pembangunan Daerah Ketapang.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Kab. Landak)

Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kab. Landak memiliki Program Pembangunan Usaha Agribisnis Pedesaan yang dimulai pada tahun 2008 dan masih terus berjalan hingga saat ini, program ini dilatarbelakangi karena tingkat perekonomian petani yang masih rendah disebabkan oleh keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Melalui program ini setiap Gapoktan (gabungan kelompok tani) diberikan bantuan sebesar 100juta/gapoktan untuk kemudian disalurkan kepada setiap Poktan (kelompok tani) anggota. Perhatian dari Pemkab Landak yang disalurkan melalui Dinas Pertanian adalah berupa pemberian alat bantu pertanian berupa Handtractor untuk membantu meningkatkan hasil panen petani.

Program ini membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena dengan bantuan yang diberikan itu membantu terjadinya penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis para petani dipedesaan. Bahkan sekarang petani tidak hanya menjual gabah tetapi telah bisa mengolah gabah tersebut menjadi beras dengan menggunakan mesin yang dihibahkan dari Dinas Pertanian kepada Gapoktan.

Tahap awal yang dilakukan adalah identifikasi oleh Dinas Pertanian calon Gapoktan yang diusulkan dari 156, setelah itu diseleksi gapoktan yang berhak untuk menerima bantuan, kemudian diusulkan oleh dinas pertanian melalui bupati, jika usulan diterima maka diterbitkan Surat Keputusan penerima oleh Kementerian Pertanian. Jika SK telah dikeluarkan maka setiap Gapoktan penerima harus melengkapi administrasi yang diperlukan untuk kemudian bantuan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening

setiap gapoktan penerima untuk digunakan sesuai dengan RUB & RUK yang diusulkan. Dengan berjalannya program ini dapat Menumbuhkan perekonomian desa dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang mayoritas beramata pencarian dari bertani padi.

Armada Semut (Kab. Kubu Raya)

Empat Puluh Persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Kubu Raya (sebesar 760 Km²) merupakan wilayah pesisir dan kepulauan. Di wilayah ini pula, tingkat kemiskinan masyarakatnya berada di level paling bawah apabila dibandingkan dengan kerentanan kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah lainnya di kabupaten yang dipimpin bupati termuda di Provinsi ini.

Kondisi itu dilatarbelakangi oleh keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat di pesisir dan kawasan yang hanya dapat disentuh oleh transportasi sungai. Akibatnya bukan hanya permasalahan akses di bidang kehidupan ekonomi saja, melainkan juga seluruh kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka berada dalam posisi “terbelakang”.

Tidak dapat dipungkiri, membuka akses selebar-lebarnya merupakan solusi yang terbaik untuk menghantarkan masyarakat pesisir dan tepian sungai ke dalam kehidupan perekonomian yang lebih baik. Pengadaan transportasi dan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya (KKR) melalui program pemerataan kehidupan ekonomi yang dipelopori oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat setempat maupun pihak-pihak lainnya.

Terobosan yang dilakukan Pemkab Kubu Raya disambut positif oleh masyarakat pesisir yang hidup di garis pantai sepanjang 149 Km. Bahkan mereka berinisiatif memberikan nama program kerja, ketika peneliti PPIP melakukan survei lapangan untuk mengeksplorasi kegiatan inovasi Pemerintah KKR.

ARMADA SEMUT, itulah nama yang diusung dengan rasa bangga oleh Masyarakat Nelayan di sepanjang bibir pantai Kabupaten Kubu Raya untuk kegiatan inovasi pemerintah daerahnya. Sebagai Eksistensi Diri bahwa MEREKA -- **Nelayan Berperahu Kecil** -- juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan Kapal-Kapal Penangkap Ikan berkapasitas besar (Armada Kakap) di dalam Sumbangsih Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Bagi masyarakat nelayan, Armada Semut ibarat setetes air di Padang Sahara. Pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi kehidupan nelayan sebagai wujud kemudahan kepemilikan aset. Namun Pemkab KKR juga mengubah *mindset* masyarakat pesisir untuk menjadi produktif atau dibekali keahlian untuk mengelola potensi yang dimiliki. Dimana selama ini masyarakat hanya sebatas mengantungkan nasib kepada ketersediaan alam dan berbagai bantuan atau pinjaman baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Bukan hal yang mudah untuk mengubah *mindset* dan kebiasaan masyarakat yang sudah beratus-ratus tahun tertanam dari generasi ke generasi. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha keras memutuskan tradisi yang menjadi belenggu bagi kemajuan masyarakat pesisir. Sebagai contoh, program Armada Semut diberikan bukan sebatas memberikan kue pemerataan pembangunan. Program ini menekankan proses

pembelajaran dan produktivitas dalam usaha membuka akses dan kesempatan untuk menjadi mandiri.

Program Armada Semut diberikan dari tahun 2010 berjenis perahu kayu. Selama ratusan tahun masyarakat Kubu Raya mengenal tradisi pembuatan perahu kayu secara gotong-royong. Keterbatasan bahan dasar kayu menjadi kendala terbesar masyarakat nelayan saat ini. Ditambah lagi dengan biaya perawatan yang relatif mahal yang dilakukan setiap periode enam hingga delapan bulanan. Lama proses pembuatan, usia yang cukup singkat dan beban yang berat bila dibandingkan dengan perahu berbahan viber glass juga menambah beban nelayan kecil. Akibatnya begitu banyak nelayan yang tidak memiliki armada sendiri, sehingga mereka harus meminjam dari rekan mereka atau memilih untuk memiliki aset perahu bersama yang digunakan secara bergiliran.

Kendala ini mendorong Pemkab Kubu Raya untuk memberikan bantuan perahu berbahan viber glass yang dipercaya memiliki daya tahan yang lebih kuat, lincah, murah perawatan dan proses pembuatan, serta tidak mudah tenggelam dan patah. Bukan berarti dalam pelaksanaan program tidak menimbulkan masalah. Mengingat pemasaran perahu ini hanya bisa didapatkan di Ibukota Propinsi Kalbar dan dimonopoli oleh kalangan tertentu.

Selanjutnya bantuan diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan armada berbahan viber glass dan diberikan pula bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perahu viber glass. Setiap kecamatan dari lima kecamatan yang berada di pesisir pantai Kubu Raya ditawarkan untuk mendapatkan pelatihan tersebut.

Konsep dasar pemberian pelatihan ini adalah tetap menjaga tradisi gotong-royong masyarakat nelayan dalam proses pembuatan perahu serta mendorong masyarakat untuk mampu memproduksi sendiri armada mereka secara mandiri. Salah satu contoh nyata keberhasilan program adalah Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kubu Raya, bahkan kedepannya mereka berfokus pada produksi armada semut di luar kalangan mereka.

Mekanisme program, masyarakat di kecamatan tersebut dapat mengajukan bantuan pelatihan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Setiap kelompok nelayan yang berjumlah sekitar 10 orang dapat mengajukan bantuan bahan-bahan pembuatan perahu viber glass. Kelompok ini melanjutkan kegiatan pembuatan perahu secara gotong-royong. Mereka juga diwajibkan membuat tabungan kelompok setiap bulannya. Tujuannya adalah uang yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai modal pembuatan perahu bagi anggota mereka yang belum memiliki armada atau untuk memperbaiki armada anggota kelompok yang sudah tidak layak. Inilah proses pembelajaran yang sangat efektif bagi pembangunan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Bantuan armada semut ini memberikan kontribusi positif bagi kemudahan transportasi nelayan. Bahkan keluarganya, istri dan anak mereka ikut merasakan faedah program. Yang tadinya mereka hanya mampu memiliki sebuah aset armada semut. Setelah mendapatkan bantuan program, kepemilikan aset keluarga nelayan itu meningkat menjadi beberapa armada.

Hal itu membuka akses anak-anak mereka untuk sampai ke pusat pendidikan. Ibu-ibu nelayan juga tidak lagi tergantung kepada peran tunggal suami mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan rumah tangga. Keterbukaan akses

membuka peluang para istri nelayan untuk meraih penyuluhan pelatihan dan bantuan modal *home industry*, kesempatan cukup gizi dan pangan, serta akses penanggulangan masalah kematian ibu dan balita. Implementasinya, kehidupan rumah tangga menjadi tombak terdepan untuk menghancurkan stigma negatif yang melekat pada diri masyarakat pesisir.

Keberhasilan membuka akses dari Program Armada Semut ternyata berimbas kepada proses memperkuat basis kehidupan rumah tangga masyarakat pesisir dengan cara mengasah potensi ibu-ibu nelayan dalam berbagai program pengembangan. Bupati Muda Mahendrawan berpendapat bahwa kaum ibu memiliki kepedulian yang lebih tinggi untuk memajukan keluarganya dan lingkungan masyarakatnya.

Mereka selalu bersemangat menyambut berbagai bentuk pelatihan dan bantuan peralatan produksi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tanpa sokongan para istri, berbagai program bantuan pemerintah yang diberikan kepada bapak-bapak nelayan sering kali mengalami kegagalan dan salah sasaran. Oleh karena itu, keterlibatan istri-istri nelayan tidak dapat diabaikan dalam proses penguatan dan kelanjutan program armada semut.

Setiap pelatihan dan bantuan peralatan – misal: mesin penggiling ikan, pembuat tepung, mesin pendingin dan para pengering ikan -- yang diamanahkan kepada kaum perempuan ini sungguh-sungguh dijalankan dan dikembangkan. Contoh program yang mencuri hati mereka adalah mengelola ikan dan udang menjadi tepung dan kerupuk. Yang tak kalah menarik, mereka diajarkan membuat kemasan ikan kering/asin dan terasi, agar hasil produksi mereka dapat bersaing di pasaran modern.

Apabila musim melaut tiba, hasil tangkapan nelayan melimpah ruah. Untuk mencegah hasil laut tebuang percuma. perempuan pesisir diberdayakan untuk mengelolanya menjadi produk-produk lokal yang bisa dipasarkan kapan saja tanpa dikejar batas waktu.

Pemanfaatan tanaman lokal pun menjadi incaran Pemkab Kubu Raya untuk mendongkrak potensi perempuan. Berbagai kegiatan pemberdayaan diberikan, antara lain produksi sirup buah bakau, kerajinan tempurung kelapa dan kulit kerang. Kegiatan yang mengisi waktu luang ibu-ibu nelayan ini ternyata tidak dapat dipandang sebelah mata, berhasil memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi keluarga.

Selain memandirikan kaum perempuan dalam pemanfaatan hasil laut dan tanaman lokal. Potensi ibu-ibu nelayan sebagai garda terdepan keberlanjutan program armada semut dibidik kembali melalui program unit koperasi simpan pinjam. Program simpan pinjam bagi masyarakat nelayan tidak mampu ini diadopsi dari sistem Grameen Bank yang dipelopori oleh Profesor Muhammad Yunus dari Banglades. Tujuan program simpan pinjam adalah strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menguraikan permasalahan masyarakat nelayan di masa paceklik atau kondisi angin yang tidak mendukung nelayan untuk melaut selama dua sampai empat bulan ke depan.

Pada masa itu, mereka terbiasa meminjam uang untuk menafkahi keluarga atau mengutang berbagai kebutuhan hidup sehari-hari kepada “tengkulak” atau penyalur/pedagang ikan. Hutang mereka itu baru dapat dibayar di musim melaut dengan menjual hasil tangkapan ikan yang harganya telah ditentukan oleh pemberi hutang. Akibatnya, harga yang ditentukan itu adalah sangat jauh dari harga pasaran yang

merugikan nelayan. Ini menjadi lingkaran syaitan yang terus menjerat kehidupan nelayan bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya. Melalui program unit koperasi simpan pinjam, masyarakat yang diperankan oleh ibu-ibu nelayan, dididik dan dibiasakan untuk mengelola keuangan keluarga, agar keluarga mereka dapat terhindar dari jerat siklus hutang-piutang.

Yang tidak kalah penting dari keunikan program Armada Semut ini adalah melengkapi perahu nelayan dengan mesin Ben-Gas (*double fuel*). Mesin ini dirancang khusus menggunakan dua bahan bakar yang dapat dipilih sendiri oleh masyarakat. Pengembangan teknologi Ben-Gas ini dapat membantu beban nelayan terhadap kenaikan harga bensin dan solar. Mesin ini dapat dikonversikan secara langsung dari bahan bakar solar ke gas. Satu tabung gas berukuran 12 kg mampu menempuh perjalanan selama sepuluh jam dengan jarak tempuh lebih dari 20 kilogram. Targetnya, upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat bisa diraih dengan melakukan penghematan bahan bakar sebanyak empat kali lipat bagi perahu-perahu masyarakat pesisir ini.

Inovasi mesin Ben-gas dikembangkan dari hasil cipta putra Kalbar yang telah mengalami uji kelayakan sebanyak 6 kali. Pemda Kubu Raya sangat peduli dengan program ini untuk mendorong putra daerah menciptakan teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia sesuai dengan motonya Kubu Raya Untuk Indonesia. Pemda menjadi kepanjangan tangan bagi team pencipta mesin Ben-gas baik membuka akses ke lembaga uji kelayakan di ITB, pemerintah pusat maupun masyarakat pengguna mesin. Bahkan Pemda sudah menyiapkan siswa-siswa SMK jurusan mesin dan masyarakat nelayan untuk direkrut dalam produksi mesin Ben-gas dalam skala besar, apabila MOU yang sedang diperjuangkan Pemda dengan pihak pemerintah pusat dan pemberi modal berhasil disetujui. Harapannya, CSR, kementerian BUMN dan Kemenristek bersedia membuka pabrik mesin Ben-gas di Kubu Raya, agar mesin dapat digunakan oleh seluruh masyarakat nelayan di Indonesia.

Dari program Armada Semut, usaha peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nelayan dan pesisir didongkrak penuh melalui metode pembelajaran jangka panjang atau pembangunan yang berproses. Meskipun perlu waktu yang tidak singkat, dampak ke depannya diyakini akan menciptakan kemandirian masyarakat pesisir yang tidak lagi menggantungkan hidup pada alam dan pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan masyarakat.

Secara kuantitatif, program pemerataan kehidupan ekonomi bagi masyarakat pesisir Kubu Raya ini berhasil meningkatkan pendapatan nelayan. Penghasilan mereka rata-rata perbulan sebesar Rp. 650.000,00 – Rp 1.200.000,00 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.300.000,00 – Rp 2.500.000,00. Sedangkan, rata-rata hasil tangkapan nelayan juga mengalami peningkatan sebesar 18% - 27%.

Bedah Rumah dan Sanimas

Program bedah rumah sudah dimulai semenjak tahun 2003 yang diprakarsai oleh Walikota Sutarmiji (saat itu berperan sebagai Wakil Walikota Pontianak). Ide awal bedah rumah adalah keprihatinan bapak Sutarmiji terhadap kebiasaan warga berpenghasilan rendah yang mendiami rumah beratap daun di perkampungan tua sepanjang aliran Sungai Kapuas dan Landak. Mereka rutin mengganti atap daun setiap

enam hingga delapan bulan. Bahan atap yang tidak permanen diikuti pula oleh dinding dan lantai papan kelas tiga yang harus diganti setelah musim hujan berlalu.

Menurut Walikota Pontianak, biaya perbaikan atap daun dan lantai-dinding papan menjadi sangat mahal apabila kegiatan itu dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat dan sering. Pertimbangan itu semakin diperkuat dengan perhitungan biaya konstruksi bangunan atap-dinding-papan yang menggunakan bahan-bahan permanen. Belum lagi perhitungan biaya tukang yang cukup besar harus dipertimbangkan dari biaya pembelian bahan bangunan. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan tidak tentu, membeli atap daun dan papan kelas tiga ketika mereka memiliki uang dalam jumlah terbatas dan terdesak adalah lebih ringan bila dibandingkan dengan segepok uang yang harus mereka keluarkan untuk membangun rumah permanen.

Situasi ini mendorong pemkot Pontianak menciptakan program inovasi Bedah Rumah yang menggunakan atap seng, lantai-dinding papan kelas dua atau satu ataupun semen. Program ini awalnya dikembangkan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk bahan bangunan, sedangkan pelaksanaan diserahkan kepada masyarakat. Bantuan ini dimaksudkan untuk merangsang masyarakat membangun rumah yang lebih layak huni. Program ini sekaligus mengajarkan masyarakat menyisakan penghasilan mereka secara berkala untuk memperbaiki rumah dengan bahan permanen, sehingga hunian mereka bisa didiami untuk jangka waktu yang lebih lama (sepuluh hingga dua puluh lima tahun ke depan).

Dari tahun 2003 hingga 2008, penanganan program bedah rumah beberapa kali berganti tangan, mulai dari dinas sosial, dinas kesehatan, kecamatan dan berakhir kepada dinas PU. Namun program ini sempat berhenti selama 1 tahun dikarenakan dinas PU hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan berskala proyek bangunan. Pada tahun 2010, program bedah rumah dilanjutkan kembali dibawah dinas cipta karya bidang perumahan rakyat yang melibatkan kelurahan sebagai lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana APBD adalah dimulai dari (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak; (2) Rekening Tim Pendataan, Survei dan Monitoring Fasilitas dalam rangka peninjauan rumah tidak layak huni dan sanitasi Kota Pontianak; (3) Rekening Kelurahan; dan (4) Penerima Bantuan. Realisasi bantuan dari tahun 2011 dan 2012 berjumlah 266 rumah per tahun masing-masing sebesar Rp. 1.994.774.750,00 dan Rp. 1.995.000.000,00.

Untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bedah rumah, terutama untuk menghindari penyelewengan bantuan oleh masyarakat, pemerintah memberikan stimulan berupa dana bantuan pembuatan sanitasi (toilet dan kamar mandi) di masing-masing warga yang berhasil melaksanakan program bedah rumahnya dengan sungguh-sungguh. Hadiah sanitasi ini ternyata membuahkan hasil yang sangat baik. Masyarakat tertarik menyelesaikan rumah mereka tepat waktu, bahkan mengupayakan pembangunan hunian dengan kualitas yang lebih baik dari yang diharapkan oleh pemda kota Pontianak. Hasilnya, sebanyak 1200 buah sanitasi dibangun secara serempak dalam waktu satu hari secara bergotong-royong yang dicatat oleh MURI sebagai pembangunan sanitasi terbanyak.

PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL

Peningkatan Perekonomian Pasca Panen (Rice Milling Unit/RMU) (Kabupaten Kayong Utara)

Produksi padi di Kabupaten Kayong Utara rata 68.932 ton GKG (Gabah Kering Giling) Setiap tahun. Selama ini gabah hasil panen hanya di giling dengan mesin penggiling milik masyarakat yang sifatnya masih konvensional. Menyedihkan lagi, ada hasil panen petani Kayong Utara yang dimanaaftkan oleh kabupaten lain dalam memenuhi kebutuhan pasokan beras. Keberadaan Rice Milling Unit (RMU) yang merupakan alat dengan teknologi tinggi mampu mengatasi masalah yang selama ini di alami Kayong Utara, terutama dalam sector pertanian.

Pengelolaan Penggilingan Padi (Rice Milling Unit) sangat penting dalam mendukung produksi beras yang meningkat pesat. Di sertai dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan beras di Kayong Utara sangat tinggi. Namun karena rendahnya mutu beras yang ada di pasar, serta menjamurnya penggilingan milik individu terasa sangat kurang menguntungkan pihak petani. Dengan RMU ini harapannya tentu bisa meningkatkan mutu beras dan meningkatkan pendapatan petani sekaligus menaikkan kesejahteraan petani.

Sejak di bangun tahun 2009, program sempat jalan dan sudah di resmikan oleh Bupati Kayong Utara Tahun 2012. Namun hingga sekarang RMU harus berhenti operasional karena pengelola Koperasi Bakti Praja Sukadana tidak sanggup melanjutkan produksi, karena tidak fokus.

Peningkatan Perekonomian Pascar Tangkap Daerah Perhuluan (Kabupaten Kayong Utara)

Hasil perikanan tangkap (ikan teri) yang sangat potensial di Kecamatan Kepulauan Karimata. Minimnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan tangkap (ikan teri). Penanggung Jawab dan Pelaksana program Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara. Sedangkan penerima manfaat adalah Masyarakat Desa Pelapis.

Cara pengolahan yang relatif masih sangat sederhana dan kurang memperhatikan aspek hygenitas sehingga berpengaruh pada rendahnya kualitas hasil produksi. Nilai jual ikan teri yang relatif murah karena kurang memenuhi standar mutu baik dari segi bentuk, hygenitas dan kemasan. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Tangkap Perikanan, yaitu berupa penyediaan Tungku Rebus Ikan Teri. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi ikan teri masyarakat. Terjaminnya hygenitas ikan teri yang diolah menggunakan peralatan yang lebih terjamin kebersihannya. Adanya nilai tambah terhadap produk hasil pengolahan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Ketahanan Pangan Daerah (Kabupaten Ketapang)

Program ini di latar-belakangi dengan sukanya masyarakat Kabupaten Ketapang meniru apa saja yang menjadi trend atau yang sedang laris. Misalnya ada satu orang yang berhasil usaha voucher handphone, semua pada ikut dan berusaha menjual pulsa.

Selanjut, ada orang yang berhasil menjual pecel lele, nanti pasti ada yang ikut-ikutan usaha pecel lele. Oleh Bupati Ketapang, Hendrikus, karena masyarakatnya suka meniru apa saja, justru menjadi inspirasi untuk mengembangkan potensi ketahanan pangan daerah di lahan tidur yang terbentang luas dengan melaksanakan langkah-langkah:

(1). Pembangunan Demonstration Area Pertanian Terpadu atau lebih dikenal dengan DEM Area

(2). Pembangunan Kebun Pangan (Food Estate) skala besar di Kabupaten Ketapang

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Namun di dalam praktiknya, bagi masyarakat miskin, memenuhi kebutuhan pangan bukanlah persoalan yang mudah. Pentingnya ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang berkaitan dengan pencapaian MDG,s 2015 dimana target pertama yang harus dicapai adalah penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Ketapang harus menjamin ketersediaan dan kecukupan bahan pangan bagi warganya dengan melakukan berbagai kebijakan pangan.

Untuk merealisasi itu, Bupati Ketapang Hendrikus telah menggalakan program ketahanan pangan daerah dengan cara membangun fasilitas yang disebut DEM AREA Percontohan Pertanian Terpadu di Kecamatan Muara Pawan dan Matan Hilir Utara-Ketapang. Fasilitas ini dibangun tidak hanya sawah dengan total area 4 hektar. Tetapi di lengkapi dengan fasilitas lain, yaitu saung tani, workshop, tempat pengeringan gabah, penyimpanan alat-alat pertanian, dan kolam pengairan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga melengkapi dengan kolam ikan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu membangun jalan akses ke lokasi DEM AREA percontohan sepanjang 3,2 Km dari Sungai Awan 1. Kemudian 7,8 Km dari Sungai Sentap dengan menggunakan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2013. DEM AREA ini di bangun untuk masyarakat Kabupaten Ketapang yang mau belajar menjadi petani dengan memanfaatkan lahan tidur yang terbentang luas di Kabupaten Ketapang.

Gerakan Bercocok Tenam bagi Pejabat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah

Agar masyarakat Kabupaten Ketapang, mau tergugah dan berusaha sebagai petani, Bupati Ketapang membuat program dengan mewajibkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk bertani. Program ini diberi nama Gerakan Bercocok Tanam Tanaman Pangan oleh pejabat daerah di Kecamatan Muara Pawan. Program ini baru dimulai di galakan tahun 2012 lalu.

Tentunya dengan cara mencari lokasi yang tepat dan murah. Program yang di galakan Bupati Ketapang, Hendrikus, ini ternyata sejalan dan di susul dengan masukannya program Kebun Pangan (food estate) skala besar di Kecamatan Muara Pawan, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, Kendawangan, Simpang hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Jelai Hulu, Manis Mata, Air Upas, Singkup, Marau, Nangan Tayap, Sandai, Hulu Sungai yang dilakukan oleh BUMN.

Berkat trobosan dan inovasi Bupati Ketapang, Hendrikus, melalui program tadi, secara perlahan mulai mendapat perhatian dan di ikuti oleh masyarakat Ketapang. Target awal minimal mengubah pola pikir masyarakat Ketapang, kalau sector pertanian

bisa menjami pendapatan hidup apabila di kerjakan dengan serius. Alasannya karena Ketapang memiliki lahan tidur yang sangat luas hingga kini belum tergarap dengan optimal.

Peningkatan Produksi Perkebunan Karet dan Kakao (Kab.Sanggau)

Masyarakat banyak yang memiliki lahan yang luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal, yang sebenarnya lahan tersebut apabila dimanfaatkan secara optimal dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Melihat itu maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan beberapa langkah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat lebih memanfaatkan lahan yang ada. Langkah yang ditempuh oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan ialah dengan memberikan bantuan 500 bibit karet unggul kepada para petani karet.

Selain itu SKPD juga melakukan terobosan dengan membuat program kebun entres dilahan sekolah dan mengajarkan cara untuk menyiapkan bibit karet unggul dan hal tersebut dimasukkan kedalam pelajaran muatan lokal. Selain itu untuk meningkatkan hasil produksi kakao di kab.Sanggau, Dinas Kehutan dan Perkebunan juga melakukan terobosan dengan melaksakan program peremajaan dengan menggunakan kakao embrio genesis untuk lebih meningkatkan hasil produksi kakao di kab.Sanggau, program ini sudah berjalan sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Kelompok tani mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan bibit, kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh Dinas Kehutanan & Perkebunan berkordinasi dengan petugas lapangan & kepala desa setelah ditetapkan penerima bantuan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, lalu dilakukan pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), setelah itu barulah petani menerima bantuan bibit. Dengan program ini sudah mampu meningkatkan pendapatan para petani antara 3-4 juta/bulan dan ini juga memberikan efek yang cukup baik dengan sudah banyak petani terutama petani karet yang anak mereka sudah dapat berkuliah.

Klaster Bidai Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jagoi Babang dan Seluas (Kab. Bengkayang)

Daerah perbatasan umumnya merupakan daerah tertinggal, namun tidak bagi masyarakat kecamatan Jagoi Babang dan Seluas. Jarak yang jauh untuk menjangkau kecamatan tersebut tak menjadi alasan bagi masyarakat untuk menyatakan diri sebagai desa tertinggal. Banyak hasil alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan masyarakat setempat melalui klaster bidai dan hampir seluruh rumah tangga menekuni usaha ini. Letak yang strategis yakni berbatasan dengan Serikin (Sarawak, Malaysia) membuat peluang masyarakat Jagoi Babang dan Seluas semakin besar untuk memasarkan produk hasil usaha mereka. Dan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi rata-rata masyarakat daerah perbatasan.

Semenjak tahun 2007 Disperindagkop Kabupaten Bengkayang menjadikan klaster bidai ini menjadi salah satu program unggulan dari Kabupaten Bengkayang, Tingginya kemauan masyarakat untuk mengembangkan industri kerajinan sebagai mata pencarian dan besarnya permintaan pasar membuat Disperindagkop Kabupaten bengayang memikirkan cara untuk melakukan kerjasama keberbagai pihak untuk

menjadikan kerajinan bidai sebagai souvenir/buah tangan dari bengkayang. Untuk itu disperindagkop kabupaten Bengkayang menggandeng Bank Indonesia untuk memodernisasi motif dari kerajinan bidai yang semula polos menjadi bermotif. Tak hanya itu Bank Indonesia juga memberikan bantuan berupa mesin jahit dan mesin raut rotan untuk meningkatkan mutu produksi kerajinan bidai.

Dengan adanya klaster bidai ini masyarakat perbatasan tak lagi merasa anak tiri didaerah sendiri. Karena dengan adanya pembinaan, serta bantuan yang telah diberikan membuat produksi masyarakat setempat tak lagi menjadi produk musiman ataupun sampingan. Karena pasaran kerajinan bidai sudah memiliki pasar tersendiri boleh dikatakan produksi masyarakat sudah menembus pasaran internasional.

Balai Benih Tanaman Pangan & Holtikultura (Kab.Sekadau)

Sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu sektor unggulan dari kabupaten Sekadau dan merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat. Namun tingginya harga bibit unggul dan masih harus didatangkan dari pulau jawa menjadi salah satu masalah yang sangat mengganggu. Sebab para petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendatangkan bibit unggulan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Menyikapi hal tersebut maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Pertenakan, bidang tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Sekadau, membuat Balai Benih Tanaman Pangan & Hortikultura agar dapat menghasilkan bibit unggul sehingga dapat menekan harga bibit dan menguntungkan petani. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki 2 (dua) Balai Benih yang diharapkan akan memproduksi Benih Unggul berkualitas di Kabupaten Sekadau. Dua Balai Benih yang dimaksud yaitu Balai Benih Tanaman Pangan yang beralamat di Desa Landau Kodah dan Balai Benih Hortikultura beralamat di Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir. Pada Tahun 2012., Balai Benih Hortikultura Sudah memproduksi 500 batang Bibit Petai, 200 batang Lengkeng dan 100 batang Durian Montong yang sudah disalurkan kepada kelompok – kelompok Tani se Kabupaten Sekadau . PBT juga mengawasi produksi bibit Salak Pondoh yang ada di penangkaran SP VI Nangan Ansar Kec. Belitang yang pada tahun 2012 sudah menyalurkan 1.340 anakan salak pondoh dan sudah disalurkan kepada poktan Sepulau Raya di Ensalang.

Balai Benih Tanaman Pangan di Desa Landau Kodah juga berperan penting dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi Petani Penangkar Benih Padi di Timpuk yang pada tahun 2012 sudah memproduksi 25.000 kg Benih Padi Unggul Var. Ciherang. Pada Tahun 2013, PBT Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura juga berperan penting dalam mengawasi Penangkar Benih Padi pada Kelompok Tani Harapan Bahagia di Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu yang memproduksi benih unggul padi varietas Inpari. Melalui Balai Benih Tanaman Pangan akan dibantu sarana dan prasarana untuk pengemasan benih, alat pembersih benih dan pengukur kadar air pada benih tersebut. Balai Benih Tanaman Pangan tidak bisa memproduksi benih padi sendiri tanpa adanya kerja sama dengan petani penangkar karena keterbatasan lahan dan irigasi.

Desa Tenun (Kab.Sambas)

Dusun Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas merupakan sentra dari kerajinan tangan berupa kain tenun khusus Sambas. Berbagai motif yang telah dihasilkan oleh para penenun yang keseluruhannya adalah kaum ibu di desa Sumber Harapan. Tidak kurang dari ratusan motif kain yang sudah dihasilkan oleh para pengrajin kain tenun Sambas ini. Kain Tenun Sambas yang biasa disebut " Kain Lunggi " atau Kain Benang Emas karena salah satu bahan yang digunakan adalah benang emas berwarna kuning emas. "Kain tenun Sambas memang masih belum banyak dikenal orang. Keistimewaan kain tenun Sambas ini karena memiliki 2 unsur motif yang berbeda seperti unsur china pada motif mawar dan unsur Islam pada motif geometrik.

Program yang telah dirintis semenjak tahun 2010 telah membantu perekonomian masyarakat khususnya bagi para pengrajin tenun, dari segi kualitas tenun ikat sambas tentunya telah mengalami perubahan yang sangat baik, serta memiliki berbagai varitas kualitas yang banyak. Dengan tuntutan konsumen para pengrajin harus berpikir lebih inovatif dalam membuat kain tenun ikat ini, tidak hanya dari segi motif, namun juga kepada produk itu sendiri. Yang artinya kain tenun ikat tersebut dibuat tidak hanya berbentuk lembaran kain saja , namun juga dibuat peci, sabuk, selendang, sarung bantal, dan lain-lain.

Dengan adanya desa tenun, akan memfokuskan daerah wisata kabupaten sambas khususnya kain tenun. Jadi wisatawan yang berkunjung sudah terarah untuk mencari tenun sambas. Tak hanya itu untuk melestarikan tenun sambas kini SMA/SMK di sambas memasukkan ekstrakurikuler tenun. Selain itu pemerintah daerah kabupaten sambas juga mewajibkan pejabat daerah, pegawai negeri, dan para pelajar untuk memakai tenun ikat sambas pada hari kedinasan minimal seminggu sekali.

Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (MINAPOLITAN) (Kab.Sambas)

Minapolitan merupakan program nasional yang pertama kali digulirkan dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2010. Kabupaten sambas menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi *pilot project* konsep minapolitan yang tersebar di 33 provinsi di tanah air yang dipilih sebagai pusat pengembangan minapolitan satu-satunya di Kalimantan Barat. Untuk mendukung berjalannya program ini dan sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) mengkaji pengembangan kawasan minapolitan di pesisir pantai khususnya kawasan pesisir Kabupaten Sambas.

Mengupayakan peningkatan dan pembentukan produksi sentral minapolitan dari hulu ke hilirnya termasuk sistem pemasaran , sehingga semua potensi minapolitan di Kabupaten Sambas dapat dikelola dengan baik dan menjadi sektor unggulan. Program ini dilaksanakan di Kecamatan Pemangkat, Jawai, Jawai Selatan dan Tangaran karena sebagian besar mata pencarian masyarakat di daerah tersebut adalah dari budidaya perikanan. Mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan desa dan kota dan berkembangnya system dan usaha minabisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan Minapolitan.

Sambas Bersanding (Sambas Berswasembada Daging) (Kab.Sambas)

Program rintisan Dinas Pertanian dan Peternakan ini mulai dilaksanakan tahun 2012. Hal ini didasari atas Peningkatan permintaan daging sapi dalam negeri merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi usaha peternakan dalam negeri. Peluang dengan terbukanya pasar domestic yang luas sedangkan tantangannya adalah produk daging impor akan sangat mudah untuk masuk ke pasar domestic. Selama ini kebutuhan daging dalam negeri dipasok dari daging sapi lokal, daging sapi impor dan dari impor daging beku. Kebutuhan daging mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan terjadinya perubahan pola konsumsi konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan dengan mutu yang tinggi.

Program ini berjalan dikecamatan Sambas, Subah dan Galing, sebabsebagian besar masyarakat diketiga kecamatan tersebut bermata pencarian dari ternak khususnya ternak sapi. Pemerintah daerah memberikan bantuan sapi betina kepada peternak selanjutnya peternak memelihara sapi tersebut hingga melahirkan. Adapun cara yang dilakukan peternak dengan Insiminasi Buatan (IB) yang dilakukan oleh dinas Peternakan dan selalu dicek kesehatan sapi selama kehamilan agar mengurangi kematian pada anak sapi. Dengan adanya Sambas Bersanding diharapkan dapat mencukupi konsumsi masyarakat sambas khususnya daging sapi serta mewujudkan kesejahteraan peternak.

Swasembada Daging Sapi (Kota Singkawang)

Merupakan program dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota singkawang sejak tahun 2008. Permintaan terhadap bahan pangan mengalami peningkatan seiring bertumbuhnya jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan produksi pangan karena pertumbuhan penduduk berdasarkan deret angka sedangkan pertumbuhan produksi pangan berdasarkan deret ukur. Minimal mencukupi 90% dari kebutuhan daging khususnya di kota singkawang.

Memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha budidaya pembiakan dan penggemukan sapi local. Selain daging masyarakat juga dapat memanfaatkan pengolahan limbah kotoran sapi untuk menambah penghasilan sehari-hari berupa pupuk kompos dan memanfaatkan biogas sebagai bahan bakar pengganti gas elpiji guna menghemat pengeluaran belanja rumah tangga. Sedangkan tujuan dari program ini adalah Menyediakan ketersediaan bakalan dan daging yang berasal dari sapi local. Menggolah limbah agar tidak tercemar, mengurangi penggunaan pupuk kimia, ramah lingkungan.

Hutan Kemasyarakatan (Kab. Sekadau)

Kabupaten Sekadau memiliki potensi sumber daya hutan yang masih cukup besar dan memadai dengan luas 5.444,3 KM², berdasarkan data tersebut sumberdaya hutan berupa kayu dan hasil hutan non kayu jika dikelola dengan baik dan benar maka akan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekadau. Untuk itu Kabupaten Sekadau Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial dalam pengelolaan hutan.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan program ini adalah Dusun Meragun karena terletak dikawasan sekitar hutan dan telah secara turun temurun kehidupannya bergantung dari sumber daya hutan dan lahan. Sejak tahu 2008 dilakukan sosialisasi HKM didusun Meragun dan dari tahun 2009-2010 dilakukan pendampingan sehingga terbentuk kelompok tani HKM Beganak dengan 6 Kelompok Kerja dan 174 orang anggota. Dari kegiatan ini pada tahun 2011-2013 sudah muli memperlihatkan kemajuan itu dapat dilihat dari hasil panen yang dijual oleh para kelompok tani tersebut. Mereka sudah dapat menjual karet dalam bentuk kepingan 8,5 Kg per hari, cabe sebanyak 20 Kg perbulan, durian sebanyak 375 buah per tahun dan jengkol sebanyak 175 kg per tahun.

Dari data tersebut tentu saja sudah dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil olahan sumberdaya hutan. Dan Pemerintah Daerah juga terus memberikan bantuan baik itu berupa bantuan dana maupun bantuan bibit yang diharapkan dapat menjadi stimulant bagi para petani untuk dapat lebih meningkatkan lagi hasil panen mereka.

Pembinaan Maksimal Berkelanjutan bagi UKM dan Koperasi Berbasis Kekeluargaan dan Persahabatan. (Kab. Sintang)

Patut diacungi jempol memang program dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop & UKM) Kab.Sintang dalam melakukan pembinaan bagi koperasi dan UKM di Kab.Sintang.Betapa tidak, akhir-akhir ini di Kab.Sintang begitu banyak koperasi atau pelaku usaha kecil yang bangkit dan berprestasi. Dengan visi Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, membentuk UKM dan koperasi yang berdaya saing dan unggul serta memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, Pemkab Sintang melalui Disperindagkop & UKM terus melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi dan pelaku UKM yang tersebar di Kab. Sintang.

Adapun mekanisme program pembinaan yang dilakukan dimulai dari pembinaan teknis.Pembinaan teknis dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan (baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional) untuk pengembangan UKM dan Koperasi bagi pelaku UKM dan Koperasi. Disamping itu, Disperindagkop & UKM Kab. Sintang melalui Kabid Koperasi & UKM juga selalu aktif mendatangi pelaku UKM dan Koperasi yang merupakan binaan mereka serta melibatkan pelaku UKM dan Koperasi yang dinilai aktif dan berprestasi untuk ikut di event-event mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

Khusus untuk penyaluran Kredit Pinjaman Lunak, Disperindagkop & UKM melalui bidang Koperasi & UKM mencari dengan cara mendata dan mendatangi koperasi dan pelaku UKM yang dinilai sehat dan produktif, dari semua proposal pinjaman dana yang masuk beserta kelengkapan syarat-syarat lainnya. Setelah terdata, Koperasi dan UKM yang sehat dan produktif tersebut, selanjutnya diberi pinjaman dana bergulir yang memang dianggarkan di APBD. Karena anggaran di APBD tersebut dinilai terbatas, Disperindagkop kemudian mensiasatinya dengan menggaet pihak ketiga (dalam hal ini BUMN yakni PT. Telkom) untuk penambahan akses modal usaha bagi koperasi dan UKM. Khusus Kredit Pinjaman Lunak dari APBD, diberikan tanpa agunan. Adapun suku bunga, standar minimum yaitu 6% per tahun (3% per semester-0,5% per bulan) dengan lama tempo peminjaman maksimal 36 bulan (3 tahun).

Adapun Pinjaman Kredit Lunak dari APBD yang disalurkan sebagai salah satu bentuk binaan bagi pelaku UKM dan Koperasi pada tahun 2011 s.d. 2012 yaitu berjumlah Rp. 600.000.000,-, sedangkan dari PT. Telkom pada tahun 2012 sebesar 1,946 M.

Pembinaan dan bantuan khusus bagi pelaku Koperasi Tenun Ikat dan kerajinan khas Kab. Sintang juga dilakukan hingga tingkat pemasaran. Mulai di Kab. Sintang di Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak Sintang kerjasama dengan Rumah Betang Kobus, Provinsi di Rumah Adat Dayak Jl. Sutoyo dan Dekranasda Prov. Kalbar di Jl. A. Yani, tingkat nasional dan internasional di Threads of Life di Ubud, Bali kerjasama dengan Yayasan Pecinta Budaya Beali (YPBB).

Disamping itu, untuk tenun ikat dengan pewarna alami, Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM) dengan basis produksi melingkupi 44 Dusun, 30 Desa berada dalam 6 wilayah Kecamatan di Kab. Sintang dengan 1412 anggota, yang merupakan binaan Disperindagkop & UKM Kab. Sintang, juga melakukan budidaya untuk pelestarian tanaman-tanaman yang merupakan bahan dasar untuk pewarna alami tenun ikat seperti Mengkudu (*Morinda sp*), Tarum/Nila/Indigo (*Indigofera*) dan Emarek/Marek/Marik (*Symplocos*). Budidaya pelestarian ini bekerjasama dengan NGO Non Timber Forest Products-Exchange Program (NTFP-EP), Craft Kalimantan Network (CKN) didukung oleh Cordaid.

Adapun output dari program pembinaan ini antara lain; 1) Koperasi Kredit Bina Masyarakat (Kopdit Bima www.cubima88.com) yang merupakan binaan Kadisperindagkop & UKM Kab. Sintang memperoleh penghargaan koperasi simpan pinjam berprestasi tingkat nasional dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. tahun 2013, 2) jumlah tunggakan menurun cukup signifikan. Di tahun 2011: 11,42% dan di tahun 2012; 5,54%., 3) Pada tahun 2013 Disperindagkop & UKM Kab. Sintang memperoleh bantuan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Hidrasi (PLTH) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah, di mana bantuan tersebut hanya diberikan bagi 4 koperasi di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah di Kab. Sintang.

1. Program Inovasi Kelurahan (PIK) (Kota Pontianak)

Kota Pontianak menjalankan Otda dengan cara membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Contoh kasus dalam Kehidupan Ekonomi Lokal untuk indikator Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Kota Pontianak mengembangkan suatu program inovatif bagi masyarakat Pontianak di setiap kelurahan.

Program Inovasi Kelurahan (PIK) salah satunya. Ide PIK dilahirkan dari kontradiktif akan program keseragaman yang selama 32 tahun diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia dari tingkat Provinsi hingga kelurahan. Bagaimana suatu program akan berhasil jika menyamaratakan latar belakang, kebutuhan dan potensi daerah. Banyak program besar dari Pempus menjadi mubajir.

Disini PIK berperan besar mengusung konsep potensi daerah otonom. Disadari bahwa setiap kelurahan di Kota Pontianak memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Program ini dimaksudkan untuk menghasilkan kekuatan parameter Otda berdasarkan potensi di wilayah terkecil daerah otonom. Sehingga permasalahan dan kebutuhan dasar

masyarakat di lingkungan kelurahan dapat dijejaki tercipta kemandirian dan keunikan berbasis potensi lokal dan didukung dengan kelebihan teknis yang dimiliki SKPD (lintas sektor).

Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan program dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan masyarakat/kelompok masyarakat. Lurah dilibatkan dalam proses pelebagaan, prinsip dan prosedur, serta pengembangan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan PIK di tingkat kelurahan. Lurah juga berperan sebagai ketua tim pelaksana kegiatan di kelurahan yang akan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan inisiasi kegiatan dengan kelompok masyarakat dan SKPD Lintas Sektor.

Sumber dana berasal dari DPA Kelurahan dan SKPD -- Rp. 815.000.000.-/tahun. Dana bersumber dari swadaya masyarakat dikelola secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan, partisipasi dunia usaha atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat diserahkan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat setempat (LPM).

PIK meningkatkan potensi ekonomi rakyat, seperti: pengelolaan potensi perikanan keramba di Parit Mayor, peningkatan pendapatan keluarga melalui budidaya rumput hias di Sungai Jawi, pemanfaatan lahan tidur sebagai sentra sayur di Kota Baru, pembinaan kelompok *home industry*/UKM di Bansir Laut dan pengelolaan unit pasar pagi di Mariana. PIK merespon permasalahan kelurahan, antara lain: pengelolaan bank sampah dan air bersih di Siantan Tengah, penanganan limbah komersial dan pembinaan UMKM di Siantan Hilir, serta penanganan kawasan genangan melalui pembuatan biopori di Sungai Jawi Dalam.

2. Swasembada Beras (Kab. Kubu Raya)

Program swasembada beras merupakan program dambaan pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Masyarakatnya dalam upaya menciptakan ketahanan pangan nasional di wilayah Kalimantan Barat. Dari latar belakang historis dan geografis, kawasan kabupaten ini memiliki potensi sebagai penghasil palawija. Bupati Muda Mahendrawan melanjutkan potensi tersebut dan mengembangkan lahan tidur sebagai lahan cetak sawah atau dikenal dengan *Rice Eastate*.

Program ini diluncurkan sebagai reaksi kegelisahan bupati termuda di provinsi ini terhadap tingginya tingkat pengangguran masyarakat KKR. Semenjak pabrik kayu berhenti memproduksi seiring sejalan dengan keterbatasan sumber daya hutan. Begitu banyak perusahaan kayu gulung tikar berimbas kepada pemutusan kerja dan kejahatan yang meningkat. Gerakan swasembada beras merupakan solusi bijak dengan memberdayakan lahan tidur dari pembabatan hutan dan merekrut tenaga-tenaga produktif yang kehilangan kesempatan kerja.

Melalui lahan cetak sawah, pemda mengubah paradigma masyarakat dari kebiasaan lama yang langsung menikmati hasil hutan dan pabrik beralih kepada pencapaian hasil kerja melalui proses. Di mulai dari membuka lahan bekas pembabatan hutan, lahan tidur diolah menjadi kawasan pertanian. Masyarakat dilibatkan dari tahap awal atau hulu, tengah hingga hilir atau tahap pengemasan dan pemasaran. Setiap gabungan kelompok tani di suatu kecamatan diberikan keleluasaan mengembangkan industri pertaniannya sendiri yang didukung oleh laboratorium pembibitan, penanggulangan hama, mesin penggilingan skala besar, kemasan beras, dan pemasaran.

Pemasaran sistemik menjadi program unggulan pemda. Hasil produksi beras yang melimpah tidak diimbangi dengan penguasaan pasar menghancurkan mimpi KKR. Kebijakan bupati dikeluarkan dengan cara mewajibkan seluruh PNS membeli beras lokal. Tidak hanya pemasaran sistemik, berbagai upaya pemasaran dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui kerjasama dengan bulog untuk beras miskin, pemasaran di supermarket seperti carefour dan sasaran diarahkan ke pasar ibukota provinsi (Pontianak) yang dikuasai oleh beras impor. Usaha ini sangat menyita waktu, tenaga dan biaya.

Namun berkat usaha yang keras, pemda KKR berhasil mengatasi permasalahan pemasaran, bahkan mereka bisa menyalurkan hasil panen dari kabupaten lainnya yang belum mampu menguasai pasar. Pemasaran beras lokal didukung oleh kegiatan sosialisasi dan promosi di media televisi, cetak, parade, pameran, seminar, pertunjukan seni dan sebagainya.

PRAKTIK CERDAS TEMUAN MONITORING DAN EVALUASI OA 2013 PONTIANAK POST INSTITUTE OF PRO-OTONOMI

PELAYANAN KESEHATAN

Peningkatan Pelayanan Tenaga Kesehatan (Kab. Bengkayang)

Luasnya wilayah perkecamatan kabupaten Bengkayang menjadi tantangan berat pemerintah kabupaten. Tak hanya itu akses untuk menuju kesuatu kecamatan sangat jauh dan sebagian besar akses jalan yang sangat jauh/terpencil. Banyak sekali tenaga kesehatan (PTT) yang sudah ditempatkan tidak betah dan pulang begitu saja. Untuk itu pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan mengambil kebijakan untuk membuka beasiswa kepada putra/putri daerah masing-masing kecamatan untuk disekolahkan menjadi tenaga kesehatan. Program ini dimaksudkan agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang beralasan tidak betah dikarenakan tempat mereka bekerja merupakan kampung halaman sendiri.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak universitas melakukan negosiasi untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan kelas khusus tenaga kesehatan kabupaten bengkayang sebanyak 46 orang Bidan dan 9 orang dokter gigi. Adapun tenaga kesehatan tersebut diseleksi melalui masing-masing kecamatan guna mencukupi tenaga kesehatan dimasing-masing kecamatan.

Dengan program diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan dimasing-masing kecamatan. Dan nantinya tenaga kesehatan tersebut akan dijadikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditiap kecamatan dimana mereka berasal. Tak hanya itu pemerintah kabupaten juga membuat perjanjian kepada setiap orang tua agar setelah selesai anak-anak mereka mengemban pendidikan tidak menuntut untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dan sebanyak 40 orang bidan telah selesai mengemban pendidikan. Program ini sendiri telah berjalan sejak tahun 2011.

Jaminan Kesehatan Daerah Mengukur Jumlah Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu (Kab. Bengkayang)

Semenjak tahun 2011 hingga tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menjalankan Jaminan Kesehatan Daerah sebagai alat untuk mengukur jumlah kesehatan masyarakat yang kurang mampu di Bengkayang. Sebagai upaya pemerintah daerah kabupaten Bengkayang untuk menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat di kabupaten Bengkayang yang belum terdaftar dalam jaminan pemeliharaan di jamkesmas, askes, jamsostek maupun asuransi lainnya, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dapat memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten Bengkayang.

Apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam Jamkesda dan mengalami sakit, masyarakat tersebut dapat langsung menuju puskesmas terdekat guna melakukan pemeriksaan. Apabila memerlukan pelayanan tingkat lanjut pasien dapat langsung dirujuk ke RSUD yang telah bekerjasama dengan Pemkab Bengkayang dengan penangan kelas III. Dan pihak keluarga dapat mengurus surat dan syarat untuk menjadi peserta Jamkesda. Setelah persyaratan lengkap pasien tersebut langsung diproses menjadi peserta Jamkesda dengan tanda bukti berupa kartu peserta Jamkesda.

Dengan penerbitan kartu peserta Jamkesda ini selain memberikan perlindungan koprehensif kepada masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan, tetapi secara tidak langsung dapat menghitung jumlah masyarakat kurang mampu yang dapat hidup sehat. Karena tidak semua masyarakat yang kurang mampu memiliki pola hidup yang tidak sehat. Terbukti dari jumlah seluruh masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Bengkayang berjumlah 9.910 jiwa, tetapi yang mengalami sakit sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebanyak 3.379 jiwa masyarakat yang kurang mampu menggunakan Jamkesda.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ Jamban & Penyediaan Sarana Air Bersih

Program yang sudah berjalan semenjak tahun 2009 ini Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah. Pencapaian dilakukan melalui perbaikan kesehatan termasuk perilaku hidup keluarga yang sehat. Desa Raba dengan jumlah 477 kepala keluarga sebelum program STBM hanya 201 KK atau 42% yang sudah memiliki jamban yang layak. Sebagian besar masyarakat masih memiliki kebiasaan buang air besar disembarang tempat yaitu sungai, hutan dan kebun.

Berdasarkan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan ADB (Asian Development Bank) yang akan mendukung upaya pemerintah mengurangi berbagai permasalahan dan keterbatasan yang berkaitan dengan pelayanan air minum dan peningkatan pelayanan kesehatan baik di pedesaan maupun perkotaan. Keterbatasan pelayanan air bersih pedesaan di Kab. Landak hal ini yang mendorong Pemkab Landak untuk mengirimkan peminatan kepada pemerintah pusat. Ada beberapa persyaratan untuk suatu daerah bisa mendapatkan bantuan tersebut. Salah satu desa yang memenuhi kriteria adalah desa Raba di Kecamatan Menjalin, pada awalnya hanya dibangun Hidran umum dan Keran Umum kemudian melalui musyawarah desa dirubah menjadi sambungan rumah, dimana setiap warga yang menggunakan jasa air bersih ini dikenakan biaya sebesar Rp.5000,- /bulan. Yang nantinya uang tersebut digunakan untuk pemeliharaan jaringan air bersih.

Dimulai ditingkat kabupaten dimana dinas kesehatan melatih seluruh tenaga sanitasi puskesmas setelah itu bersama-sama dengan konsultan melakukan pemucuan ke semua desa sasaran. Setelah dilakukan pemucuan didesa dan terpilih natural leader di masing-masing desa maka selanjutnya melakukan pelatihan terhadap natural leader di kabupaten. Setelah mendapatkan pelatihan dikabupaten maka setiap kader tadi kembali ke daerah untuk melakukan pemucuan terhadap masyarakat didesa masing-masing, dinas kesehatan dan pihak puskesmas hanya melakukan pendampingan.

Ditingkat kabupaten masing-masing desa merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai perkiraan target desa yang akan dicapai. Hasil perencanaan dan perhitungan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Provinsi Kalbar untuk diteruskan kepada kementerian kesehatan. Setelah desa penerima bantuan telah ditetapkan maka proses pengerjaan dapat dilaksanakan oleh desa.

Kini Sudah 100% masyarakat desa raba memiliki jamban permanen dan pola hidup telah berubah menjadi pola hidup yang sehat. Masyarakat sudah dapat mengkonsumsi air bersih yang memenuhi syarat kesehatan serta berkurangnya angka insiden penyakit diare di desa tersebut.

Klinik VCT Puskesmas (Kab.Landak)

Puskesmas yang terletak dikaecamatan Mandor kabupaten Landak ini sudah mulai dirintis semenjak tahun 2009 dan masih terus berjalan hingga sekarang. Ditemukannya dua kasus HIV positif di kecamatan Mandor (tetapi penderita tersebut malas untuk berobat kerumah sakit dengan alasan jarak yang cukup jauh), hal ini yang membuat dinas kesehatan kemudian mulai melatih tenaga – tenaga kesehatan di puskesmas tersebut khususnya untuk penanganan orang dengan HIV positif dan orang yang menderita AIDS.

Langkah selanjutnya dibuatlah klinik VCT pada puskesmas di Kecamatan Mandor. Selain itu tenaga puskesmas juga membangun jaringan dengan para PSK dan waria. Hal ini bertujuan agar mempermudah pihak puskesmas mendapatkan informasi, baik informasi tentang teman-teman mereka yang mengidap HIV positif untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sampai informasi ketersediaan obat karena jaringan yang dibangun tidak hanya dengan PSK dan waria di Kecamatan Mandor saja bahkan sampai ke kotamadya Pontianak.

Memberikan penyuluhan kepada para PSK dan waria, kemudian apabila dari penyuluhan yang telah dilakukan ada yang ingin melakukan konseling lebih dalam mengenai HIV & AIDS maka mereka bisa datang ke puskesmas, apabila pasien ingin melakukan pengecekan darah maka akan dilakukan oleh tenaga medis dari puskesmas, jika ternyata pasien itu positif HIV maka akan mendapatkan penanganan dari puskesmas sampai batas kemampuan tubuh mereka. Pelayanan tidak hanya sebatas dilakukan di puskesmas saja tetapi juga dengan jemput bola, baik itu ke daerah lokalisasi, kerumah-rumah juga ke sekolah-sekolah. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak puskesmas tidak membebankan biaya kepada pasien (GRATIS). Hasil yang telah dicapai hingga tahun 2013 adalah semakin menurunnya jumlah orang yang ditemukan HIV hanya sebanyak 2 orang saja mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kader Kesehatan Jiwa (Kab.Sekadau)

Penderita gangguan jiwa berat di kabupaten Sekadau diperkirakan di atas estimasi Riskesdas tahun 2007, yakni lebih dari 193 orang. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Kesehatan menjalankan suatu program yang melibatkan masyarakat untuk menjadi Kader kesehatan jiwa, program ini sendiri sebenarnya adalah pengembangan dari Community Mental Health Nursing (CMHN).

Pembentukan kader ini sendiri bertujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa, Dinas Kesehatan sendiri telah melaksanakan berbagai pelatihan penanganan pasien gangguan jiwa. Kegiatan ini dilakukan karena Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya mengandalkan tenaga medis. Tenaga non medis, seperti kader kesehatan jiwa dari masyarakat umum di tiap Puskesmas juga dilibatkan agar bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan gangguan jiwa.

Upaya penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sekadau sudah cukup optimal. Pemerintah daerah juga berjanji akan tetap memberikan dukungan, pemerintah daerah sudah melengkapi berbagai fasilitas untuk menangani warga dengan gangguan jiwa. Termasuk didalamnya menyediakan shelter atau rumah singgah atau pun Puskesmas untuk penanganan kesehatan jiwa dan kini pemerintah daerah Sekadau sedang membangun puskesmas khusus bagi penderita gangguan jiwa. Program pembentukan kader ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2010 dan hingga saat ini jumlah kader yang ada terus bertambah.

3 Nol 4 Seratus (Kab. Landak)

Dinas kesehatan Kabupaten Landak melaksanakan program ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM). Menurut dinas kesehatan Kabupaten Landak untuk mencapai IPKM yang baik maka ada 3 indikator yang harus nol atau dituntaskan penanganannya yaitu, Prevalensi Gizi Buruk & Kurang, Prevalensi Balita Sangat Pendek & Pendek dan prevalensi Balita Sangat Kurus & Kurus.

Sedangkan ada empat indikator yang pencapaiannya harus 100% yaitu, persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan neonatal (0-28 hari), imunisasi lengkap, penimbangan balita, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan itu adalah melaksanakan penimbangan seluruh balita diwilayah Kabupaten Landak dengan melakukan sweeping ke rumah-rumah karena penimbangan balita menjadi salah satu indikator penilaian IPKM dengan alasan apabila seluruh balita ditimbang setiap bulannya diposyandu, berarti peran serta masyarakat terhadap kesehatan berjalan dengan baik, ibu hamil, bayi dan balita dapat terpantau kesehatannya.

Kasus gizi buruk dapat terdeteksi lebih dini sehingga dapat dengan cepat ditanggulangi. Selain itu juga melaksanakan lokakarya mini di setiap Puskesmas bersama-sama dengan camat, tokoh masyarakat dan Kader kesehatan. Program ini baru berjalan pada pertengahan tahun 2013.

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Kab. Sambas)

Untuk meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Dinas Kesehatan membuat suatu kebijakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten sambas baik yang mampu maupun yang tidak mampu dari segi ekonomi. Adapun pelayanan Jamkesda hanya menanggung pengobatan rawat inap masyarakat Sambas di kelas III, baik di rumah sakit umum daerah Pemangkat, maupun Sambas.

Untuk mendapatkan pelayanan ini, masyarakat cukup dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP), sudah bisa dilayani. Warga Kabupaten Sambas tidak perlu takut untuk berobat karena tak ada biaya. Sebab dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk rawat inap di seluruh puskesmas maupun di Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Program ini sudah berjalan sejak tahun 2010 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak. Adapun yang menjadi payung hukum dari program ini adalah SK Bupati No 74 Tahun 2011 Ttg Penunjukan PT. ASKES Dalam pengelolaan Jamkesda Masyarakat Sambas dan SK Bupati No 202 Tahun 2012 ttg Pembentukan Tim Koordinasi Program Jamkesda 2012.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Kemitraan Bidan dan Dukun (Kota Singkawang)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara benar kepada bayinya akan menurunkan angka kesakitan dan kematian anak serta meningkatkan kualitas hidup ibu. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesehatannya memiliki perhatian yang tinggi dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang berlangsung di Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada. Utamanya dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi lahir.

Adapun intervensi yang dilakukan yaitu memfokuskan pada penguatan manajemen pada tiga aspek manajemen yaitu: (i) *manajemen organisasi*, terutama perencanaan dana bantuan operasional kesehatan yang lebih efektif kepada pelayanan PA, IMD dan ASI Eksklusif yang lebih partisipatif dan transparan; (ii) *manajemen program*, meliputi Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun yang lebih tranparan dan akuntabel serta Monitoring Persalinan Aman yang efektif (misalnya melalui revitalisasi kantung persalinan); (iii) *manajemen layanan*, yang lebih akuntabel dan responsif melalui penyusunan SOP tehnis, SOP alur, SOP penanganan pengaduan, dan maklumat layanan yang lebih akuntabel dan responsive.

Dengan program kemitraan bidan dan dukun, dimana ke-22 orang dukun beranak yang teridentifikasi di wilayah Singkawang Selatan seluruhnya sudah melakukan kerjasama dengan baik dengan bidan Puskesmas. Dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh pemuka masyarakat, dukun yang merujuk ibu hamil ke Puskesmas akan mendapat insentif sebesar Rp 25,000, dan mendapat tambahan Rp 25,000 jika juga mendampingi atau mengantar persalinan ke bidan atau Puskesmas.

Kajian global telah membuktikan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan intervensi kesehatan yang memiliki dampak terbesar terhadap keselamatan balita, yakni 13% kematian balita dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat mencegah 22% kematian neonatal (neonatus adalah bayi

usia 0 sampai 28 hari). Selain itu juga terdapat praktek menarik lain yang berlangsung di Puskesmas Singkawang Selatan adalah penerapan inovasi kantong IMD atau inisiasi menyusui dini, kantong ASI Eksklusif, dan Kantong BGM. Kantong IMD merupakan kantong yang berisi informasi bayi yang lahir dan mendapatkan proses IMD, serta berapa lama waktu IMD serta catatan alasan berhentinya IMD, sedangkan kantong ASI eksklusif adalah kantong yang berisi informasi bayi yang menjalani ASI eksklusif dan dimonitor sampai bayi berusia 6 bulan.

Sementara kantong BGM atau bawah garis merah adalah kantong yang berisi informasi bayi balita yang timbangannya kurang dari standar, sehingga bayi dan balita ini dapat dimonitor ataupun mendapatkan penanganan khusus dalam upaya memperbaiki/menaikkan berat badannya. Kantong-kantong tersebut memudahkan petugas dalam proses pemantauan. Adanya kantong-kantong itu juga akan memotivasi petugas untuk tetap melakukan monitoring. Tidak akan ada kasus BGM di bawah 1 tahun atau 6 bulan kalau sejak awal optimal mendorong pemberian ASI eksklusif. Telah berjalan sejak April 2011.

Rumah Sakit Sayang Anak (Kab.Ketapang)

Program ini di latar belakang oleh minimnya tingkat kenjungan pasien melahirkan di RSUD Dr Agoesdjarm. Pasalnya RSUD milik Pemerintah Kabupaten Ketapang ini hanya memiliki satu ruangan untuk anak, baik yang baru melahirkan atau anak yang sedang di rawat karena sakit. Melihat kondisi ini, manajemen RSUD Agoesdjarm akhirnya membuat program inovasi dengan cara memisahkan antara ruangan perawatan anak yang sedang sakit dengan bayi yang baru lahir.

Apabila sebelumnya fasilitas perawatan anak serta ruangan di jadikan satu dengan ruangan perinatalogi. Akibatnya masyarakat anggan berkunjung. Namun setelah di bentuk tim, kemudian ruangan perawatan anak yang sakit dan ruangan perinatalogi di pisah, respon masyarakat cukup baik. Di rawat anak misalnya, sudah ada pemisahan antar-jenis penyakit. Tidak hanya itu, ruang rawat anak juga sudah ada kelas-kelas dan di lengkapi dengan fasilitas medis yang memadai.

Selanjut di ruang perenatalogi juga lebih lengkap bila dibandingkan dengan sebelum di pisah ruangnya. Kemudian semua perawat diwajibkan mendampingi ibu yang baru melahirkan saat memberikan ASI. Fungsi pendampingi ini, pertama untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan makanan pasca melahirkan. Kedua mematahkan metos yang selalu menjadi halangan bagi ibu yang baru hamil. Contoh misalnya, tidak boleh makan ikan tertentu setelah melahirkan.

Melalui program ini, RSUD Dr Agoesdjarm berhasil memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang, tentang fasilitas dan pelayanan di ruangan anak/bayi. Buktinya, tingkat ibu melahirkan yang melakukan persalinan di RSUD Dr Agoesdjarm mulai meningkat. Bahkan warga Tionghoa yang sebelumnya enggan untuk melahirkan bayi di RSUD milik pemerintah itu, tapi kini justru lebih percaya dan mau melakukan persalinan di RSUD Dr AGoesdjarm.

Puskesmas Berstanda ISO (Kab.Ketapang)

Puskesmas Tuan-Tuan merupakan Puskesmas yang sudah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Kota Ketapang yang merupakan suatu pendekatan

sistem yang telah diakui secara internasional` dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat. Profil ini memberikan gambaran situasi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan selama tahun 2012, dimana penyajiannya dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga lebih mudah di pahami.

Diharapkan data dan informasi yang tersedia dalam profil ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang berdaya guna bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Wilayah kerja Puskesmas Tuan Tuan terletak di kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada tahun 2012 terdiri dari 11 desa, keseluruhan jumlah penduduk 34.944 jiwa dengan persentase penduduk terbanyak di Kelurahan Mulia Kerta 6663 jiwa (19,07 %) dan persentase penduduk terkecil 1033 jiwa (2,96 %) di desa Banjar.

Tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas Tuan Tuan bervariasi dari yang buta huruf, tidak tamat SD, tamat SD, SLTP, SLTA, D3,S1 dan S2 , persentase penduduk yang buta huruf 395 jiwa dan 34 jiwa berpendidikan S2. Urutan tingkat pekerjaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas Tuan Tuan terbanyak adalah petani dengan persentase 53 % dan terkecil 2,2 % sebagai pedagang.

Berdasarkan data peran serta masyarakat sudah baik dengan banyaknya sebagian masyarakat sudah tergabung dan berperan serta secara aktif di organisasi lingkungan yang berwawasan kesehatan dan jumlah kader maupun kemitraan dukun sudah aktif berperan dalam membantu pelayanan kesehatan di masyarakat dengan catatan kegiatan kemitraan dukun sudah dilaksanakan tetapi perjanjiannya bersifat tertulis dari desa dan pihak puskesmas belum dilakukan karena ada beberapa hal teknis yang belum di wujudkan.

Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di wilayah kerja puskesmas Tuan Tuan memiliki 36 posyandu Balita dan 13 posyandu Lansia tersebar di seluruh desa / kelurahan kecuali desa Negeri Baru yang belum terbentuk posyandu Lansia. Puskesmas Tuan Tuan menaungi 4 puskesmas pembantu, 2 polindes dan 4 poskesdes yang tersebar pada daerah tertentu sedangkan jumlah tenaga baik admimistrasi, tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya yang terkait dalam kegiatan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas Tuan Tuan sebanyak 66 orang disertai dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan baik.

Urutan penyakit terbesar pada tahun 2012 yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tuan Tuan sebagian besar pada penyakit Common Cold / Nasopharingitis Akut dengan 2893 orang dan yang terkecil 395 orang dengan gangguan gigi dan jaringan peyangga lainnya. Upaya Promosi Kesehatan mengalami peningkatan dalam penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penyuluhan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) didesa sudah memenuhi target 100 %. Program kesehatan lingkungan berdasarkan data tempat pengelolaan makanan berjumlah 34 dan tempat – tempat umum / industri berjumlah 133 yang sebagian besar TPM sudah dilakukan pemeriksaan sesuai standar kesehatan.

Program kesehatan ibu dan anak cakupan kunjungan ibu hamil K1 pada tahun 2012 mencapai target 95,5 % dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) 95 % sedangkan cakupan K4 sudah hampir mencapai target 87,8 % dari SPM 90 %. Persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan hampir mencapai target 87,8 % dari SPM 90 %, untuk

cakupan neonatus, penanganan komplikasi, BBLR, KN1, KN2, KN3 kunjungan bayi, kunjungan balita, ASI eksklusif, rujukan injeksi vitamin K dan hepatitis mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya tetapi tidak terlalu signifikan.

Program Gizi pada tahun 2012 bayi dan balita mendapatkan vitamin A pada bulan Pebruari dan Agustus sudah mencapai target 80 % sedangkan pemberian vitamin A pada ibu nifas pada tahun 2012 mengalami penurunan 7,1 % dari 94,6 % tahun 2011 menjadi 87,5 % tahun 2012. Status gizi kurang tahun 2012 bayi balita bawah garis merah (BGM) sebanyak 2,8 % (101 orang) , bawah garis tengah (BGT) 8,9 % (323 orang) mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan tahun 2011 dikarenakan tidak adanya program pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP – ASI) tetapi diganti dengan pemberian Taburia yang rasanya tidak enak dan tidak disukai anak – anak sedangkan kasus gizi buruk selama tahun 2012 tidak ada. Data ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) pada tahun 2012 cukup tinggi sebesar 8,9 % (76 kasus/orang).

Program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) terjadi peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan dan merupakan KLB (Kejadian Luar Biasa) dimana pada tahun sebelumnya hanya 4 kasus, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 83 kasus. Untuk beberapa penyakit lain, tidak ada peningkatan yang berarti.pencapaian target kesembuhan Pasien TB mencapai 85 %. Berdasarkan urutan penyakit terbesar pada tahun 2012 yaitu pada penyakit common cold/nasopharingitis akut, maka penggunaan obat terbanyak pada tahun 2012 adalah pada penggunaan obat paracetamol sebanyak 135.600 tablet.

Jumlah kunjungan pasien berdasarkan jenis pelayanannya pada tahun 2012 adalah jenis pasien askes sebanyak 8627 orang, dengan rincian pasien askes baru sebanyak 1899 orang dan pasien askes lama sebanyak 6328 orang. Pembiayaan Kesehatan untuk terlaksananya semua kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuan-tuan tahun 2012 bersumber dari dana BOK sebesar Rp 123.400.000,- Dana Jamkesmas sebesar Rp 15.538.500,- dana jasa pelayanan askes sebesar Rp.52.000.000,- dana APBD sebesar Rp 45.895.700,-. Jumlah pasien yang datang ke puskesmas yang meminta rujukan adalah jenis pasien askes sebanyak 710 orang, pasien jamkesmas sebanyak 182 orang, pasien SKTM sebanyak 497 orang, pasien umum sebanyak 194 orang, pasien jamkesda sebanyak 316 orang.

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Kab.Kayong Utara)

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kayong Utara untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa kalau berobat ke puskesmas atau rumah sakit biayanya mahal. Menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara sesuai dengan Konvensi WHO 1948. Hak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945 Setiap Peserta JAMKESDA mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar. Peserta harus menunjukkan/menyerahkan kartu Identitas Diri yang sah dari Kabupaten Kayong Utara ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemberi Pelayanan Kesehatan(PPK) adalah Puskesmas Pembantu (Pustu), Poskesdes dan Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan dalam hal ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit ruang rawat inap kelas III termasuk di Rumah Sakit Khusus. Pada kasus emergency PPK wajib memberikan yankes walaupun tidak mempunyai kartu identitas. Pada kasus berat (peserta tidak bisa bangun) dan gawat darurat (emergensi) dapat dibawa ke Puskesmas atau bisa langsung ke Rumah Sakit dengan mempergunakan ambulance yang ada di Puskesmas. Program jamkesda berlaku di RS.Agoes Djam, RB Fatima, RS. Soedarso. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sejak diberlakukan Jamkesda, masyarakat Kabupaten Kayong Utara merasa terbantu dan diperhatikan apabila menghadapi masalah kesehatan. Masyarakat juga tidak perlu takut lagi untuk berobat ke pusat layanan kesehatan. Sebab apa pun permasalahan kesehatan yang mereka hadapi, sudah pasti mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Jamkesda tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi Jamkesda diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulannya, berdasarkan keterangan dan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas cukup signifikan, karena gratis.

Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan dengan Puskesmas APUNG (Kab.Kayong Utara)

Program ini di latar berlaking karena Kabupaten Kayong Utara memiliki 104 pulau. Dari jumlah tersebut sebanyak 67 pulau terdapat penduduk. Dari jumlah pulau yang memiliki penduduk, 57 pulau berpenduduk tersebut berada di Kecamatan Kepulauan Karimata, dan 10 pulaunya berada di Kecamatan Pulau Maya. Sementara dari sisi geografis dan iklim, penduduk yang hidup di dua kecamatan tersebut menyebar. Akibatnya pelayanan kesehatan sangat jarang dilakukan karena tergantung pada iklim. Sementara ini penempatan tenaga berada pada pulau-pulau besar. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Untuk menempuh kedua kecamatan tadi, apabila berangkat dari Sukadana, harus menempuh waktu selama kurang 12 jam. Tidak hanya itu, biaya operasional mencapai Rp4.000.000 untuk satu pergi. Atas dasar itulah, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid membuat terobosan dengan cara memberikan pelayanan jemput bola dengan menyediakan kapal nelayan yang disebut Puskesmas apung.

Kehadiran Puskemas Apung sangat membantu masyarakat yang ada di pulau terpencil di Kayong Utara. Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Karimata dan Pulau Maya sungguh memperhatikan. Sebab fasilitas kesehatan ada. Tetapi medisnya yang tidak ada. Kalau pun ada tim medis, itu pun tidak pernah bertahan lama. Sejak kehadiran Puskesmas Apung, masyarakat di kedua kecamatan tersebut menjadi mendapat perhatian. Selain itu pemerintah juga bisa melakukan monitoring terhadap perkembangan kesehatan. Terakhir, dengan kehadiran Puskesmas Apung, tentunya tidak akan menguras kantong masyarakat di kedua kecamatan itu apabila mau berobat. Sebab selain pelayanan kesehatan gratis yang mereka dapatkan, fasilitas dan tenaga medis di datangkan dari Sukadana secara rutin.

Pusat Penatalaksanaan Gizi Buruk (PPGB). (Kab. Sintang)

Bahwa hampir semua negara belum bisa bebas dari permasalahan gizi buruk. Masalah gizi buruk ini sudah ada sebelum terjadi krisis multidimensi pada tahun 1997. Banyak kasus gizi buruk baik di puskesmas maupun rumah sakit berakhir pada kematian, demikian halnya di Kabupaten Sintang. Atas dasar pemikiran tersebutlah membuat Pemkab Sintang melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2001 membentuk PPGB.

Adapun mekanisme pelayanan program di PPGB antara lain;

- Diawali dari adanya rujukan kasus dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Sintang maupun dari RSUD Ade M.Djoen Sintang.
- Segala keperluan pengobatan pasien dan ibu pasien selama perawatan ditanggung oleh Pemerintah Kerja sama dengan Rumah Sakit Ade M.Djoen Sintang apabila pasien terdapat penyakit penyerta yang memerlukan perawatan khusus.
- Metode penatalaksanaan gizi buruk di PPGB dibagi menjadi 3 fase yaitu fase stabilisasi, rehabilitasi dan stabilisasi.
- Tiap fase kebutuhan gizi dan penanganannya berbeda sesuai dengan keadaan umum pasien. Ketiga fase tadi membutuhkan hari rawat maksimal 90 hari.
- Hal inilah yang membedakan penanganan gizi buruk dengan penyakit-penyakit lainnya.
- Adapun penyaluran APBD untuk PPGB yaitu:

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN
2008	441.544.000
2009	452.000.000
2010	291.474.500
2011	189.022.000
2012	207.216.000
2013	236.209.000

Program PPGB di Kab. Sintang sangat efektif dalam penanganan kasus gizi buruk. Hal itu dapat terlihat jelas dari data menurunnya kasus gizi buruk di Kab. Sintang dari tahun ke tahun. Berikut paparan datanya:

TAHUN	PASIEN	SEMBUH	PULANG PAKSA (Kehendak Keluarga)	MENINGGAL	DI RUJUK	RWT JLN
2001	14	7	5	2	0	0
2002	42	27	13	0	2	0
2003	19	18	1	0	0	0
2004	8	5	3	0	0	0
2005	21	16	3	1	1	0
2006	25	22	1	2	0	0
2007	22	17	4	1	0	0
2008	25	24	0	1	0	0
2009	35	23	6	5	1	0
2010	27	13	13	1	0	0
2011	25	8	15	1	0	0
2012	22	21	1	0	0	0
Agust 2013	17	7	6	1	1	2

Indoor Residu Spraying(IRS) (Kab. Sintang)

Dilatarbelakangi oleh upaya terobosan membebaskan kabupaten sintang dari Malaria dengan target Millenium Development Goals (MDG's) Morbiditas Malaria pada tahun 2015 sebesar 1 per 1.000 penduduk, Pemkab Sintang melalui Dinas Kesehatan merasa sangat perlu adanya terobosan untuk mereduksi masyarakat Kab. Sintang dari kasus Malaria. Pada tahun 2011, digalakkanlah program indoor residu spraying (IRS). Sasaran program ini adalah di desa-desa zona merah Malaria.

Program IRS dimulai dari pemetaan zona rawan malaria dengan melihat data pasien yang terkena malaria di Puskesmas. Selanjutnya, di zona rawan tersebut dilakukan penyemporan/pengasapan terhadap tempat-tempat yang dianggap menjadi sarang nyamuk malaria. Disamping dilakukan pengasapan, sebagai usaha preventif, dilakukan juga sosialisasi dan pembinaan lingkungan sehat bagi daerah dengan zona rawan malaria tersebut.

Hasil program IRS ini dapat dikatakan cukup efektif. Terjadi penurunan yang signifikan kasus pasien malaria di Kab. Sintang. Pada tahun 2010 terdapat 1718 pasien rawat jalan di tahun 2011 turun menjadi 294, tahun 2012 turun lagi menjadi 49, dan tahun 2013 (s.d. Agustus 2013) turun signifikan menjadi 15 pasien rawat jalan. Demikian halnya dengan pasien rawat inap, mengalami penurunan yang sangat signifikan pula. Tahun 2010: 2339 pasien, 2011: 577 pasien, 2012: 116 pasien, 2013 (s.d. Agustus 2013): 14 pasien.

PELAYANAN PENDIDIKAN

Beasiswa Utusan Daerah (Kab.Landak)

Pada rentang waktu 2013-2016 jumlah guru pensiun pada Kabupaten Landak mencapai angka \pm 65%, menyikapi hal tersebut maka dibuatlah program Beasiswa Utusan Daerah, untuk menanggulangi ketersediaan SDM khususnya tenaga pendidik mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA yang berasal dari putra/putri asli daerah yang berprestasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Landak No 9 Tahun 2011 tentang beasiswa utusan daerah program kerjasama antara pemerintah kabupaten landak dengan berbagai perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Landak telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas baik di Kalimantan Barat maupun yang berada diluar Kalbar. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Semarang, IPB Bogor, UNY Yogyakarta, UPI Bandung dan Poliseni Yogyakarta.

Program beasiswa utusan daerah bekerjasama dengan universitas negeri dan swasta dipulau jawa dan didanai melalui APBD Kab. Landak. Pada awalnya dilakukan pengumuman dan pendaftaran oleh dinas pendidikan tentang prekrutan siswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian diadakan seleksi yang dilakukan dan dipantau langsung oleh pihak universitas yang telah melakukan kerjasama, untuk pembiayaan pemondokan dan uang saku ditanggung oleh pemkab landak sedangkan biaya kuliah oleh universitas tempat dimana mahasiswa itu diterima.

Waktu yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk menyelesaikan studi paling lambat 4,5 tahun, apabila lewat dari waktu itu maka beasiswa dicabut, namun apabila mahasiswa di drop out dan melakukan kesalahan fatal maka mahasiswa bersangkutan harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemkab. Landak dan pihak universitas sebesar 200% dari biaya yang telah diterima. Mulai dari tahun pertama program ini digulirkan hingga tahun 2013 ini sudah ada sekitar 456 orang yang telah merasakan program ini sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Sekolah Hijau (Kab. Landak)

Proses belajar mengajar tidak hanya dapat dilakukan didalam ruang kelas saja, bahkan bukan tidak mungkin proses pebelajaran diluar ruangan kelas dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi para siswa.

Hal ini yang coba dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dengan harapan selain para siswa mendapatkan pelajaran pokok juga dapat menyatu dengan alam sehingga dapat lebih mencintai dan menjaga lingkungan. Pada tahun 2012 bekerjasama dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia, Dinas Pendidikan Landak menandatangani Mou untuk melaksanakan program ini dengan menunjuk sebanyak 4 sekolah model, yaitu SDN 16 Kerohok, SDN 40 Keranji Birah, SDN 05 Angan Tembawang dan SDN 15 Tebedak.

Proses awal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada guru-guru dari ke empat sekolah itu untuk dibntuk menjadi Master Teacher. Kemudian proses belajar mengajar dilakukan diluar ruangan dengan mengamati lingkungan sekitar

kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan kepada setiap siswa. Dengan menggunakan sistem belajar seperti ini minat siswa untuk belajar menjadi lebih tinggi dan siswa dapat lebih mengenal lingkungan sekitar.

Beasiswa Kepala Sekolah Berprestasi (Kab.Ketapang)

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Kalbar) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, pada kesempatan itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara Program Pascasarjana UNY dengan Dinas Pendidikan.

Menurut Mansur, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, untuk memajukan kualitas pendidikan memang perlu peningkatan para guru. Pada tahun ini Kabupaten Ketapang menyekolahkan 700 guru yang diberi beasiswa. Antara lain dengan mengirimkan mereka ke beberapa universitas, termasuk UNY. Para kepala sekolah yang dinilai berprestasi, masuk ke program S2. Para guru selanjutnya juga mendapat kesempatan pula kuliah S2.

Sesuai dengan isi MoU tersebut, pascasarjana UNY menyelenggarakan program magister (S2) bagi staf dan guru SMP/SMA/SMK di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang menyadari bahwa pendidikan ke depan perlu peningkatan kualitas SDM, maka kami menyekolahkan para guru ke S1 dan S2. MoU tersebut merupakan salah satu payung kerja sama yang melegalkan hubungan antara UNY dan Kabupaten Ketapang, sehingga ke depan bisa ditambah lagi jumlah guru untuk kuliah di UNY.

Program ini merupakan suatu awal kegiatan yang bagus Bupati menunjuk kepala sekolah untuk meningkatkan pendidikannya. Peningkatan kepala sekolah punya makna yang cukup signifikan bagi pengembangan para guru dan peserta didik, karena kepala sekolah berada di depan yang nanti akan mengendalikan satuan pendidikannya. Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Ketapang ini semoga dicontoh oleh kabupaten lain.

Pendidikan Gratis 12 Tahun (Kab.Kayong Utara)

Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, sehingga aksesibilitas rendah yang mengakibatkan angka putus sekolah relatif besar. Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga Pembiayaan Pendidikan menambah berat beban pengeluaran masyarakat (angka kemiskinan KKKU Tahun 2008 : 14,50 %) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan, dimana pendidikan tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan akan tetapi hanya sebatas keinginan (Rata-Rata Lama Sekolah KKKU Tahun 2008 : 5,6 Tahun). Tingginya Angka Buta Huruf (ABH) : Tahun 2008 ABH KKKU : 11,8 %.

Sejak di gulir tahun 2009, program ini dinilai berhasil menyadari masyarakat kalau pendidikan itu penting. Sebab sebelumnya, masyarakat Kayong Utara tidak peduli dengan pendidikan. Banyak anak-anak usai sekolah yang seharusnya tamat SD,SMP, dan SMA, ternyata tidak sekolah sebelum program pendidikan gratis 12 tahun di berlakukan. Namun setelah program itu dilaksanakan, partisipasi masyarakat Kayong Utara mulai baik. Banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya. Buktinya,

selain harus menambah banyak ruangan kelas, Dinas Pendidikan Kayong Utara harus membangun fasilitas sekolah hampir setiap tahun sejak Hildi Hamid memimpin Kayong Utara.

Awalnya banyak pihak yang menilai program gratis 12 tahun ini akan gagal. Sebab usia Kayong Utara setelah di mekarkan dari kabupaten Ketapang, dinilai masih terlalu minim. Tak hanya itu, jumlah APBD Kayong Utara tahun 2009 belum mencapai Rp500 Miliar. Namun anggapan banyak pihak itu, akhir mampu dibuktikan Pemerintah Kayong Utara dengan sukses. Buktinya sampai periode kedua Bupati Hildi Hamid, program pendidikan gratis tetap berjalan dan menjadi unggulan Kayong Utara

Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kab. Pontianak)

Ibukota Kabupaten Pontianak, Kota Mempawah, dapat dikatakan sebagai Yogyakarta-nya Kalimantan Barat di tahun 1970-an hingga 1980-an. Kota ini bersuasana tenang, berjumlah penduduk tidak padat, bermatapencarian sebagai nelayan, petani, penoreh getah, pegawai negeri sipil dan pendulang emas illegal serta berlatar belakang sebagai pusat Kesultanan Amantubillah yang sangat kental dengan adat istiadat, kekerabatan dan keagamaan. Yang harus digaris-bawahi adalah, kota ini dapat dikatakan “tidak hidup”, semenjak ia kehilangan powernya sebagai titik transit dari jalur darat antar Kabupaten/Kota di pulau Kalimantan dan kehilangan dua pertiga luas wilayahnya yang berpotensi sebagai penghasil PAD.

Untuk menghidupkan kembali kota ini, Pemda berupaya keras agar kota Mempawah dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan di Kalimantan Barat. Strategi yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan propinsi maupun pihak swasta untuk membangun pusat-pusat pendidikan seperti Universitas Islam Mempawah, SPN, IPDN, bahkan mendirikan Pusat Diklat. Selain itu, pemerintah daerah dibawah kendali Dinas Pendidikan memberikan program-program beasiswa bagi guru-guru SD-SMP-SMA untuk menyiapkan tenaga pengajar yang mampu bersaing dengan daerah lainnya di Kalbar.

Meningkatkan mutu tenaga pendidik di Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui Program Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini mengupayakan beasiswa kepada tenaga guru yang akan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyekolahkan guru-guru di jurusan-jurusan yang sangat terbatas atasu belum ada di Kabupaten ini, terutama di daerah pelosok perhuluan sungai atau pulau-pulau kecil.

Peningkatan jenjang pendidikan diberikan dengan cara mengirim mereka tugas belajar di ibukota provinsi maupun di luar Kalbar. Jenjang pendidikan lebih difokuskan kepada guru-guru D2 ke jenjang S1, dan guru-guru S1 ke jenjang S2. Sedangkan program pengembangan jurusan yang dibutuhkan, seperti pendidikan jasmani dan olah raga, pendidikan perpustakaan, pendidikan sejarah, pendidikan biologi dan fisika.

Pemriantah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas, seperti Universitas Tanjungpura, STIP, UGM, UNY dan sebagainya. Penerima beasiswa diperoleh melalui hasil seleksi terhadap calon-calon penerima beasiswa atau guru-guru yang mengajukan beasiswa. Setiap penerima beasiswa akan memperoleh biaya pendidikan, biaya buku dan biaya hidup yang disesuaikan dengan daerah dimana mereka ditugaskan.

PELAYANAN ADMINISTRASI DASAR

Implementasi Penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Kab.Bengkayang)

Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal pemerintah telah menetapkan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pelayanan dibidang perizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintah sebagai relasi antara Pemerintah dengan warganya, yang menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi *good governance* atau belum. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan usaha bagi para investor. Sasarannya adalah merampingkan dan mengkonsolidasi jumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi seorang investor untuk memperoleh izin-izin usahanya.

Pemohon datang ke loket informasi, selanjutnya pemohon akan diberikan check-list berupa form persyaratan yang diminta, setelah melengkapi persyaratan pemohon dapat menyerahkan berkas beserta form yang diberikan sebelumnya kepada petugas, apabila dinyatakan lengkap maka berkas akan diproses sesuai lama waktu yang telah ditargetkan oleh BPMPT.

Melalui pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkayang akan memperoleh kemudahan pelayanan serta mempercepat proses penyelesaian perizinan dan non perizinan. Sehingga siapapun yang akan berinvestasi di kabupaten dibengkayang akan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan terutama disektor perizinan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Kab. Sambas)

Semenjak tahun 2011 Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sambas sudah melaksanakan program ini. Berdasarkan Perbup No 7 Tahun 2009 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dalam penandatanganan perizinan kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Sejak bergesernya paradigma dari penguasa kepada pelayan, membuat kabupaten Bengkayang mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan public kepada masyarakat.

Di lain pihak terdapat pula pemerintah kabupaten/kota dari sudut anggaran dan SDM sebenarnya layak dan mampu melakukan peningkatan pelayanan public yang lebih tapi mereka tidak mewujudkannya. Pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian (*focus of interest*) yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur yang sadar dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Pemohon langsung datang dan mencari informasi tentang persyaratan izin yang akan dibuat, selanjutnya pemohon menyiapkan berkas yang menjadi syarat untuk perizinan yang akan dibuat. Selanjutnya berkas akan diproses sesuai lamanya hari kerja.

Para pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya pelayanan satu atap seperti ini, karena selain mudah masyarakat tidak lagi mengutus/menggunakan jasa untuk mengurus perizinan lagi (calo).

Persidangan Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun (Kab.Kayong Utara)

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memiliki Akta Kelahiran. Tingginya biaya proses persidangan. Masih banyaknya penduduk miskin sehingga tidak mampu untuk membayar biaya persidangan. Perubahan paradigma akan pentingnya Akta Kelahiran. Jarak tempuh yang jauh ke tempat persidangan yang belokasi di Kabupaten Ketapang.

Program persidangan penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diberikan secara Cuma-Cuma alias gratis kepada masyarakat. Namun tentunya Pemerintah Kayong Utara harus melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Ketapang melalui MoU yang di tanda tangani 15 Juni 2012. Mengapa harus melibatkan Pengadilan Negeri Ketapang? Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan dan pasal 65 ayat (1) Peratiran Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Atas dasar itu, Pemerintah Kayong Utara bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Ketapang menggelar sidang dimana pendudukan yang mengajukan berdomisili. Artinya penetapan itu di lakukan tidak di Pengadilan Negeri Ketapang. Namun tentunya pemohon yang minta di buat kan akta lahir harus memenuhi persyaratan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sesuai yang di syaratkan oleh PP 25 thn 2008 pasal 52 ayat (1) huruf a s/d h.

Untuk mensukseskan program ini, Pemerintah Kayong Utara harus menganggarkan dana di APBD tahun 2012 sebesar Rp.234.413.000. meski terlihat besar, tapi hasilnya, sebanyak 351 masyarakat benar-benar merasa terbantu dan bisa memiliki akta kelahiran secara gratis.

Pembuatan Akta Kelahiran Gratis. (Kab. Melawi)

Dilatarbelakangi sosialisasi akan pentingnya akta lahir serta Membantu meringanka masyarakat Kab. Melawi, Pemkab Melawi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sejak tahun 2009 telah menggratiskan pembuatan akta lahir bagi masyarakatnya. Secara sepintas, program ini memang terlihat sangat sederhana. Namun, yang patut diapresiasi adalah, Kab. Melawi telah berani tidak menarik retribusi (menggratiskan) pembuatan akta lahir sejak awal lahirnya Kab. ini lahir di tahun 2005. Padahal, sebagai kabupaten yang baru berdiri, toh tidak ada salahnya Kab. Melawi menarik retribusi dari pembuatan akta lahir. Tetapi Pemkab Melawi melalui Disdukcapil tidak melakukannya demi membantu masyarakat Kab. Melawi dalam mengakses dan membuat data diri paling dasar (akta lahir).

Jemput Bola Pelayanan Akta Capil (Kab. Sintang)

Mengingat banyaknya kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten Sintang (Kota Sintang), maka Disdukcapil Kab. Sintang memandang perlunya membuat inovasi dalam pembuatan akta catatan sipil untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses pembuatan akta Capil. Adapun mekanisme program ini yaitu, Disdukcapil Kab. Sintang turun ke kecamatan-kecamatan terjauh di Kab. Sintang untuk melaksanakan program akta Capil. Data-data Capil masyarakat desa yang terkumpul di kecamatan, selanjutnya dibawa oleh petugas Disdukcapil ke Ibukota kabupaten untuk diselesaikan. Setelah akta-akta Capil selesai di Kabupaten, data tersebut kemudian dikirim kembali ke kecamatan, selanjutnya pihak kecamatan meminta pemerintahan desa untuk mengambil data tersebut di kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa.

Dengan program jemput bola pembuatan akta Capil ini, masyarakat di kecamatan-kecamatan yang jauh dari jangkauan ibukota Kab. Sintang tentunya merasa sangat terbantu. Terlebih lagi, sebagian besar kecamatan di Kab. Sintang hanya terhubung dengan akses perairan/sungai, sementara akses darat sangat tidak memadai.

Perlindungan Hak Anak Secara Hukum (Kab. Kubu Raya)

Sebagai daerah yang baru dimekarkan pada tahun 2009, Kabupaten Kubu Raya menggagas kemudahan pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh akte kelahiran. Program ini membebaskan biaya pembuatan akte bagi anak-anak yang berusia 0 hingga 18 tahun. Program ini difokuskan sebagai upaya perlindungan hak anak-anak, agar mereka mendapatkan perlindungan Negara secara hukum. Terutama, hak anak dimudahkan dalam proses penerimaan bantuan sosial yang sedang digaungkan oleh Bupati Muda Mahendrawan, seperti kesehatan dan pendidikan.

Inovasi ini juga digiatkan untuk menarik minat masyarakat dalam kegiatan pembuatan akte yang berimbas kepada proses pendataan warga Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, permasalahan data statistik yang selama ini menjadi kendala pemerintah daerah ini dapat diminimalis.

Kabupaten Kubu Raya dikenal sebagai daerah perairan yang berada di pulau-pulau dan di cabang-cabang aliran sungai yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi air. Kondisi ini sangat menulitkan masyarakat dalam proses pembuatan akte kelahiran dan KTP. Untuk mengatasinya, Dinas Pencatatan Sipil memprakarsai program jemput bola dengan cara menyediakan mobil pembuatan akte dan KTP yang mangkal setiap minggu di pangkalan-pangkalan transportasi air atau pelabuhan kecil. Selain itu, Kelurahan melakukan kegiatan pembuatan akte dan KTP kolektif di setiap desa yang sulit dijangkau secara berkala.

Hasil yang diperoleh adalah minat masyarakat semakin meningkat untuk membuat akte kelahiran. Hal ini juga didorong oleh program pemerintah yang menekankan pentingnya akte kelahiran. Hanya dengan memiliki akte kelahiran, penduduk Kabupaten Kubu Raya dapat memperoleh bantuan jaminan kesehatan, pendidikan dan raskin oleh pemerintah.

Cempaka (Cepat, Mudah, Pasti Aman dan Terpadu) (Kab. Kubu Raya)

Kabupaten Kubu Raya menyambut positif program peningkatan Pelayanan Publik dalam Layanan Perizinan “One Stop Service” bermoto CEMPAKA – Cepat, Mudah,

Pasti, Aman dan Terbuka. Beberapa inovasi dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BP2T), antara lain: penyederhanaan perizinan (penghapusan SITU), pembatasan calo perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Media Informasi Publik dan Pengaduan (<http://bpmpt.kuburayakab.go.id> dan <http://bpmptkkkr.blogspot.com>).

Berdasarkan Perbup No 22 Thn 2011, 96% ijin ditandatangani oleh kepala BPMPT. Sebanyak 4% ijin meliputi Bidang IMB dan UUG serta bidang Kontruksi, reklame dan limbah B3. Pengalihan wewenang ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembuatan ijin.

Sistem ini mendorong penanam modal untuk membuat ijin usaha. Penyerapan investor lokal maupun asing meningkatkan nilai investasi. Pada tahun 2011, Nilai investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 1.207.104.030.000,00 dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 1.590.043.704.260,00. Pada tahun 2012, sumbangan nilai PMDN dan PMA masing-masing adalah Rp. 876.149.080.000,00 dan Rp. 1.121.686.803.142,00.

Dampak positif bagi kegiatan ekonomi adalah menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten ini juga dapat bersaing dengan kota atau kabupaten lainnya di KalBar maupun di Indonesia. BP2T menjadi pusat studi banding program layanan publik

Reformasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Kota Pontianak)

Berbagai upaya dilakukan oleh Walikota Pontianak untuk mereformasi sistem pelayanan perizinan di daerah pimpinannya yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dan investor menanamkan modalnya di Pontianak yang dikenal sebagai Kota Jasa.

Tanpa peningkatan dan perbaikan pelayanan perizinan, kota Pontianak akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan kabupaten lainnya, seperti Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak yang secara geografis memiliki potensi yang hampir sama. Ketiga kabupaten ini juga bersaing dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan dan saling memperebutkan gelar penghargaan Investment Award oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Inovasi dikembangkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak seperti: (1) Memberlakukan pemberian pengurangan retribusi sebesar 2% setiap hari keterlambatan dari tarif retribusi yang telah ditetapkan dan setinggi-tingginya 50% dari jumlah tarif retribusi, dalam hal penyelenggara tidak memberikan pelayanan sesuai dengan batas waktu pelayanan; (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi. (3) Memberlakukan pelayanan SITU, SIUP, dan TDP 1 (satu) hari kerja; (4) Menyederhanakan jumlah pelayanan perizinan dari 99 jenis pelayanan menjadi 29 jenis; (5) Menggratiskan 25 (dua puluh lima) jenis retribusi pelayanan perizinan; dan (6) Melakukan pelayanan Proaktif (Jemput Izin). Langkah ini diambil sebagai upaya penyempurnaan mekanisme di periode-periode sebelumnya yang dikembangkan secara bertahap mulai dari tahun 1999 hingga saat ini.

Reformasi birokrasi ditingkatkan dari waktu ke waktu. Beberapa hal dirombak oleh BP2T Kota Pontianak, yaitu: (1) Peningkatan Bentuk Kelembagaan; (2) Pembentukan

dan Perubahan Regulasi Perizinan; (3) Penyederhanaan Standar dan Prosedur; (4) Penyederhanaan rumus dalam penghitungan retribusi IMB, sebagai bentuk kemudahan pelayanan bagi customer dalam menghitung retribusi; (5) Pencantuman Nominal Biaya Retribusi pada Sertifikat Izin sebagai bentuk transparansi biaya; (6) Menampilkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Izin Gangguan & IMB pada website sebagai upaya untuk kemudahan & transparansi informasi pelayanan; dan (7) Peningkatan kompetensi aparatur PTSP.

Inovasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Kab.Pontianak)

Kabupaten Pontianak sudah melakukan perubahan Pelayanan Perizinan sebelum daerah ini dimekarkan menjadi dua bagian, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang. Aksinya tidak hanya memberikan kemajuan bagi daerah ini, juga menjadi percontohan bagi dua daerah pemekarannya itu Walaupun setelah dimekarkan, daerah ini justru mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan dari anak didiknya, Kabupaten Kubu Raya.

Permintaan pembuatan ijin usaha Kabupaten Pontianak berada di Kecamatan Sungai Pinyu dan Jongkat yang letaknya memakan waktu satu hingga dua jam dari ibukota kabupaten, Mempawah. Itu menjadi hambatan bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di kabupaten yang berdampingan dengan Kota Pontianak ini. Kemudahan pelayanan dilancarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak dengan cara membuka layanan perizinan di kantor kecamatan Sungai Pinyu setiap hari Rabu.

Penyediaan layanan pengaduan dalam bentuk sms, telpon dan web site merupakan solusi untuk membuka transparansi dan kinerja KPMPT. Melalui media tersebut, KPMPT juga dapat menginformasikan secara langsung kepada masyarakat yang mengajukan izin mengenai kekurangan dokumen persyaratan pembuatan izin, biaya, waktu pengambilan izin, keterlambatan waktu pengambilan, dan sebagainya. Bahkan KPMPT menyediakan layanan pengantaran izin kepada pemohon.

**Program Praktek Cerdas Hasil Temuan Monev
Otonomi Awards 2013
Pontianak Post institute of Pro Otonomi (PPIP)**

Kategori Akuntabilitas Publik

1. Nama Program : Website Sarana Informasi Masyarakat (Kab. Sambas)

Wilayah kabupaten Sambas merupakan daerah yang sangat ramai penduduknya. Dalam memasuki era serba maju seperti ini, makin banyak cara dan bentuk mempromosikan dan menyajikan informasi seputar kabupaten Sambas. Terkadang penyampaian informasi tersebut kurang menarik perhatian masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan proses penyampaian kurang dimengerti. Oleh karena itu perlu adanya satu penyampaian yang lebih efisien seperti halnya pembuatan website. Website ini akan sangat membantu dalam penyampaian informasi wilayah Kabupaten Sambas. Website ini sendiri telah diluncurkan sejak tahun 2003 oleh Humas Kabupaten Sambas. Adapun dalam proses informasi yang disajikan pengelola dilakukan secara update sehingga masyarakat khususnya kabupaten Sambas tidak ketinggalan dalam hal informasi tentang daerah.

Dengan adanya sarana informasi berbasis online masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, tak hanya informasi, website ini juga menyajikan jadwal-jadwal agenda kegiatan pemerintah daerah yang secara tidak langsung masyarakat juga dapat ikut dalam program tersebut.

TEMUAN GOOD PRACTICES OTONOMI (SULAWESI SELATAN)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Menggaet Investasi Triliunan dengan Nol Rupiah (Kab. Bantaeng)

Perkembangan ekonomi Bantaeng bergerak positif di segala bidang. Kabupaten yang memiliki karakteristik dan potensi daerah tiga dimensi ini, pegunungan, dataran, dan pantai, secara terus-menerus menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan menyediakan infrastruktur dasar, seperti prasarana jalan dan pelabuhan adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten yang hanya memiliki wilayah daratan 395 km persegi ini berusaha memaksimalkan potensi dan peluang yang ada untuk membuka kran-kran investasi di segala sektor.

Membuat zonasi wilayah adalah hal pertama yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuka sumbat kran investasi. Zonasi ini dimaksudkan agar potensi-potensi daerah di setiap wilayah, terpetakan dan terinventarisasi secara baik. Perbaikan sistem pelayanan administrasi dan perizinan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam memajukan investasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan membuat peraturan perizinan investasi yang mudah dan transparan, dengan biaya nol rupiah serta berbagai kebijakan menguntungkan lainnya antara pemerintah dan investor. Hasilnya, dalam waktu singkat sejumlah investor, dari dalam dan luar negeri tertarik menanamkan investasinya di daerah berpenduduk sekira 178 ribu jiwa ini. Dari beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak investasi bukanlah usaha yang sia-sia. Nilai investasinya mencapai 30 triliun rupiah. Alhasil, Bantaeng pun melaju dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan nasional, tahun 2012 mencapai 8,49 persen.

Membuka Isolasi dari Suara Jangkrik Menjadi Suara Deru Pesawat. (Kab. Kepulauan Selayar)

Berbagai kemajuan telah ditunjukkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar. Mulai dari pembangunan ekonomi, akses jalan, listrik, jaringan telepon seluler hingga jaringan internet. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi masyarakat pun perlahan meningkat. Namun kendala yang sering dikeluhkan orang-orang yang hendak berkunjung ke kabupaten yang berada terpisah dari daratan Sulawesi ini adalah akses transportasinya. Kondisi inilah yang coba diatasi kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Tanadoang” ini, dengan memanfaatkan peluang terbukanya jalur penerbangan.

Selama ini masyarakat menggunakan transportasi laut dengan memanfaatkan layanan kapal feri dari Bira Bulukumba ke Pamatata Selayar dan sebaliknya. Namun

dianggap belum efektif untuk mengakses kabupaten seluas 903,50 km² ini. Terbukanya jalur penerbangan merupakan transportasi strategis yang dapat mengubah kesan Selayar sebagai kabupaten terisolasi menjadi lebih terbuka dan terakses.

Sejak tahun 2000, Selayar pun menggalakkan transportasi cepat via pesawat udara dengan mengoperasikan dan mengembangkan Bandar Udara H. Aroepala. Pengoperasian Bandara H. Aroepala dapat menjadi bandara alternatif, sehingga jarak Selayar dapat semakin dekat. Kemudahan transportasi ini pun mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, kebijakan pembukaan jalur penerbangan pun memudahkan investor untuk berkunjung serta sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata, khususnya ke kepulauan Taka Bonerate. Transportasi via kapal feri juga terus berkembang seiring dengan mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Sejuta Irigasi (Kab. Sinjai)

Luas Lahan sawah irigasi di Kabupaten Sinjai adalah 9.808 Ha, sedang sawah tanah hujan seluas 4.958 Ha. Sehingga total lahan sawah baku seluas 14.766 Ha. Untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan dibutuhkan irigasi yang sesuai. Selama ini jumlah jaringan masih terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak. Pada dasarnya, Kabupaten Sinjai memiliki potensi untuk mengembangkan jaringan irigasi, terdapat sungai-sungai kecil dan sungai besar dengan debit air yang cukup besar.

Hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya program pengembangan sejuta irigasi, yaitu pengembangan sumber air sebanyak-banyaknya untuk mendukung usaha tani. Adapun sarana irigasi yang dibangun, diantaranya sumur tanah dangkal, embung (cekdam), pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES), pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), serta melakukan pompanisasi yakni pembangunan sistem pompa di daerah yang dekat dengan sumber air.

Berdasarkan data perkembangan infrastruktur pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sinjai, sejak 2008 sampai 2012 telah dibangun 4.840 Ha JIDES dan 6.088 Ha JITUT dengan menggunakan APBD. Sedangkan yang bersumber dari bantuan sosial, telah dibangun 3.987 Ha JIDES dan 2.888 JITUT. Hasilnya, berdasarkan data perkembangan produksi komoditi padi, areal luas panen terus mengalami peningkatan, dari 19.994,75 Ha pada 2008 menjadi 24.036 Ha pada 2012. Indeks pertanian (IP) yang sebelumnya 100 menjadi IP 200. Produktivitas pertanian pun mengalami peningkatan karena ketersediaan air sehingga tanaman dapat bertahan sampai panen. Produksi yang sebelumnya 98.473,92 ton pada 2008, pada 2012 mencapai 116.154 ton.

Bursa Kerja Online (Kab. Pinrang)

Program Bursa kerja *online* merupakan sarana (media) yang berisi mekanisme untuk mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan pemberi kerja (pengusaha) dengan tenaga kerja yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, dengan basis teknologi informasi (internet). Bursa kerja *online* merupakan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan pemerintah

kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Pinrang, salah satu daerah yang merespons peluang tersebut.

Melalui program ini, membuka peluang bagi masyarakat pencari kerja untuk meraih peluang kerja. Memberikan informasi pencari kerja dan lowongan kapan saja, dimana saja pada semua masyarakat. Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, agar pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, atau pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Menciptakan pasar kerja yang luas guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Serta mampu mengembangkan sistem perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana program, tidak hanya memanfaatkan informasi kerja yang telah disediakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas pun sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta yang siap menampung calon tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pinrang. Selain itu, aktif memberikan informasi baik melalui pengumuman monitor info kerja yang ada di dinas terkait maupun melalui website www.infokerja.depnakertrans.go.id. Bagi pencari kerja yang melakukan pendaftaran di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberikan kemudahan akses internet dan bantuan atau arahan dari pegawai dalam melakukan pendaftaran.

Pemanfaatan Bendung untuk Optimalisasi Lahan Pertanian. (Kab. Luwu)

Latar belakang keberadaan program ini adalah minimnya sarana pengairan untuk kebutuhan lahan pertanian. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan air melalui pembangunan dan pemanfaatan bendung.

Bendung To Mattope salah satunya. Bendung ini dibangun tahun 2010, dan diresmikan pada tahun 2012. Pembangunan lengkap dengan jaringan menghabiskan anggaran 116 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Bendung ini mengairi sawah dengan luas areal 5.829 Ha, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Belopa, Kamanre, Belopa Utara, dan Bajo.

Bendung lainnya yang lebih dulu dimanfaatkan adalah Bendung Lamasi, yang terletak di Sungai Lamasi. Bendung ini memiliki dua pintu pengambilan (*intake*) yang merupakan sumber air irigasi bagi dua daerah irigasi yakni daerah irigasi Lamasi Kiri dan Lamasi Kanan, yang mengairi sawah dengan luas areal 9.122 Ha. Selain dua bendung dalam skala besar tersebut, terdapat beberapa bendung kecil lainnya yang dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan air lahan pertanian di kecamatan lainnya. Hasilnya, areal luas panen mengalami peningkatan, dari 40.951 Ha pada 2011 meningkat menjadi 52.195 Ha pada 2012. Ketersediaan air yang memadai, sehingga tanaman dapat bertahan sampai panen, selain itu petani pun tidak perlu khawatir jika musim kemarau tiba.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Kab. Wajo)

Membangun pertanian lengkap di Kab Wajo melalui pembangunan agribisnis dan pabrik pengolahan Tanaman tebu mulai di tanam sejak akhir tahun 2009, hal ini

karena ada inisiatif dari kelompok tani yang melihat ada potensi untuk mengelola tebu di Wajo. Ketua kelompok melakukan studi banding ke Pabrik Gula Camming. Dari kunjungan tersebut Pabrik Camming kemudian memberikan bantuan (untuk perintisan) ke kelompok tani berupa bantuan bibit untuk 20 Ha.

Bibit ini kemudian dikelola oleh dua kelompok tani. Dari bibit ini hingga 2011 sudah berkembang menjadi 49 Ha. Proses produksi dilakukan sejak 2011 (gula merah). Intervensi Dinas diantaranya: bantuan 10 pompa, pelatihan, pendampingan, bantuan 1 mesin penggiling. Tahun 2012 melalui bansos, Lima kelompok tani diberikan bantuan bibit untuk 169 Ha. Untuk proses pemasaran kelompok pada dasarnya tidak mengalami kesulitan karena permintaan yang cukup besar, bahkan konsumen yang datang sendiri.

Sedang pengembangan tanaman sawit sudah dikelola di Wajo sejak 1995 oleh PT.P14 (BUMN). Awalnya para investor melihat adanya peluang, yakni masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Saat ini tercatat dua perusahaan swasta yang menanamkan investasi dan melakukan pembibitan 500 ribu bibit sawit. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Tidak hanya dijadikan sebagai tenaga kerja, tetapi juga status lahan untuk penanaman sawit tetap menjadi hak milik warga, dengan kesepakatan bagi hasil 60:40

Untuk komoditi tebu sendiri, mulai ditanam sejak akhir 2009 sementara proses produksi yang dilakukan sejak 2011. Keterbatasan sarana menyebabkan petani hanya fokus untuk memproduksi gula merah. Namun demikian, permintaan yang cukup besar akan gula merah telah memberikan keuntungan tersendiri bagi petani. Peran Pemda pun cukup besar. Selain pelatihan dan pendampingan kepada petani, dana bantuan sosial berupa bantuan bibit juga diberikan.

Untuk pengembangan kakao, fokus pemerintah adalah memutus siklus perantara. Oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi adanya nota kesepahaman antara gapoktan dengan pabrik pengolahan (PT.Bumi Tangerang). Agar dapat meningkatkan pendapatannya, petani dibina dan diberikan bantuan untuk menyediakan biji kakao yang telah di fermentasi.

Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal (Kab. Maros)

Program ini difokuskan pada pembangunan sarana jalan, saluran drainase, pasar dan rehab kantor desa. Mekanismenya, Survei awal dilakukan untuk melakukan kategorisasi terhadap desa-desa tertinggal berdasarkan keberadaan sarana dan prasarannya. Infrastruktur yang dibangun di desa berdasarkan usulan dari desa baik bentuk maupun volumenya.

Pembangunan infrastruktur desa tertinggal ini secara relatif dilakukan dengan mekanisme swakelola melalui penunjukan pihak ketiga. Tenaga kerjanya diharapkan dari desa tertinggal. Swakelola itu adalah kolaborasi antara pihak ketiga dengan desa. Pihak ketiga sebagai pelaksana program dan desa sebagai penyedia sumber daya manusia.

Melalui program ini, dana yang akan diswakelolakan di APBD disiapkan sebesar 2 Miliar untuk program IDT. Pada 2012 di Kab. Maros jumlah desa yang terkategori desa tertinggal sekitar 50 desa. Sampai akhir tahun program ini telah dilaksanakan pada 29 desa pada 13 kecamatan. Anggaran yang telah diserap mencapai Rp 1.796.675.000 (Rp. 1,8 M). Pembangunan infrastruktur di 29 kegiatan tersebut rata-

rata terfokus pada pembangunan jalan baik untuk pengerasan jalan, pembuatan jalan
tani hingga pengecoran jalan dan pembuatan drainase

Dengan pembangunan infrastruktur desa tertinggal ini menjadikan desa lebih
bermartabat, sehingga jumlah desa yang diketogorikan desa tertinggal semakin
berkurang. Selain itu dengan pembangunan infrastruktur tersebut masyarakat desa
mendapatkan dan menikmati sarana yang lebih baik sehingga dapat menunjang
perekonomian desa.

PEMERATAAN EKONOMI

Tak Ada Bank LKM Pun Bisa (Kabupaten Kepulauan Selayar)

Kesulitan pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir dalam mengakses modal menjadi latar belakang hadirnya program ini. Keberadaan perbankan belum mampu menjadi solusi, karena ketatnya persyaratan administrasi dan mekanisme yang diberlakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu ada solusi non-Bank yang mampu memberikan akses modal yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku ekonomi mikro.

Pemerintah Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2005, telah menginisiasi dan secara konsisten memperkuat program Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai wadah bagi pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir dalam mengakses permodalan. Pelaku ekonomi pesisir ini biasanya didominasi oleh usaha skala mikro dengan pelaku para nelayan, buruh nelayan, pedagang sarana produksi dan hasil perikanan, pengolah hasil perikanan serta industri rumah tangga.

Dalam menjalankan program pemerataan melalui LKM tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan perkuatan modal yang prosesnya dilakukan mulai dari tahapan pengembangan kelembagaan LKM hingga intervensi permodalan. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembentukan kelembagaan LKM berdasarkan kesepakatan warga.

Kredit yang disalurkan LKM kepada peminjam berkisar 2 juta hingga 5 juta rupiah, dengan masa pembayaran 10 bulan dan bunga 1% – 2%. Monitoring dan evaluasi secara berkala pasca transfer/pengucuran kredit pun dilakukan, untuk mengetahui daya serap modal dan mekanisme pengelolaan serta pengembalian dana dari peminjam kepada LKM.

Sejak digulirkan pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Selayar telah merealisasikan komitmennya dengan mengucurkan anggaran dari APBD untuk LKM yang mencapai sekira 2,5 miliar rupiah. Dana ini dikelola oleh 52 LKM di 52 desa pesisir, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2091 pelaku usaha mikro.

Keberadaan LKM akan membantu masyarakat peisisir dalam melakukan pengembangan usahanya yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang penuh dengan persyaratan administratif. Jika dikelola dan dilembagakan dengan baik, LKM dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan memberi kontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Penguatan Modal melalui KUBE (Kota Palopo)

Potensi mengembangkan usaha kecil menengah Kota Palopo cukup besar. Pemerintah berkomitmen mendorong semangat berwirausaha dikalangan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan melibatkan karang taruna di tingkat kelurahan, pendataan calon penerima manfaat pun dilakukan, kemudian dibentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang tiap kelompoknya atau kelompok usaha bersama (KUBE). Data kelompok calon

penerima manfaat yang ada, dimasukkan ke Dinas Sosial. Selanjutnya diseleksi oleh dinas berdasarkan kesiapan anggaran pemerintah dengan rencana jenis usaha yang diajukan oleh setiap kelompok.

Pemerintah menyiapkan dana hibah sebanyak 30 juta rupiah per kelompok. Jenis usaha yang dijalankan setiap anggota dan pengelolaan anggaran ditentukan dalam musyawarah kelompok. Ada beberapa jenis usaha yang dijalankan mulai dari usaha kios yang menjual barang campuran, menjual ikan di pasar, perbengkelan, dan jenis usaha lainnya.

Upaya pemerintah tidak berhenti sampai pada pemberian bantuan dana, pemerintah tetap melakukan pengawasan pada pembukuan yang dilaporkan oleh ketua kelompok setiap bulannya. Dengan adanya program KUBE, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses modal untuk membuka usaha bersama, peluang kerja pun terbuka bagi masyarakat, memberikan keuntungan bagi tiap anggota kelompok melalui sistem bagi hasil dari laba penjualan yang diterima setiap bulannya, serta membangun pendidikan usaha di kalangan masyarakat.

Kucurkan Bantuan Hidupkan Koperasi (Kab. Soppeng)

Keterbatasan modal dan ketidakmampuan mengakses modal menjadi latar belakang hadirnya program ini. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Soppeng kemudian memberikan bantuan modal kerja dan operasional kepada koperasi agar dapat berdaya kembali.

Bantuan dilakukan melalui beberapa tahap, pertama mengidentifikasi koperasi yang layak menerima bantuan, baik bantuan dana sosial (bansos) dari Kementerian Koperasi maupun melalui kredit usaha rakyat (KUR). Identifikasi yang dilakukan meliputi: pelaksanaan RAT minimal dua tahun dan kondisi kesehatan koperasi mulai dari organisasi atau kelembagaan dan administrasi. Setelah itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng akan menerbitkan rekomendasi ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke pusat. Bagi koperasi yang memenuhi kriteria berhak untuk mendapatkan bantuan, yang akan ditransfer langsung ke rekening koperasi. Untuk bantuan melalui KUR setiap koperasi mendapatkan bantuan Rp22 juta.

Kakao Klon 45 (Kab. Luwu Utara)

Cikal bakal Klon 45 berawal dari gerakan sambung samping yang dicanangkan Bupati pada tahun 2005. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi kakao. Pembinaan yang diberikan secara terus-menerus kepada petani berdampak pada tumbuhnya minat untuk mengumpulkan dan mencari klon-klon unggul lainnya, baik dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) maupun di luar, terutama klon-klon alami.

Pada tahun 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan kemudian mengadakan program Gerakan Rehabilitasi Massal Menuju Tanaman Kakao Berkualitas (Germas Takwa). Komitmen yang ditunjukkan pemerintah Kabupaten Lutra tersebut membuat para petani semakin gencar mencari klon-klon unggul. Alhasil, klon-klon unggulan lokal Lutra ditemukan, antara lain Seri M0-1 sampai dengan M0-7, Panther, dan akhirnya pada tahun 2009 muncul Kakao Klon 45.

Salah satu upaya pengembangan klon 45 yaitu mengajarkan petani teknologi perbanyak bibit melalui sekolah lapang sambung pucuk. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan animo petani yang selama ini ingin mengalihkan lahan kakao menjadi komoditas lain (kelapa sawit dan komoditas lainnya).

Sebagai dampak dari keberhasilan meningkatkan produksi kakao menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk bercocok tanam. Klon 45 kini telah diminta oleh beberapa daerah untuk dikembangkan bahkan lintas provinsi. Produksi Kakao Klon 45 mencapai 3 ton per Ha pertahunnya. Jumlah petani yang terlibat 34.793 KK dengan jumlah produksi 32.691,51 ton. Pada 2012 Lutra menyumbang 37 persen dari realisasi 120 ribu ton produksi kakao Sulawesi Selatan.

Menuju Mekanisasi Pertanian (Kab. Luwu)

Pertanian merupakan sektor utama kehidupan di Kabupaten Luwu, oleh karena itu pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius terhadap upaya peningkatan produksi pertanian, termasuk padi. Di sisi lain, semakin lama tenaga kerja pertanian sudah semakin berkurang, didukung keinginan masyarakat yang serba ingin praktis. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan mekanisasi pertanian.

Pemerintah memberikan bantuan alat-alat pertanian yang dapat mempermudah pekerjaan petani. *Handtraktor* salah satunya, untuk percepatan pengolahan lahan penggunaan *handtraktor* sangat efektif. Mekanisme yang diterapkan adalah Dinas Pertanian terlebih dahulu melakukan pendataan luas lahan sawah di tiap kecamatan. Setiap 25 Ha lahan dibentuk 1 kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan 1 unit traktor.

Aturan pemakaian handtraktor di setiap kelompok tani tergantung hasil kesepakatan kelompok. Dengan luas lahan sawah 36.299 Ha, maka kebutuhan *handtraktor* di Kabupaten Luwu adalah 1452 unit. Sejak tahun 2009 sampai 2012 jumlah handtraktor yang telah disalurkan mencapai 744 unit yang tersebar di 21 kecamatan.

Selain handtraktor pemerintah juga memberikan bantuan 2 unit mesin panen padi (*combine harvester*). Dengan menggunakan mesin tersebut, panen 1 Ha sawah dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam. Umumnya dengan tenaga manusia dibutuhkan 25 – 30 orang untuk menyelesaikan panen 1 Ha sawah dalam waktu 1 hari. Dengan mekanisasi pertanian, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan.

Gernas Pengembangan Kakao. (Kabupaten Bone)

Tujuannya program ini untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Upaya itu cukup berhasil berkat solusi cerdas yang dilakukan pemerintah. Diantaranya program peremajaan tanaman kakao, rehabilitasi melalui sambung samping dan intensifikasi berupa pemberian pupuk, pestisida dan handsprayer. Hanya dalam waktu setahun sejak program ini dilaksanakan produksi kakao Gernas meningkat dari hanya 300-450 kg perhektar menjadi 900 -1200 kg perhektar.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Bone menjalankan program Gernas tidak diragukan. Buktinya, sejak 2009 hingga sekarang jumlah penerima manfaat program tanam baru sebanyak 1.406 petani. Sedangkan jumlah petani yang mendapatkan bantuan program sambung samping dan Intensifikasi, masing-masing sebanyak 5.403 dan 5.659 orang petani. Semuanya tersebar pada 21 kecamatan yang cocok dengan pengembangan kakao

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN TASKIN

Showroom Sapi (Kab. Barru)

Sebagai daerah yang memiliki populasi ternak sapi yang terus meningkat dan sudah menjadi ternak unggulan, beternak sapi memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan masyarakat, baik dikelola secara mandiri maupun secara berkelompok. Pemerintah daerah Barru melalui Dinas Peternakan berinisiatif melakukan langkah praktis untuk lebih meningkatkan populasi dan pemeliharaan serta penertiban ternak sapi dengan melakukan perkandangan melalui program *Showroom* Sapi (SrS).

SrS merupakan perkandangan sapi dengan tujuan meningkatkan upaya peternakan sapi secara terintegrasi. *Showroom* adalah sebuah konsepsi, atau dapat dikatakan sebuah *branding* atau kemasan untuk menunjukkan bahwa ada pola dan standar yang berbeda dengan perkandangan biasa yang dilakukan masyarakat selama ini. Melalui SrS sapi dijadikan sebagai komoditas ekonomis yang dapat bernilai investasi.

Pola SrS merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki modal namun tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan usaha. Sebagai sebuah program pemberdayaan dalam pelaksanaannya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi swadaya masyarakat yang ada, maupun potensi sumber daya alam.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk pembentukan SrS. Hingga 2012, telah dibentuk 34 unit SrS dengan kapasitas rata-rata minimal 10 ekor sapi. Adapun sumber ternak terdiri atas pemerintah sebanyak 476 ekor sapi, dan 223 ekor sapi yang dikelola secara mandiri.

Pemberdayaan dan Pengembangan IKM (Kota Parepare)

Titik tolak dari program ini adalah keterbatasan industri rumah tangga (IKM), mulai dari sumber daya manusia yang kurang terampil, peralatan produksi masih tradisional yang berimbas pada terbatasnya produksi, dan pemasaran produk. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap IKM yang ada.

Adapun bentuk pemberdayaan dan pengembangan yang telah dilakukan adalah mengikutkan pelaku IKM dalam pelatihan-pelatihan, mulai dari menjahit (pembuatan pola), sablon, pembuatan makanan (kue tradisional, olahan jambu mete, abon ikan), bimbingan teknis *home* industri, penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi, kerajinan tangan, pertukangan kayu, dan jenis pelatihan lainnya. Selain itu, memberikan bantuan peralatan kepada pelaku IKM sesuai dengan jenis industrinya. Dalam hal pemasaran, produk-produk IKM diikutsertakan dalam pameran pembangunan baik di daerah, provinsi, bahkan nasional. Pemerintah pun memfasilitasi IKM untuk promosi melalui internet dan majalah.

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan pun membuahkan hasil. Sumber daya semakin terampil dan jumlah produksi meningkat. Jumlah IKM pun semakin berkembang, tercatat 1.146 IKM pada 2008 dan meningkat menjadi 1.312 pada 2011.

Pugar Kugar (Pemberdayaan Usaha Garam dan Kelompok Usaha Garam) (Kab. Pangkep)

Program ini menitikberatkan pada upaya untuk memanfaatkan potensi produksi garam yang ada di Pangkep. Adanya bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, membuka peluang untuk memberdayakan petani garam.

Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembentukan kelompok bekerja sama dengan pemerintah desa. Kelompok yang terbentuk kemudian mengajukan proposal yang akan diverifikasi kembali oleh dinas. Rata-rata tiap kelompok mendapatkan bantuan Rp23 juta untuk keperluan sarana dan prasarana produksi seperti mesin, gerabah, terpal, bahkan pembuatan gudang. Tidak hanya itu, dinas juga meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan teknik penggaraman yang baik, mengorganisasi kelompok, dan pengelolaan keuangan.

Sebelum adanya bantuan, melakukan penggaraman hanya merupakan pekerjaan sampingan bagi para petani dan petambak. Saat ini, petani sudah mampu memperhitungkan kebutuhan untuk penggaraman ketika masuk musim kemarau. Persiapan untuk produksi pun sudah bisa dilakukan secara optimal karena tersedianya sarana yang memadai.

Fasilitasi pengembangan UKM melalui “Gema Karsa” (Gerakan Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan) (Kab. Kep Selayar)

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar selama ini hanya ditopang oleh upaya pemerintah, peran swasta dan masyarakat masih lemah. Hal ini didukung, minimnya pemahaman masyarakat akan dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, khususnya pemuda. Kegiatan ini sekaligus untuk mengubah mindset pemuda dari orang yang bekerja (pekerja) menjadi mempekerjakan orang.

Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat diberikan pemahaman dan motivasi berusaha, perencanaan dan pengembangan usaha, serta berbagai permasalahan dan skema penyelesaian masalah tersebut. Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru, pemerintah kemudian memberikan bantuan modal usaha dan peralatan/sarana usaha. Bantuan modal dilakukan bekerjasama dengan pihak bank, sehingga ada pengenalan antara wirausaha dengan perbankan. Selain itu, mendorong kepedulian dan keterlibatan perbankan, di sisi lain sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Peningkatan Kapasitas Ekonomi Rakyat (Kab. Wajo)

Pertanian adalah sektor utama kehidupan masyarakat Wajo. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan produksi pertanian, dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang pertanian. Pemerintah mengupayakan membangun pertanian lengkap yaitu pembangunan agribisnis dan pabrik pengolahan.

Tanaman tebu misalnya, mulai di tanam sejak akhir tahun 2009. Awalnya merupakan inisiatif dari kelompok tani yang melihat ada potensi untuk mengelola tebu di Wajo. Setelah melakukan studi banding ke Pabrik Gula Camming, dua kelompok tani mendapatkan bantuan bibit tebu (perintisan) untuk 20 Ha. Hingga 2011 (pembibitan) berkembang menjadi 49 Ha. Di tahun yang sama produksi gula merah dengan bahan

baku tebu mulai dilakukan. Sudah ada dua pabrik milik kelompok tani yang dimanfaatkan untuk mengolah tebu.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan tetap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok. Selain itu bantuan peralatan pun diberikan seperti 10 unit pompa dan mesin penggiling tebu. Petani tidak mengalami kesulitan untuk pemasaran produk karena permintaan cukup besar, bahkan konsumen yang datang sendiri. Produksi gula merah mencapai 14.545 ton dengan asumsi nilai produksi Rp 41.600.000/Ha (kapasitas 80 ton/Ha). Melihat peluang tersebut, pada 2012 pemerintah melalui dana bantuan sosial, memberikan bantuan bibit untuk 169 Ha kepada lima kelompok tani.

Selain tebu, tanaman kakao juga menjadi perhatian pemerintah. Fokus pemerintah pada pengembangan kakao adalah memutus siklus perantara. Pemerintah memfasilitasi adanya MoU (*memorandum of understanding*/nota kesepahaman) antara gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan pabrik pengolah (PT.Bumi Tangerang). Tercatat dua gapoktan telah memiliki MoU dengan pabrik, dimana satu gapoktan terdiri atas 11 kelompok tani yang beranggotakan 25 orang/kelompok. Gapoktan menyediakan biji kakao yang telah di fermentasi yang kemudian langsung dikirim ke pabrik. Untuk memaksimalkan hasil fermentasi kakao, pemerintah memberikan bantuan peralatan fermentasi dan mengikutkan petani pada sekolah lapang fermentasi.

Pengembangan Tanaman Hortikultura (Kabupaten Jeneponto)

Program tersebut diinisiasi oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Jeneponto. Program ini berjalan melalui skema pemberian suntikan dana kepada bidang hortikultura untuk pengadaan benih, yang ketentuan-ketentuannya di rekomendasikan atas kerjasama dengan Balai Benih Jeneponto.

Pengadaan benih ini untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman hortikulutra untuk dua aspek, dataran tinggi yang cocok dengan tanaman kentang, kol, bawang merah, cabe. Dataran rendah yang cocok dengan tanaman buah-buahan. Pengadaan bibit dilakukan bekerja sama dengan pihak ke tiga, yang membeli bibit dari penangkar. Bibit ini kemudian disalurkan kepada kelompok-kelompok tani yang sebelumnya telah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan bibit tersebut. Setelah proposal diverifikasi, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, kelompok-kelompok tani tersebut kemudian ditetapkan sebagai kelompok tani penerima bantuan yang di tetapkan melalui keputusan kepala dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, dilakukan penyaluran benih, yang diharapkan melalui benih-benih unggul tersebut, akan memberikan dampak pada kenaikan produksi dan pendapatan bagi petani.

Percepatan Implementasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET) (Kab. Barru)

Program ini telah berjalan sejak 2004. Program ini berupa bantuan dana bergulir yang di berikan kepada masyarakat miskin untuk di gunakan sebagai modal usaha. Anggaran program PIK PAKET ini berasal dari APBD kabupaten Barru melalui DPA

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Belanja Bantuan Sosial melalui DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

Adapun mekanisme program ini di mulai dari tahap persiapan, yakni pembentukan tim pendamping teknis, seleksi sasaran PIK PAKET. Selanjutnya, tahap pelaksanaan diadakan pertemuan melalui musyawarah masyarakat desa, kemudian pembentukan dan pengorganisasian kelompok masyarakat (POKMAS) penerima PIK PAKET. Dan tahap terakhir adalah penguatan kapasitas, monitoring, dan evaluasi. Hasilnya PIK PAKET ini telah membentuk 28 POKMAS dengan 929 KK yang tersebar di 25 desa dan kelurahan se kabupaten Barru.

Pemberdayaan PKL di Pusat Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) (Kab. Maros)

Program ini berawal dari ide relokasi PKL disepanjang jalan nasional yang tidak tertata yang menyebabkan kondisi kota yang nampak tidak mencerminkan sebagai penyanggah ibu kota provinsi. Pemerintah daerah pun membuat konsep yang tidak merugikan masyarakat. Akhirnya konsep area kuliner yang terpusat digagas dan proses relokasi pun dilakukan.

PTB (Pantai Tak Berombak) sebenarnya bukan pantai, tapi aslinya sebuah danau yang terletak di kota Maros. Danau ini dulunya adalah sebuah tempat pemancingan yang terkesan kumuh dan tak sedap dilihat. Namun setelah di desain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah danau yang luar biasa menariknya.

Sebagai daerah yang mengusung tagline LEBIH BAIK yakni Bersih, Aman, Inovatif, Kreatif. Konsep area kuliner yang terpusat harus tetap bergerak, berbagai fasilitas terus dibangun, taman alam, penerangan jalan, fasilitas hotspot, dan fasilitas lain adalah hal mutlak yang harus tersedia, tentunya untuk membuat area ini akan semakin nyaman dan menjadi destinasi kuliner bagi masyarakat. Hasilnya, dalam beberapa bulan area ini begitu ramai, PKL yang sebelumnya enggan untuk menempati lokasi ini akhirnya migrasi total bahkan area ini nyaris tidak bisa menampung para pedagang kaki lima, apalagi dengan munculnya pedagang-pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pengembangan IKM Unit Usaha Gerabah (Kab. Takalar)

Sejak tahun 1987 usaha gerabah di Kabupaten Takalar sudah digeluti masyarakat sebagai mata pencaharian dan terus berkembang hingga saat ini. Usaha tersebut merupakan keterampilan yang sifatnya turun temurun. Hal ini ditunjang antara lain oleh potensi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Takalar.

Hanya saja keterbatasan sarana dan ketampilan pelaku IKM yang rendah, membuat jumlah produksi dan kualitasnya juga rendah. Melihat kondisi tersebut, UPTD-IKM Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Takalar memandang perlu melakukan pendampingan dan Pelatihan Manajemen IKM kepada pengrajin gerabah.

Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi pengusaha gerabah oleh penyuluh Dinas Perindag di lokasi usaha. Sedangkan Kegiatan Pelatihan dilakukan diawali dengan proses identifikasi peserta dengan mengundang IKM gerabah.

Narasumber kegiatan pelatihan ini berasal dari Akademisi dan praktisi yang berpengalaman. Materi yang diberikan adalah tentang manajemen wirausaha dan manajemen keuangan IKM. Tenaga ahli spesialisasi gerabah dan keramik membahas metode desain gerabah dan finishing. Tenaga penyuluh dan Ka.UPTD-IKM dan sebagai pendamping peserta dari tenaga penyuluh lapangan memberikan materi teknik pengolahan bahan baku gerabah.

Bentuk bantuan pemerintah lainnya bukan hanya pelatihan dan pendampingan tetapi juga diberikan bantuan penguatan modal, alat pemutar pembuatan gerabah. Hasilnya, bukan hanya mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan perajin. Tetapi setiap unit IKM mampu meningkatkan nilai produksi dan pendapatannya sebesar 40 persen.

PELAYANAN PENDIDIKAN

Tuntas Tuna Aksara/Calistung (Baca, Tulis, Hitung). (Kab. Sidrap)

Program ini diluncurkan awal 2012 dengan menelan anggaran Rp3,1 miliar. Tingginya angka buta aksara dari Badan Pusat Statistik Sidrap menjadi alasan kuat pelaksanaan program. Masalah ini dianggap penyebab indeks pembangunan manusia (IPM) masih bercokol di posisi sembilan. Sementara harapan pemerintah setempat agar IPM menembus posisi lima besar.

Melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari pejabat setingkat bupati, jajaran SKPD, hingga masyarakat umum, program Tuntas Tuna Aksara/Calistung (Baca, Tulis, Hitung) pun digalakkan. Memanfaatkan lokasi belajar yang tidak terlalu formal, rumah, sekolah, kantor desa, tempat ibadah, sarana umum lainnya, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Peserta belajar tidak hanya diajarkan baca, tulis, dan hitung, tetapi juga dilengkapi dengan peralatan menulis, seperti buku dan alat tulis, tas, serta modul pembelajaran.

Setelah berjalan setahun, jumlah tuna aksara yang dituntaskan 8.000 orang atau 69 persen dari 11.540 orang. Sedang sisanya akan dituntaskan pada akhir program 2013. Harapan capaian itu agar IPM Sidrap akan meningkat. Karena IPM merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah.

***TOPs Play* Program Pembangunan Pendidikan. (Kabupaten Bone)**

TOPs Play merupakan program peningkatan olahraga untuk pembangunan pendidikan. Berawal dari hasil kerja sama antara UNICEF dengan pemerintah Kabupaten Bone, yang di mulai pada 2011. Awalnya, diadakan pelatihan master trainer pendidikan jasmani *TOPs* tingkat kabupaten, selama tiga hingga empat hari. Kemudian dilanjutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pelatih master trainer pendekatan *TOPs* pendidikan jasmani tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berlangsung selama dua hari.

Master trainer kabupaten yang telah mengikuti diklat, ditugaskan untuk membina dan menjadi pelatih guru-guru olahraga di tingkat sekolah. Guru-guru pendidikan jasmani diajarkan membuat sarana olahraga yang tersedia di alam sekitar, misalnya membuat modifikasi bola dari kertas dan plastik. Tujuannya, agar guru lebih kreatif sehingga keterbatasan sarana tidak lagi menjadi masalah. Selain itu, guru diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa tentang cara (tahapan) dalam berolahraga. Termasuk meyakinkan semua siswa terlibat langsung saat praktik di mulai, misalnya dengan membagikan alat, sesuai kebutuhan siswa.

Pelaksanaan pelatihan guru di setiap sekolah dilakukan secara bertahap. Jika pada 2011 hanya di kecamatan Barebbo, target kedepannya adalah semua sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA yang tersebar di 28 kecamatan.

“Rakkala” Hand Traktor Lokal versi SMK (Kabupaten Pangkep)

Program ini lahir untuk menjawab tantangan Bupati Pangkep, dalam rangka melahirkan produk yang sesuai dan mampu mendukung kebutuhan daerah dengan latar

daerah kepulauan dan pertanian. Salah satunya mendukung program pengadaan 800 hand traktor untuk petani.

Melalui mekanisme kolaborasi antarsiswa-siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), yang ada di Pangkep. Siswa-siswa bekerja berdasarkan spesifikasi dan keahliannya masing-masing, yang didampingi oleh guru-guru sebagai tim ahli dan tim teknis. SMK Muhammadiyah Bungoro ditetapkan sebagai sentral operasional atau bengkel kerja pengadaan *hand tractor*. Terdapat 12 SMK yang dilibatkan baik negeri maupun swasta.

Tahun 2012 telah lahir sebuah produk prototipe *hand tractor* Rakkala, yang masih dalam proses uji coba untuk mendapatkan lisensi produksi. Penajakan untuk investasi pun sudah mulai dilakukan. Produksi mulai dilakukan pada 2013.

Pendidikan TK Merambah Desa (Kabupaten Kepulauan Selayar)

Pendidikan taman kanak-kanak (TK) penting agar peserta didik mudah beradaptasi ketika memasuki jenjang pendidikan wajib belajar (SD). Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat desa. Pembentukan sekolah TK sampai di desa pun telah diupayakan. Bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, diinstruksikan pengangkatan guru TK dengan status honorer yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan pemberian tunjangan per semester dari Dinas pendidikan.

Untuk meningkatkan motivasi bekerja bagi guru TK, pemerintah mengalokasikan formasi guru TK dalam setiap penerimaan CPNS. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru TK pun dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sampai tahun 2012 telah terbentuk 102 TK yang tersebar di 83 desa.

Peningkatan Kualifikasi Guru (Kabupaten Luwu)

Program peningkatan kualifikasi guru (PNS/ Non PNS) melalui pemberian tunjangan pendidikan untuk penyelesaian studi strata satu (S1), sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2007. Sampai dengan tahun 2009, di Kabupaten Luwu ternyata masih banyak guru PNS yang belum sarjana (S1), oleh karena itu Bupati mendukung program pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk men-sarjanakan semua guru yang berstatus PNS terlebih dahulu.

Untuk men-sarjanakan guru, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKD memberikan tunjangan peningkatan kualifikasi guru (beasiswa) dalam bentuk dana penyelesaian studi. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berkas pemohon yang nantinya akan diberikan beasiswa, yang sumber anggarannya dari APBN sebesar Rp3.500.000,-/orang. Sedangkan beasiswa dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Luwu sebesar Rp5.000.000,-/orang, yang dikelola oleh BKD. Sejak 2009 hingga 2012, pemerintah daerah Kabupaten Luwu telah memberikan dana penyelesaian studi kepada 520 orang guru.

Pelayanan Pendidikan Inklusi.(Kab. Enrekang)

Program ini untuk mendorong proses pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus agar terbiasa bergaul dengan anak yang normal dan anak-anak lain di lingkungannya.

Pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen terus mengembangkan dan memajukan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).Kelompok ABK ini dikenal dengan autisme, tuna rungu atau pun bertingkah dalam super nakal. Setidaknya, hingga saat ini sebanyak 41 sekolah yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perhatian Pemkab Enrekang terhadap anak berkebutuhan khusus, bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Perda nomor 7 sejak tahun 2009 lalu.

Melalui Perda tersebut Pendidikan inklusi diterapkan pada sekolah formal yang tersebar pada 12 Kecamatan di Enrekang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama antara seluruh usia sekolah antara yang normal dengan yang tidak normal. Anak-anak up-normal usia sekolah selama ini selalu dikucilkan di masyarakat, mereka dalam kelompok anak yang memiliki kelainan dalam perkembangan dan pertumbuhan.

Dengan diterapkannya program pendidikan inklusi ini sejumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) setelah memperoleh pembinaan khusus mendapat kemajuan yang cukup berarti misalnya sudah berhasil mengenal huruf.

Realisasi Sharing Dana Pendidikan Gratis Untuk Meningkatkan Kualitas Guru (Kab. Maros)

Pendidikan gratis merupakan program pemerintah provinsi yang pendanaannya dilakukan melalui sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sharing tersebut peroporsinya 40: 60. Pada 2012 dana untuk pendidikan gratis Kabupaten Maros diprioritaskan untuk peningkatan kualitas guru. Mengingat rendahnya kualitas guru di Maros yang tercermin dari hasil Uji Kompetensi Guru yang diadakan pada tahun 2012 sangat rendah. Hal tersebut langsung direspons oleh Bupati melalui kegiatan workshop dan pelatihan terkait dengan empat kompetensi guru plus penguasaan materi IT. Program ini sasarannya untuk 500 Guru. (SD, SMP, SMA dan SMK plus 60 guru SD terpencil yang ada di Kec. Tompobulu, Mallawa dan Camba).

Selain mengarahkan pembiayaan dana pendidikan gratis untuk kegiatan peningkatan kualitas guru, sebagian juga di share untuk kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Untuk diketahui di Kabupaten Maros sudah tidak ada pungutan dalam PSB, baik SD, SMP mau pun SMU. Biaya PSB dianggarkan oleh Bupati melalui dana Sharing Rp. 45.000/siswa. Mekanisme sharing dana untuk kedua kegiatan itu dilakukan secara proposional oleh sekolah-sekolah karena dana sharing itu langsung ditransfer ke rekening sekolah. Pihak sekolah lah yang menentukan besaran anggaran untuk Workshop dan Diklat Guru, dan besaran anggaran untuk PSB.

Hasilnya, selama 2012 sebanyak 102 guru SMU dan 139 guru SMP plus 41 guru SD terpencil, telah mengikuti pendidikan peningkatan kompetensi. Dana yang telah digunakan untuk membiayai program tersebut mencapai 1.178.825.000,-

PELAYANAN KESEHATAN

Komisi Penanggulangan AIDS Mandiri (Kabupaten Luwu Timur)

Epidemi HIV/AIDS terus meningkat. Bukan hanya secara global, tetapi telah merambah hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kabupaten Luwu Timur. Posisinya sebagai daerah segi tiga emas pertemuan tiga wilayah provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara) membuat Kabupaten Luwu Timur rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS melalui pola “barang baru Stock lama”.

Penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Luwu Timur diperparah lagi oleh adanya anggapan yang tabu dan perlakuan diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS. Kondisi ini membuat HIV/AIDS tidak sekadar mewujud sebagai masalah permukaan, tetapi merupakan masalah sosial yang fenomenanya seperti gunung es.

Pada titik inilah, keberadaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan status mandiri menjadi strategis. Dalam Kerangka penanggulangan HIV/AIDS, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan, tindakan pengobatan bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit PT. Vale hingga pengembangan SDM yang telah mampu melakukan VCT (*Voluntary Counseling Test*).

Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas ISO (Kabupaten Enrekang)

Keberadaan puskesmas ISO merupakan salah satu upaya mengoptimalkan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, pemerintah kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meskipun Enrekang bukan daerah kota besar tetapi memiliki keseriusan dan komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke pelosok.

Tahun 2010, tiga puskesmas diantaranya puskesmas Baraka, Maiwa, Anggeraja yang diajukan pada 2009 mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*). Menyusul dua puskesmas pada 2011, puskesmas Sudu dan Kabere, dan Puskesmas Buntu Batu dan Kalosi pada 2012. Proses audit setiap enam bulan sekali oleh tim lembaga sertifikasi internasional (SAI) pun rutin dilakukan.

Sebagai syarat PKM ISO adalah pemenuhan SDM yang memadai misalnya penyediaan dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk membantu memaksimalkan pelayanan kesehatan. Selain kelengkapan SDM, pemerintah juga komitmen menganggarkan khusus untuk pembinaan puskesmas. Hasilnya, setiap puskesmas ISO terus berupaya melakukan terobosan. Puskesmas di Baraka misalnya, telah membuat terobosan yaitu melakukan program Pendidikan (konseling) Kesehatan Ibu dan Anak.

Peningkatan Kualitas Dokter Spesialis dan Sarana Prasarana (Kabupaten Luwu)

Berstatus sebagai rumah sakit (RS) tapi memiliki keterbatasan mulai dari sarana dan prasarana, SDM, bahkan keberadaan dokter ahli, membuat RS Batara Guru masih disebut puskesmas plus pada 2005 lalu. Menyadari kondisi tersebut pemerintah daerah (Bupati) merencanakan pengembangan RS menjadi lebih baik. Bahkan Bupati berkeinginan untuk menjadikan Luwu sebagai tujuan kesehatan di wilayah Sulsel bagian utara (Luwu Raya dan sekitarnya).

Berbagai upaya pun dilakukan. Dimulai dengan melakukan akreditasi lima pelayanan yang ada di RS Batara Guru, yaitu unit gawat darurat, rekam medik,

administrasi keuangan, standar pelayanan minimum, dan perawatan. Hasil akreditasi tersebutlah yang menjadi acuan RS untuk melakukan pembenahan. Tahun 2010, pembangunan gedung baru di lahan seluas 6,5 Ha pun dimulai. Dibagi menjadi tiga gedung yaitu Gedung A (UGD), Gedung B (Poliklinik), dan Gedung C (ICU). Gedung-gedung ini pun efektif digunakan pada 2012.

Untuk meningkatkan jumlah dokter ahli yang ada di RS Batara Guru, Pemda menawarkan insentif yang cukup besar, fasilitas rumah dan mobil kepada dokter ahli. Selain itu, pemda pun menyekolahkan 15 dokter untuk mengambil spesialisasi. Cita-cita pemerintah adalah ingin menjadikan RS Batara Guru sebagai pusat rujukan penanganan stroke, hal ini juga dikarenakan untuk wilayah Luwu Raya kasus terbanyak adalah stroke dan kencing manis. Oleh karena itu, fasilitas dan SDM untuk penanganan stroke pun dilengkapi. Hasilnya jumlah pengunjung (pasien) terus meningkat setiap tahunnya baik pasien rawat jalan, rawat inap bahkan UGD.

Akupressur, Layanan Kesehatan Tradisional Berbasis Medis di Puskesmas. (Kabupaten Sidrap)

Jenis layanan akupressur merupakan pengobatan tradisional yang dipraktikkan masyarakat setempat. Hanya saja, tidak memenuhi standar medis masih minim dan hanya berdasarkan pengalaman semata. Agar akupressur dapat dipertanggungjawabkan secara medis, Dinas Kesehatan mengutus beberapa tenaga kesehatan mengikuti pelatihan penangan kesehatan secara tradisional yang memenuhi standar medis pada tahun 2010. *Output*-nya pun sudah dirasakan. Sekarang ini, tiga puskesmas melayani pengobatan akupressur diantaranya Puskesmas Lawawoi, Pangkajene, dan Empage.

Di puskesmas, layanan akupressur cukup diminati masyarakat. Di Lawaoi saja, jumlah kunjungan sejak 14 hingga 30 Desember 2011 sebanyak 16 orang. Kunjungan ini meningkat menjadi 108 orang hingga Mei 2012. Dari pengamatan lapangan, terdapat pasien yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beraktivitas normal setelah mendapat pengobatan akupressur.

Home Care, Pelayanan Kesehatan di Rumah. (Kabupaten Takalar)

Keberadaan puskesmas yang berperan sebagai pelayanan dasar masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya pada tindakan promotif dan preventif. Meskipun tidak meninggalkan perannya sebagai kuratif (pengobatan dasar). Bidang perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) di setiap puskesmas, didorong oleh pemerintah melakukan tindakan pencegahan dini hingga bantuan pengobatan, baik yang telah dirawat (dirumah sakit/puskesmas) maupun yang belum pernah dirawat di rumah sakit/puskesmas.

Mekanisme *home care*, diawali dengan melakukan identifikasi di masyarakat melalui pendataan jenis penyakit sehingga dapat melakukan perencanaan, pendampingan, dan perawatan. *Home care* dianggap efektif karena suasana di rumah bersama keluarga, dapat memberi kenyamanan dan ketenangan yang diharapkan mampu memotivasi dan mempercepat, proses pemulihan kesehatan pasien. Petugas *home care* tidak hanya melakukan tindakan pengobatan tetapi juga melakukan bimbingan kepada

keluarga pasien agar kedepannya dapat lebih mandiri menangani pasien. Kegiatan *home care* dilakukan tanpa pungutan biaya (gratis).

Piagam Warga (Kabupaten Bantaeng)

Sebuah nota kesepakatan pola layanan kesehatan di Desa Bonto Tangnga Kab. Bantaeng yang mengatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi pelaksana kesehatan maupun masyarakat. Awalnya program ini lahir dari inisiatif bidan desa yang berusaha untuk memaksimalkan layanan kesehatan di desa. Layanan yang selama ini biasa-biasa saja, malah cenderung stagnan, berimplikasi pada pola hidup masyarakat yang tradisional dan partisipasi kunjungan ke layanan kesehatan yang juga berjalan di tempat. Stigma pelayanan kesehatan yang mahal, berbelit-belit, dan lebih percaya pada pengobatan tradisional adalah ciri masyarakat desa Bonto Tangnga sebelumnya.

Prilaku-prilaku inilah yang berusaha untuk diubah bidan desa dengan aktif memberi sosialisasi serta kunjungan langsung ke rumah penduduk. Selain itu, temu warga juga terus diaktifkan untuk merangsang minat masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan pemerintah. Berkat dukungan pemerintah, LSM dan ACCESS, tradisi baik ini dicoba untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan membuat sebuah format perjanjian antara masyarakat dan pelaksana kesehatan di tingkatan desa.

Dengan keaktifan dan usaha bidan desa, yang didukung unsur desa, swasta dan pemerintah, partisipasi masyarakat di layanan kesehatan saban hari semakin tinggi. Kemitraan bidan dan dukun pun jauh lebih efektif, dan yang paling penting kepercayaan masyarakat ikut tumbuh.

Usaha dan inisiasi segenap sektor diatas, adalah bentuk kinerja pemerintah untuk memberi pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, juga menunjukkan bahwa kerjasama antara masyarakat, swasta dan pemerintah mutlak terjalin bagi kemajuan pembangunan. Meski masih memerlukan beberapa perhatian dan perbaikan pelaksanaan, hal ini telah memberi garansi, bahwa sudah saatnya pemerintah menyadari hakikatnya sebagai “pelayan masyarakat”.

PELAYANAN ADMINISTRASI DASAR

Perizinan Terpadu yang Tidak Berliku. (Kabupaten Pinrang)

Komitmen pemerintah memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat khususnya pelayanan perizinan berbanding lurus dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan baik izin usaha maupun izin non usaha. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Pinrang merupakan leading sektor program pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang terletak di kantor Pusat Pelayanan Publik.

Sejak resmi dibentuk pada 2011, BP2TPM langsung berbenah. Petugas yang ramah, cepat, dan tepat melayani masyarakat menjadi pemandangan sehari-hari. Konsep pelayanan prima pun diterapkan secara maksimal. Semua tahapan memiliki standar operasional pelayanan (SOP). Tujuannya memberikan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

Kemudahan mengurus perizinan merupakan upaya yang diwujudkan BP2TPM, sejalan dengan mottonya "Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami". Sentuhan program menfokuskan pelayanan terbaik bagi masyarakat, cepat, tidak berbelit-belit, dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel. Masyarakat cukup melengkapi berkas. Selanjutnya surat perizinan segera diterbitkan, sesuai SOP yang ditetapkan.

Selain itu, BP2TPM Pinrang saat ini telah memperoleh hak akses Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik (SPIPISE). Perangkat SPIPISE terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga pemerintah non-departemen, terutama yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di Indonesia. Hasilnya, ribuan surat perizinan dapat diterbitkan dalam waktu singkat. Pada 2012, BP2TPM telah menerbitkan 3.197 izin usaha dan 1.212 izin non usaha.

Layanan Perizinan Terpadu KPTSP (Kab.Bantaeng)

Pelayanan yang berbelit-belit sangat menyusahkan masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bantaeng berupaya memberikan pelayanan maksimal dengan cara memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan investor dalam pengurusan perizinan. Hadirnya KPTSP sejak tahun 2009 yang melayani 10 jenis perizinan, sangat mendukung tumbuhnya iklim investasi di Bantaeng.

Mengusung prinsip transparan dan akuntabel, KPTSP memberikan jaminan pengembalian dua kali lipat kepada masyarakat yang dimintai pungutan liar. Sampai saat ini, belum ada kasus terkait hal tersebut. Selain itu, untuk memudahkan investor, KPTSP menerima berkas administrasi baik melalui email ataupun faks, staf bagian informasi yang akan melakukan pengecekan dan verifikasi berkas perusahaan untuk ditindaklanjuti. Pada 2011 KPTSP mengeluarkan 1.449 perizinan dan meningkat menjadi 1.901 perizinan pada 2012.

Layanan Perizinan Prima (Kota Palopo)

Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Palopo sejak tahun 2007 mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Palopo. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah layanan perizinan tahun 2011 sebanyak 8.174 perizinan. Sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 8.542 perizinan. Bertambahnya jumlah perizinan yang dikeluarkan disebabkan penerapan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Pengurusan perizinan di KPT semuanya berdasarkan SOP yang di tetapkan. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan, KPT membuka ruang publik untuk berperan dalam memberikan pengaduan berupa masukan/saran, ataupun kritikan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan layanan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama KPT dengan media cetak Palopo Pos.

Melalui MoU, ditetapkan bahwa Koran Palopo Pos menjadi salah satu wadah KPT untuk melakukan sosialisasi dan menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini diterbitkan sekali dalam sepekan. Setelah pengaduan tersebut diterima oleh pihak petugas KPT, maka akan ditindaklanjuti hari itu juga. Bentuk tindak lanjutnya tergantung isi pengaduan, apakah hanya perlu klarifikasi atau evaluasi perbaikan layanan.

Rapor Akseptabilitas Izin di SKPD oleh KPTSP (Kabupaten Sidrap)

Kabupaten Sidrap sedang giat menerapkan layanan perizinan terpadu. Di bawah pengelolaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), jumlah layanan yang ditawarkan 21 jenis perizinan.

Mengusung motto “Semua Lebih Mudah”, membuat KPTSP memanjakan pemohonnya. Sebagai garansi mottonya, KPTSP menerapkan sms *centre*. Cukup menekan 082373499900, pemohon mendapatkan informasi posisi berkasnya, syarat tiap jenis perizinan, dan jawaban pengaduan. Masyarakat pun diberikan kemudahan untuk mendapatkan formulir permohonan perizinan karena disebarkan sampai ke kantor desa, kelurahan, dan kecamatan.

Hal yang berbeda pada KPTSP Sidrap adalah adanya rapor SKPD. Ketika KPTSP mengirimkan staf untuk meminta tim teknis di SKPD terkait, memverifikasi kelengkapan atau kelayakan perizinan yang akan diterbitkan, SKPD terkait akan memberikan verifikasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika SKPD tidak memberikan balasan verifikasi, maka KPTSP akan memberikan rapor ”Baik” atau “Buruk”. Hasil laporan ini dikirimkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.

Pengiriman berkas pendaftaran untuk permohonan rekomendasi atau penilaian teknis, tim teknis SKPD berhak menolak secara teknis, atau menerima dengan alasan yang sesuai. Adanya rapor SKPD meminimalisasi lambatnya pelayanan karena persoalan teknis adminisitrasi.

Layanan Prima Perizinan (Kabupaten Soppeng)

Pemerintah daerah menyadari bahwa ada permasalahan dalam pelayanan publik khususnya layanan perizinan. Hal ini terkait belum adanya kepastian pelayanan. Oleh karena itu pada 2012, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mengadakan sosialisasi

pelayanan perizinan pada 18 kecamatan di Soppeng, yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pengurus koperasi.

Untuk memaksimalkan pelayanan, KPT menyediakan sistem antrean elektronik, dan akses informasi melalui website www.kpt.soppeng.go.id. Melalui website ini, masyarakat bisa memperoleh informasi terkait jenis perizinan yang dilayani, retribusi yang dibebankan, serta rekapitulasi laporan penerbitan izin yang *ter-update* setiap hari kerja. Selain itu, masyarakat dapat mengambil formulir pendaftaran perizinan melalui website. Berdasarkan surat keputusan kepala KPT tentang petugas layanan gerak, KPT juga menyediakan layanan jemput bola yaitu mengantarkan izin yang telah diterbitkan yang belum diambil pemohon setelah lewat batas waktunya.

Jemput Bola Perizinan. (Kab. Bone)

Program ini bertujuan memberikan kemudahan masyarakat mengurus perizinan. Selama ini hambatan luas wilayah menyebabkan masyarakat Bone sulit mengakses layanan perizinan. Terlebih masyarakat yang bermukim di perdesaan. Dengan adanya tim jemput bola yang turun secara periodik tiap bulan di kecamatan, menjadi solusi yang cukup efektif mengatasi masalah tersebut.

Selain itu birokrasi di kantor perizinan juga dibenahi. Upaya pemerintah mendekatkan layanan, patut di apresiasi. Masyarakat yang akan mengurus perizinan cukup mengambil formulir di kantor kecamatan. Apabila berkas dinyatakan lengkap, masyarakat tidak perlu mengantar ke kantor perizinan karena petugas siap menjemput. Bagi mereka yang datang langsung ke kantor perizinan dilayani dengan sangat ramah dan tidak perlu berdesakan karena disiapkan kartu antre. Proses pembayarannya pun dipermudah, karena disiapkan loket pembayaran dengan mengedepankan prinsip transparansi.

“Masiga” Pelayanan Cepat Perizinan (Kab. Barru)

Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pemda Kabupaten Barru telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) berdasarkan Perda No 6 tahun 2008. KP3M ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat saat mengurus perizinan. Model ini menyederhanakan prosedur, waktu, dan biaya serta terpusat di satu tempat.

KP3M dengan branding “MASIGA” yang berarti cepat, saat ini melayani 22 jenis perizinan berdasarkan SK Bupati No.262/KP3M/VI/2013 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan. Masiga ini sebenarnya singkatan yang diambil dari kata ramah, pasti, dan gampang.

Jadi, pada saat ada warga yang ingin bermohon mengurus perizinan ataupun melakukan penanaman modal akan mendapat pelayanan yang ramah dari petugas KP3M. Kata pasti yang berarti sudah tetap, adalah suatu kepastian akan persyaratan administratif, teknis, waktu, dan biaya.

Selanjutnya, kata gampang yang berarti mudah, dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Secara garis besar, KP3M ini bekerja untuk memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur perizinan dan penanaman modal. Program ini disosialisasikan ke setiap kecamatan, informasi media cetak, dan audio. Barru bahkan menyelenggarakan

kegiatan pemilihan duta pelayanan publik. Sejak KP3M berdiri pada 2010 jumlah perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2010 sebanyak 576 izin, pada 2011 sebanyak 995 izin, tahun 2012 sebanyak 4.928 izin, dan pada 2013 tercatat 1.114 izin.

PARTISIPASI PUBLIK

Warung Demokrasi (Kab. Luwu Utara)

Diskusi-diskusi yang berkembang di masyarakat, tidak mendapat respon dari pemerintah karena wadah untuk mempertemukan antara masyarakat dengan penentu kebijakan memang tidak tersedia. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Forum Masyarakat Luwu Utara (FAKTA). Melalui warung demokrasi, FAKTA menghadirkan berbagai narasumber mulai dari bupati dan wakil bupati, unsur SKPD, dan legislatif.

Kegiatan utama Warung Demokrasi adalah diskusi yang membahas isu-isu utama, baik skala lokal maupun isu nasional yang punya korelasi kuat dengan persoalan pembangunan di Lutra. Sebelum proses diskusi berlangsung narasumber memberikan materi pengantar sesuai dengan tema diskusi yang dilaksanakan. Melalui forum inilah peserta/masyarakat bisa bertanya langsung berbagai hal terkait tema diskusi, selanjutnya pihak pemerintah menjawab atau mengklarifikasi pertanyaan atau tanggapan dari peserta diskusi.

Acara diskusi yang dihadiri hingga 50 orang ini, disiarkan *live* Radio Adira Masamba. Animo masyarakat berpartisipasi dalam diskusi cukup baik, karena keterbukaan dijamin. Masyarakat yang tidak sempat hadir pun diberikan kesempatan untuk bertanya melalui nomor 0811 460 9250 dan narasumber langsung menjawab.

Program yang hanya berawal dari diskusi di warung kopi, telah melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang menjadi masukan/rekomendasi dalam perencanaan pembangunan di Luwu Utara. Di antaranya program revitalisasi Sungai Masamba yang telah dianggarkan di APBD 2013.

Musrenbang Perempuan (Kab. Bantaeng)

Peran perempuan dalam proses perencanaan dan pembangunan masih sangat rendah. Akibatnya, aktor-aktor pembangunan didominasi laki-laki, dan program-program yang terakomodir dalam perencanaan jarang yang menyentuh pihak perempuan. Peran-peran perempuan pun setiap hari makin terdistorsi. Oleh karena itu, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berusaha memaksimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya berlangsung sehari ditambah porsinya satu hari lagi, khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Pesertanya murni perempuan yang ada di desa, tapi tetap didampingi unsur BPD dan kepala desa. Hasilnya pun menggembirakan, tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang semakin tinggi, identifikasi kebutuhan program jauh lebih mudah dan merata, dan varian program di desa lebih variatif dan menyentuh sektor-sektor rumah tangga.

Forum Komunikasi Kelurahan Siaga (Kota Parepare)

Forum Komunikasi Kelurahan Siaga (FKKS) dibentuk untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan kelurahan siaga. FKKS bekerja sama Dinas Kesehatan melakukan upaya sosialisasi untuk merangsang replikasi kelurahan siaga Model Operasional Desa Siaga (MODS). Awalnya, program ini dibiayai oleh *Second Decentralized Health Service Project* (Proyek DHS-2), namun telah berakhir pada tahun

2011. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi pengembangan MODS ke depannya. Padahal keberadaan kelurahan siaga MODS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari segi pelayanan kesehatan dasar. Itulah sebab, dipandang patut dipertahankan dan dilanjutkan.

Hasil komunikasi pengurus forum kelurahan siaga kemudian menemukan peluang melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat. Hasilnya kelurahan siaga pun mendapatkan pembiayaan dari APBD Parepare 2012 yang melekat pada pagu wilayah Dinas Kesehatan sebesar Rp. 530.950.000,-.

Selain melakukan advokasi dan pendampingan intensif untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah daerah, FKKS pun berhasil menginisiasi terbentuknya tiga kelurahan siaga baru. Sehingga sampai dengan tahun 2012, total terbentuk 14 kelurahan siaga dari target 22 kelurahan yang ada hingga 2015.

Kemitraan Tiga Pihak (Kab. Luwu Timur)

Setiap tahunnya PT. Vale rutin merealisasikan dana CSR untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Besarnya dana yang terealisasi mencapai Rp50 miliar, namun dampak yang dirasakan tidak jelas, baik pada pembangunan dan pengembangan masyarakat maupun pada pembangunan infrastruktur publik. Bahkan menjadi bagian dari tingginya inflasi yang terjadi di Lutim terutama di daerah terdampak.

Tidak jelasnya dampak dan penerima manfaat/sasaran dari realisasi CSR tersebut, membuat Bupati Luwu Timur menginstruksikan untuk menghentikan sementara realisasi CSR PT. Vale sejak awal 2012. Dari hasil evaluasi program, lahirlah kemitraan tiga pihak antara PT.Vale, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat melalui CSR PT. Vale. Kesepakatannya adalah, pemerintah turut serta sebagai elemen komplementer dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring terhadap realisasi CSR PT. Vale.

Tahapan sementara, melibatkan unsur pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan asistensi, seleksi, dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan warga/kelompok. Setelah itu, dilakukan monev yang melibatkan unsur SKPD dan PT.Vale. Hasilnya, penerima manfaat lebih jelas dan daya serap anggaran lebih terukur. Kedepannya program yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari PT.Vale tidak lagi dengan proposal, akan tetapi berdasarkan hasil perencanaan melalui musrembang, yang dampaknya lebih terukur dan transparan.

Forum Multi-Stakeholder (Kab. Bulukumba)

Forum multi-stakeholder merupakan kegiatan dialog dan diskusi mengenai berita-berita yang hangat di media (baik cetak maupun elektronik) terkait Kabupaten Bulubumba, baik itu pemerintahannya, birokrasi, maupun masyarakatnya sendiri. Tidak hanya mengundang organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi mahasiswa dan organisasi pemuda, forum ini juga menghadirkan unsur-unsur pemerintah sebagai narasumber.

Melalui forum ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang ditanggapi langsung oleh narasumber. Kegiatan yang rutin dilaksanakan

setiap minggu ini, juga terlibat aktif dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Melalui mediasi Kesbangpol, kemudian dibentuk Pusat Pendidikan Kebangsaan berdasarkan keputusan Bupati Bulukumba Nomor 444/XI/2012 tentang kelompok kerja pusat pendidikan kebangsaan.

AKUNTABILITAS PUBLIK

Transparansi Dokumen Publik secara Online (Kota Parepare)

Aturan mengenai transparansi terhadap dokumen publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut, pemerintah Kota Parepare mengeluarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011, tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala PPID. Dalam rangka menyediakan akses informasi publik, PPID Parepare menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti *desk* layanan informasi dan layanan akses internet gratis.

Realisasi peraturan tersebut, dirasakan tidak lama setelahnya. Melalui website pemerintah kota pareparekota.go.id, masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan dokumen publik yang dibutuhkan. Mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan keuangan, APBD, dokumen statistik, serta dokumen transparansi pengelolaan anggaran daerah lainnya.

Lembaga Penyiaran Pulik Lokal, Radio Sinjai Bersatu (RSB) (Kabupaten Sinjai)

Hadirnya RSB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui penyiaran informasi di RSB, pemerintah berbagi berbagai kebijakan pemerintah, publikasi dan promosi potensi daerah, pelestarian budaya daerah, serta melakukan komunikasi dialogis dengan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama memberikan kontrol dalam pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai program yang dilaksanakan Radio SB FM, setidaknya telah mengakomodasi keluhan dan saran dari masyarakat dan mewujudkan transparansi kegiatan dan anggaran dari pemerintah. Misalnya program Ma'Ca (Mari Bicara), yang menghadirkan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk memberikan informasi tentang program kerja instansinya. Setelah itu, masyarakat (pendengar) diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, saran, bahkan menyampaikan keluhan.

Selain Ma'Ca, program lain yang ditawarkan antara lain Penyuluh Berbagi, Ada Pak Desa Siaran (APDESI), Dokter Kita, Suara Masyarakat Suara Kita (SMS Ka), Jurnal Aspirasi Rakyat (Jas Rakyat), serta Dialog Hukum. Rentang waktu siaran terkait program-program tersebut adalah Pukul 11.00-12.00 WITA dan 13.00 – 15.00 WITA, mulai Senin – Kamis setiap minggunya. Radio SB FM pun telah menyediakan fasilitas radio digital yang dapat diakses melalui website www.sbfmsinjai.com, sehingga masyarakat yang berada di luar Sinjai tetap dapat mendengarkan siaran. Tidak hanya yang sedang live, siaran-siaran yang sudah lewat juga dapat diakses kembali.

Tim Tuntutan Ganti Rugi (Kabupaten Luwu Timur)

Tuntutan ganti rugi (TGR) bukan hal baru dalam program pemerintahan. TGR merupakan keharusan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelesaian kerugian negara dan daerah terkait adanya temuan keuangan dalam pemeriksaan keuangan oleh aparat pemeriksa. TGR perlu untuk penyelesaian damai dalam penggantian temuan keuangan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan keuangan oleh aparat pemeriksa.

Tim TGR Luwu Timur terdiri atas Tim Tindak Lanjut dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR). Keberadaan MPTGR ini yang membedakan Tim TGR Luwu Timur dengan daerah lainnya. Jika Tim Tindak Lanjut bertugas menginventarisasi semua temuan keuangan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan, maka MPTGR bertugas melakukan sidang upaya damai dalam hal penyelesaian temuan keuangan. Penanganan penyelesaian keuangan yang tidak bisa diselesaikan dalam persidangan MPTGR diserahkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk konsisten melaksanakan program ini. Penyelesaian temuan keuangan oleh Tim Tindak Lanjut mencapai 84,80% dari 290 rekomendasi temuan pada 2011, dan meningkat 92,77% dari 308 rekomendasi temuan pada 2012. Adapun pengembalian keuangan dari temuan yang diselesaikan oleh Tim Tindak Lanjut mencapai Rp 854.668.782,- pada 2011, dan Rp 349.100.075,- pada 2012. Sedangkan melalui MPTGR mencapai Rp 115.064.823,- pada 2011, dan Rp 265.410.371,- pada 2012.

Lelang Jabatan, Tes Kompetensi Terbuka Bagi Pejabat Eselon (Kab. Maros)

Penentuan pejabat eselon di Kabupaten Maros tidak serta merta diputuskan oleh Bupati. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terlebih dahulu melakukan tes kompetensi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi jabatan/posisi yang kosong mulai dari level eselon IV, III, bahkan II.

Mekanismenya adalah *pertama*, BKD melakukan pengumuman secara terbuka kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Melalui surat pengumuman/edaran BKD mengumumkan posisi/jabatan yang lowong lengkap persyaratan yang dibutuhkan beserta prosedur untuk melakukan pendaftaran. Kelengkapan berkas pendaftar akan diverifikasi oleh panitia. Pendaftar yang dinyatakan lolos uji berkas, dipersiapkan untuk mengikuti tes kompetensi yang terdiri atas tes tertulis dan wawancara.

Tes tertulis terdiri atas tes pengetahuan umum, tes keahlian mengenai pilihan jabatan yang dipilih, dan tes psikologi (psikotes). Sedangkan tes wawancara dilakukan oleh Baperjakat. Tidak jarang tes wawancara ini dilakukan langsung oleh bupati. Seluruh skor kemudian akan diakumulasi berdasarkan hasil tes kompetensi, pengalaman dan golongan. Hanya tiga ranking teratas direkomendasikan kepada bupati untuk diputuskan. Khusus untuk pejabat eselon II diputuskan oleh gubernur. Setelah ada keputusan bupati, maka BKD mempersiapkan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat, kemudian dilakukan pelantikan dan sertijab.

Audit Sosial Berbasis Komunitas (Kota Makassar)

Audit sosial adalah penilaian program pembangunan yang melibatkan masyarakat/komunitas, kelompok rentan/marginal/miskin, secara langsung untuk mencari hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah pembangunan. Audit sosial melihat sejauh mana sebuah kebijakan dianggap dapat menyelesaikan masalah masyarakat secara substansial melalui *cross check* terhadap isi cakupan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan oleh institusinya, persepsi penerima manfaat, hasil yang diharapkan secara faktual dan dampak sosial atas kebijakan.

Pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama melakukan audit sosial, sejak 2011. Fokus audit adalah pada program pendidikan gratis Kota Makassar atau sekolah bersubsidi penuh dan pelayanan kesehatan gratis. Tujuan audit sosial diantaranya: *pertama*, mendorong pemerintah makassar agar dapat membangun partisipasi publik dalam pelaksanaan akuntabilitas pembangunan dan membuka ruang pengawasan publik. *Kedua*, mengintegrasikan penguatan kapasitas pemerintah dan komunitas dalam melakukan audit sosial sebagai instrumen penerapan akuntabilitas publik, dan menjadi gerakan sosial bersama antara pemerintah dan masyarakat. Serta, membangun kemitraan pemerintah kota makassar dengan masyarakat dalam pembelajaran audit sosial dalam melakukan kontrol bersama terhadap beberapa program pembangunan yang dijalankan oleh SKPD terkait TKPKD.

Proses audit dilakukan melalui mekanisme *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam. Awalnya audit hanya dilakukan di kawasan tertentu, namun sejak 2012 sudah melibatkan seluruh kecamatan (14 kecamatan) yang terbagi dalam lima wilayah komunitas. Setiap komunitas di wakili oleh 20 orang, yang melibatkan pihak sekolah dan puskesmas terkait. Hasilnya, terbentuk kelompok komunitas pengawas pembangunan yang melakukan audit sosial, yang menghasilkan rekomendasi langsung dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. (*)

E-Procurement, 100% Pasti Bersih (Kab. Soppeng)

Pelaksanaan program diawali dari studi banding ke Luwu Utara berdasarkan surat tugas tahun 2011 tertanggal 14 Jan 2011, dari berbagai SKPD terkait (teknis), termasuk Sekda. Gambaran yang telah diterima membuat komitmen untuk merealisasikan program yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun DPA untuk pengadaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2012, studi banding kembali dilakukan ke Surabaya yang diikuti DPRD, Kepala Bappeda, Kadis DPPKD, dan Bagian Pembangunan untuk melihat dari dekat pelaksanaan E-Procurement.

Menindaklanjuti dari berbagai kunjungan lapang, diadakanlah Manajemen Training di LKPP Pusat di Jakarta Awal 2012. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pengadaan barang, pemasangan sistem dan jaringan hingga bisa diaplikasikan. September sistem *dilaunching* dan sekaligus sosialisasi dengan mengundang rekanan, SKPD, wartawan. Saat launching diujicoba 1 paket tender Pengkayaan Reboisasi Sungai Jeneberang di bawah komando Dinas Kehutanan dan Perkebunan Soppeng. Agar masyarakat dapat mengoperasikan sistem, maka diadakanlah pelatihan kepada rekanan, auditor, panitia tender secara bertahap (sehari untuk satu kali sosialisasi).

Fasilitas yang telah disediakan: ruangan bidding untuk rekanan dalam mengakses dan juga untuk masyarakat luas, atau siapa yang membutuhkan, ruang training yang mengajari rekanan yang belum memahami cara pengajuan tender setelah itu baru diarahkan ke ruang bidding. Jaringan ini juga untuk mengantisipasi rekanan yang mengalami masalah koneksi internet di luar kantor. Selain itu ada juga dipasangkan sistem wireless di ruang kelompok kerja (pokja = panitia tender), juga ada hotspots di ruang tunggu, dan sebagainya.

- Layanan helpdest (call center) fungsinya untuk membantu rekanan melalui telp 0484 211010 (belum dipublikasikan), tapi no staf teknis dipublikasikan dan email LPSE.
- Ada pesan pamflet tertulis, bebas KKN
- Ada pengaduan di sistem yang dapat dikirim lewat email, ada jawaban.
- Genset,

Ada aplikasi tambahan yang rekanan bisa men-download di sistem, juga buku panduan penggunaan sistem dibagikan kepada rekanan auditor dan panitia ketika mereka datang.

PELAYANAN AIR MINUM

'Bersama' PDAM, Air Bersih untuk Semua (Kota Palopo)

Pemerintah Kota Palopo melalui PDAM memang patut diapresiasi. Terobosan berbagai kebijakan dilakukan dalam memberikan layanan air bersih. Ada tiga strategi penting telah dijalankan PDAM Palopo saat ini, perbaikan kondisi keuangan, manajemen, dan teknik.

Upaya penyehatan keuangan, pemerintah Kota Palopo berperan dalam penyertaan modal. Selama tiga tahun berturut-turut, total dana APBD yang dikucurkan sebesar Rp24 miliar. Anggaran digunakan sebagai modal pembangunan instalasi pengolahan air dan biaya perbaikan kerusakan jaringan instalasi.

Keberpihakan anggaran ini menjadi jalan bagi PDAM untuk mengembangkan diri. Hingga akhirnya mendapat kepercayaan pihak perbankan, kemudian mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah. Belum lagi dukungan AusAID, lembaga donor Australia untuk 2.000 sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan jumlah anggaran Rp5 miliar. PDAM Kota Palopo juga berhasil melakukan restrukturisasi utang. Bahkan sejak 2009, telah membuat bisnis plan sebagai syarat administrasi penghapusan utang non pokok.

Dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan, manajemen PDAM Palopo rutin berkonsultasi dengan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga wajar jika laporan keuangan PDAM Palopo sejak 2010-2012 meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Peran serta dewan pengawas dalam pendampingan dan upaya-upaya mendorong PDAM dalam peningkatan kualitas layanan, juga cukup besar. Demikian juga partisipasi stakeholders lainnya. Media lokal diberi ruang untuk ikut mengontrol setiap kebijakan pemerintah dan PDAM. Termasuk pembentukan forum pelanggan yang banyak memberikan masukan.

PDAM Kota Palopo yang memiliki luas wilayah layanan 155,19 kilometer persegi, berkomitmen menata aspek tekniknya. Penanganan instalasi ditangani secara profesional. Tim teknik di lapangan selalu siaga mengidentifikasi masalah kebocoran pipa. Patugas tidak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat, semuanya diselesaikan berdasarkan stándar operasional pelayanan (SOP).

Dari berbagai langkah-langkah teknik yang dilakukan, ternyata memberikan pengaruh positif. PDAM berhasil menurunkan tingkat kebocoran dari 40,17 persen pada 2011, menjadi 37,82 persen pada 2012.

Meski berada jauh dari ibu kota provinsi, tetapi PDAM Kota Palopo tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi tinggi. Seperti alat baca meter Bima Sakti digunakan untuk mendata penggunaan air pelanggan setiap bulan. Tujuannya, meminimalisasi kesalahan petugas baca meter. Hasilnya signifikan, baca meter Bima Sakti mengurangi banyaknya komplain dari pelanggan. Alat ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan bulanan hingga menyentuh angka Rp300 juta.

Sarana laboratorium pun dimiliki. Tersedia satu ruangan khusus yang digunakan untuk menjaga kualitas air. Laboratorium ini dijaga oleh petugas, secara rutin memeriksa agar air yang didistribusikan terjamin kesehatannya.

Nilai lebih lainnya yang dimiliki, disediakan sistem layanan pengaduan yang diberi nama “SMS Centre”. Tujuannya, menampung keluhan dan kritik konstruktif agar pelayanan berjalan maksimal. “SMS Centre” juga efektif digunakan pelanggan, termasuk menanyakan berapa jumlah tagihan bulanannya.

Rekayasa Instalasi Pengolahan Air. (Kab. Enrekang)

Program inovasi yang dilakukan PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang adalah program untuk mengatasi keterbatasan alat instalasi pengolahan air (IPA), yang dimana pada saat itu IPA yang akan digunakan nantinya untuk mengolah air baku tersebut dalam proses pengerjaan atau belum selesai dan belum bisa di manfaatkan. Sedang kebutuhan masyarakat terhadap air sangat mendesak. Karena itu PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang melakukan inisiatif untuk memanfaatkan peralatan yang ada seperti reservoir yang dapat di fungsikan sebagai IPA. Hal tersebut dilakukan agar air dapat dipakai untuk dimanfaatkan kepada masyarakat segera, daripada air terbuang percuma dan tidak termanfaatkan. Karena ketika dilakukan observasi terhadap sumber air baku (mata air) yang kini kondisinya sudah mulai rawan/kritis akibat adanya peladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili dekat dari sumber air baku.

Tempat pelaksanaan program rekayasa IPA ini hanya di laksanakan di kecamatan Enrekang (Kota Kabupaten) saja. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lain tidak dilakukan karena IPA sudah ada dan kondisinya masih sangat baru seperti IPA Bongso yang terletak di Buntu Batu.

Dalam upaya Pemda untuk meningkatkan akses air minum ke masyarakat perkotaan di Kabupaten Enrekang dengan sistem tata kelola pelayanan yang maksimal dan baik, Pemda melalui PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang mencoba melakukan peningkatan pelayanan tersebut. adapun target yang diharapkan yaitu, bagaimana mengolah air keruh yang berasal dari sumber air baku menjadi air bersih untuk di olah dan di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kecamatan Enrekang (Kota Kabupaten) dengan sistem pengolahan air baku secara sederhana dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Cara pengolahan tersebut kemudian coba di rekayasa oleh tenaga teknis PDAM, sambil menunggu rampungnya pembangunan sistem IPA yang nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Keunggulan program ini karena sistem pengolahannya dilakukan secara sederhana namun hasilnya tidak jauh berbeda dengan sistem IPA. Pada sistem rekayasa ini hanya ada 2 proses yang dilakukan yaitu Fluktuasi, dan Sedimentasi (pengendapan). Namun, tingkat pemakaian tawas itu sangat tergantung pada tingkat kekeruhan air, karena semakin keruh air semakin banyak tawas yang digunakan. Sedangkan pada sistem IPA itu ada 3 proses yang dilakukan yaitu, Fluktuasi, Sedimentasi, dan Filtrasi (penyaringan). Akan tetapi biaya bahan-bahan kimia akan lebih murah jika memakai sistem IPA.

Hasilnya, dengan melakukan rekayasa IPA ini kebutuhan air ke masyarakat dapat terlayani yang ada di Kecamatan Enrekang, terutama di lingkungan perumahan Pinang dan Talaga yang dulunya kebutuhan air di lingkungan tersebut sangat sulit untuk terpenuhi. Karena di lingkungan tersebut termasuk daerah yang sangat sulit mengakses air bersih. Dan juga kebutuhan air pada musim kemarau juga sudah dapat teratasi. Selanjutnya, jumlah pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha di Kecamatan Enrekang juga semakin bertambah.

Pasang Baru Instalasi Air Minum Sistem Kredit (Kab. Takalar)

Kabupaten Takalar terletak di sekitar wilayah pesisir. Kondisi air tanahnya yang asin menyebabkan masyarakat sulit menggunakan air sumur untuk konsumsi air minum. Sebelum mendapatkan akses air PDAM, masyarakat pesisir hanya membeli air minum dari penjual keliling dalam bentuk galon.

Kondisi ini berlangsung cukup lama, khususnya bagi masyarakat yang bermukim dipinggir kota. Oleh karena itu, mengantisipasi hal tersebut pemerintah membangun beberapa instalasi kota kecamatan (IKK) air minum. Tujuannya, memberikan kemudahan akses air bersih kepada semua masyarakat bukan hanya di kota tetapi juga di daerah terpencil.

Kendala lainnya yang berhasil ditangani pemerintah adalah biaya administrasi sambungan baru. Mengatasi hal tersebut pemerintah membuat terobosan melalui program sistem kredit sambungan baru. Meskipun PDAM belum melibatkan lembaga keuangan dalam sistem kredit, tetapi masyarakat merasa sangat terbantu dengan pemberian keringanan pembayaran sambungan baru tersebut.

Prosesnya pun sangat mudah. Masyarakat yang ingin sambungan baru cukup melapor ke petugas lapangan atau ke kantor PDAM, mengisi formulir, menyiapkan foto copy KTP/kartu keluarga.

Selanjutnya, pihak PDAM memberikan informasi terkait sistem pembayaran pada biaya sambungan baru. Calon pelanggan diberikan pilihan bayar Cash (lunas) atau bayar sistem kredit. Ketentuannya bagi yang membayar Cash cukup membayar Rp. 700 ribu. Sedangkan yang membayar biaya sambungan sistem kredit, total pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp. 750 ribu. Berdasarkan ketentuan, pelanggan yang menggunakan alur sistem kredit, maksimal membayar uang muka antara Rp. 400 ribu, Rp. 300 ribu, hingga Rp. 200 ribu. Selebihnya diangsur Rp. 50 ribu/ bulan.

Upaya mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan, PDAM juga menyiapkan layanan pengaduan, informasi rekening tagihan bulan berjalan melalui SMS centre. Fasilitas lainnya yang dimiliki PDAM Takalar saat ini adalah sistem baca meter bekerja sama dengan aplikasi bima sakti. Tujuannya untuk mengetahui jumlah tagihan secara tepat dan benar sehingga mengurangi komplain pelanggan.

Selain itu, PDAM Takalar telah memiliki sistem *geographics information system* (GIS). Dengan adanya teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan pemetaan jaringan pipa sehingga permasalahan penataan dan perbaikan jaringan. Demikian juga, melalui alat ini perbaikan pipa mengatasi kebocoran mudah dilakukan.

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah dan PDAM yang terus berupaya melakukan perbaikan kinerja teknik, manajemen dan keuangan. Respons positif masyarakat sebagai pelanggan terhadap PDAM Takalar sangat baik.

Kinerja maksimal ini pula dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pelanggan sejak dua tahun terakhir. Sejak 2011, jumlah pelanggan mencapai 7.927 sedangkan pada 2012, meningkat menjadi 9.150 pelanggan.

Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelanggan Melalui SMS Centre dan Website (Kota Parepare)

Setiap layanan publik tentunya harus menyediakan layanan pengaduan sebagai salah satu cara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejak awal berdirinya, PDAM Parepare telah menyediakan layanan pengaduan melalui *call center* 121 (kerjasama telkom), berakhirnya kontrak kemudian layanan pengaduan difasilitasi melalui 0421 – 21500, namun tidak efektif untuk mengakomodasi keluhan pelanggan. Biasanya karena petugas sudah berada dilapangan, aduan baru masuk sehingga seringkali penanganan terlambat.

Untuk mengatasi problem tersebut PDAM Parepare mendesain model pengaduan melalui SMS Center (2009) dan Website (2011). Melalui SMS Center pelanggan bisa mendapatkan informasi dan menyampaikan aduan. Pelanggan cukup mengirim SMS ke 0811 421 6500, sesuai dengan format yang telah disediakan.

Adapun mekanismenya adalah SMS aduan tersebut akan masuk ke server, kemudian server akan meneruskan ke semua daftar telepon yang ada di server (direktur dan karyawan/staf PDAM), jadi tidak lagi menggunakan tenaga admin untuk meneruskan SMS yang masuk. Sehingga ketika ada aduan, bisa langsung diakomodir oleh staf yang bersangkutan. Selain melalui SMS center masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui website www.pdamparepare.com

Tidak hanya penanganan pengaduan yang semakin efektif tetapi juga hubungan baik dengan pelanggan pun dapat dimaksimalkan. Berdasarkan hasil survei, keberadaan program inipun dipersepsi baik oleh masyarakat.

Peningkatan Layanan PDAM (Kota Makassar)

PDAM sebagai penyedia air minum bagi masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan (masyarakat). Namun tidak hanya itu, sebagai perusahaan juga harus mampu mandiri dalam mengatur dan mengelola, serta berkembang. Mandiri juga dalam artian kemampuan financial. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui penerimaan yang wajar atas hasil usaha perusahaan. PDAM Makassar pun menyadari hal tersebut.

Dalam perjalanannya banyak faktor yang menyebabkan kurangnya penerimaan PDAM Makassar, diantaranya (1) angka kehilangan air (NRW) yang tinggi mencapai 48%. Upaya pencarian kebocoran di siang hari dianggap belum efektif. (2) Kesalahan baca meter oleh petugas yang bukan hanya dapat merugikan pelanggan tapi juga PDAM sendiri. Dan (3) Piutang PDAM yang cukup tinggi mencapai 20%.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat, sekaligus meningkatkan penerimaan PDAM. Memanfaatkan teknologi menjadi salah

satu solusinya. Mulai dari penggunaan kamera baca meter untuk meminimalisir kesalahan baca meter oleh petugas lapangan, adanya fasilitas *Payment Point for Online Bank* yang memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran, serta penggunaan *electronic data capture* (EDC) sebagai alat transaksi penagihan tunggakan pelanggan. Melalui EDC penerimaan PDAM dari pembayaran tunggakan pelanggan pun meningkat dari Rp 513.650.950,- pada 2011 menjadi Rp 3.571.448.412,- di tahun 2012. PDAM Makassar menjadi yang pertama jika dibandingkan dengan PDAM lainnya di Sulsel dalam memanfaatkan berbagai teknologi tersebut.

Selain itu untuk mengurangi NRW, PDAM Makassar pun melakukan posko malam hari serta memanfaatkan pemetaan jaringan oleh GIS untuk mendeteksi kebocoran air. Pada dasarnya hal ini dianggap efektif, namun belum mampu mengurangi angka kehilangan air karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan sambungan ilegal (*illegal connection*).

Secara garis besar berbagai upaya yang dilakukan oleh PDAM Makassar telah terlihat dari peningkatan penerimaan PDAM dan jumlah pelanggan. Jika pada 2011 laba bersih PDAM sebesar Rp21.614.844.499,- meningkat menjadi Rp 28.368.853.699,- pada 2012. Jumlah pelanggan pada 2011 adalah 154,500 dan meningkat menjadi 158,777 pada 2012. Hal ini pun tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kota Makassar misalnya menyetujui penyesuaian tarif air sesuai dengan usulan PDAM dan memfasilitasi PDAM dalam upaya pengembangannya dan perbaikan kinerja PDAM.

Pengelolaan Data Spasial Pelanggan dan Jaringan Berbasis GIS (Kab. Maros)

Latar belakang program ini karena adanya kesulitan dalam identifikasi jaringan (letak, diameter dan jenis pipa). Selain itu, jika ada pelanggan baru harus dibuka data jaringan dengan cara manual atau paling tidak letak jaringan dilakukan berdasarkan ingatan. Kondisi ini membuat proses bagi pelanggan baru untuk menikmati jaringan air ke rumahnya menjadi sangat lama

Teknologi GIS merupakan sebuah perangkat software berbasis jaringan yang dimanfaatkan untuk mengetahui dengan mudah posisi/letak suatu peralatan dengan sebelumnya dilakukan melalui proses digitasi (input data) data geografis via GPS dan pemanfaatan google map. Fasilitas ini digunakan oleh PDAM untuk melakukan pemetaan terhadap posisi asset perpipaan, sehingga akan memudahkan pelayanan dan perluasan pelanggan. Prosesnya terlebih dahulu dilakukan penginputan oleh petugas yang telah dilatih khusus untuk masing-masing lokasi terkait dengan perpipaan di wilayahnya baik panjang, letak dan diameter pipa dan umur pipa. Data-data perpipaan ini didasarkan pada data-data dasar/awal di masa lalu, kemudian diinput dalam data base GIS, yang letaknya kemudian diidentifikasi dengan memanfaatkan GPS. Data letak melalui GPS ini kemudian diinput juga sehingga nantinya akan membentuk semacam data kongkrit tentang asset perpipaan PDAM.

Adanya data digital yang demikian akan mempermudah petugas untuk mengidentifikasi posisi pipa, diameter, tekanan air dan biaya yang diperlukan jika ada pelanggan baru yang ingin mengakses air PDAM. Ketika ada pelanggan baru, para petugas tinggal memasukkan alamat calon pelanggan, maka dengan otomatis, GIS akan memperlihatkan posisi pipa terdekat di wilayah/lokasi itu. Petugas akan diperlihatkan

peta posisi rumah pelanggan terhadap posisi pipa, maka petugas kemudian dapat membuat/mendapatkan bagaimana sketsa awal untuk pembuatan jaringan baru tersebut .

Melalui bantuan GIS petugas akan merencanakan peta sambungan yang efisien, sehingga dengan mudah petugas juga akan dapat mengestimasi biaya sambungan baru. Estimasi biaya sambungan baru tersebut dilakukan dengan mengukur secara digital jarak pipa sumber ke lokasi rumah calon pelanggan. Melalui proses ini maka telah didapatkan peta lokasi pipa sumber terdekat, posisi calon pelanggan terhadap pipa, rencana dan peta sambungan baru serta biaya sambungan.

LAYANAN SANITASI

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Komunal (Kota Makassar)

Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Pokja AMPL (Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kesehatan) memang sangat laik diapresiasi. Terobosan yang dilakukannya, mengembangkan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dengan membangun pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal. Proyek IPAL ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Program tersebut didukung perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Pemetaan situasi sanitasi tertuang dalam buku putih sanitasi. Buku putih tersebut merupakan potret yang mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis seperti: aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta aspek-aspek lainnya. Proyek ini didukung lembaga donor seperti AusAID, IUWASH USAID, Sanimas, Swash Care, USRI, MSMHP, dan Pamsimas.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali di anggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain. Namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat. Semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan.

Makassar menuju kota dunia dengan tingkat pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus bertambah, dengan rata-rata kenaikan 1,56 persen per tahunnya. Bayangkan jika pertumbuhan penduduk terus berkembang sementara penanganan terhadap sanitasi tidak dikembangkan, maka akan terjadi pencemaran terhadap tanah dan air yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pengelolaan sanitasi menjadi prioritas, sebab bila tidak maka akan berakibat buruk terhadap masyarakat. Akibat buruk dari kualitas prasarana sanitasi dapat meningkatkan risiko kesehatan lingkungan terutama penularan penyakit, misalnya diare, demam berdarah, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya berbagai jenis penyakit terutama diare, pembangunan IPAL menjadi salah satu solusi tepat.

Pembangunan IPAL komunal ini dilakukan dengan praktik yang cukup mengesankan. Mengapa? Karena beberapa titik pembangunan bak IPAL seperti di kelurahan Suangga, Layang, dan Mandala dibangun di atas beton jalan umum. Pembangunan bak IPAL di atas poros lorong jalan, dilakukan karena lahan kosong yang ada di kota Makassar sudah sangat terbatas.

Proses pembangunan sistem IPAL komunal ini tetap berjalan berdasarkan mekanisme, seperti sosialisasi bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dengan mengundang unsur pemerintah setempat (kelurahan) sejawaran Kota Makassar. Kelurahan bisa mengajukan permohonan pembangunan IPAL komunal. SKPD selanjutnya melakukan peninjauan dan mempersiapkan program jika disetujui.

Tahapan berikutnya, dilakukan pemicuan oleh bidang sanitasi dari dinas kesehatan. Setelah dilakukan pemicuan, pada tingkatan masyarakat dibentuk kelembagaan seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil pembentukan kelembagaan tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh pemerintah setempat (lurah) sebagai penguatan keberadaan lembaga tersebut di tingkatan masyarakat.

Seiring berjalannya proses pembangunan IPAL komunal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya dibentuk kelembagaan bagi pengguna dan penerima manfaat, seperti Badan Pengelola Sarana Sanitasi (BPSS), dan Kelompok Pemelihara serta Pemanfaat (KPP) Sanitasi yang dimediasi oleh KSM atau BKM setempat. Tujuan dibentuknya BPSS dan KPP ini agar masyarakat dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sarana IPAL komunal tersebut. Salah satu cara bentuk pengelolaan dan pemeliharaan dengan menarik tarif masyarakat pengguna dan pemanfaat, dengan model subsidi silang yang disepakati bersama.

Pembangunan IPAL komunal di kota Makassar dari tahun 2007 hingga 2012, telah dibangun sebanyak 60 titik dengan jumlah sasaran per Kepala Keluarga (KK) masing-masing tiap IPAL komunal antara 15 sampai 100 KK

Replikasi Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (Kab. Enrekang)

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Enrekang secara persentase 85% berbukit dan curam. Untuk menjangkau masyarakatnya yang berada di desa-desa tidak semudah dengan masyarakat yang ada di kawasan perkotaan pada umumnya. Karena itu pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya yang berada di pelosok desa yang jauh butuh waktu perjalanan yang harus di tempuh dari tempat tinggal masyarakat tersebut.

Dari data pemilikan jamban keluarga di Kabupaten Enrekang, persentase jamban sehat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2008 persentase jamban sehat sebesar 73,33% meningkat menjadi 81,5% pada tahun 2009 dan 89,09% pada tahun 2010 (data Profil Kesehatan Kab. Enrekang 2011). Meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun tetap perlu mendapat perhatian yang serius mengingat masalah jamban keluarga ini sangat erat dengan sanitasi lingkungan masyarakat. Karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melalui Bidang P2PL tetap gencar dalam melakukan kegiatan replikasi pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dalam replikasi pemicuan STBM ini tidak ada pembangunan dalam bentuk fisik, namun Dinas PU saat ini dalam tahap melakukan pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) dengan anggaran pada tahun 2012 berkisar Rp. 1.068.701.900.- melalui APBD kabupaten Enrekang. Karena itu dilakukan kolaborasi melalui Pokja AMPL untuk mengatasi buang air besar sembarangan (BABS) yang terkadang masih di lakukan oleh sebagian kecil masyarakat di kabupaten Enrekang.

Adapun kolaborasi yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) di mana masyarakat di undang dan berkumpul di

suatu tempat yang telah disepakati bersama untuk mengatasi hal tersebut. oleh karena itu, di undanglah masing-masing tokoh masyarakat untuk hadir dan berkumpul untuk memetakan masing-masing lokasi tempat mereka buang air besar (BAB).

Pilar utama paling penting yang harus diperhatikan menggunakan metode PRA adalah perubahan perilaku dan kebiasaan, karena jika perilaku dan kebiasaan tidak berubah maka tidak akan pernah mencapai tahapan *sharing* terhadap masyarakat.

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Pada tahun 2007 – 2009 program ini awalnya berasal dari Kementerian Kesehatan melalui program *WESLIC* kemudian dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang pada tahun 2010.

Adapun keunggulan dari program ini karena bentuk kunjungan dilakukan tiap desa minimal 4 kali dalam setahun, sehingga pengawalannya sangat terkoordinir. Karena meski di pahami bahwa kondisi geografis Kab. Enrekang untuk menempuh tiap per desa butuh waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan yang dilaksanakan butuh waktu 1-2 hari. Dan paling tinggi replikasi dalam satu tahun itu di laksanakan di 20 desa. Dari 129 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang yang sudah masuk replikasi pemicuan STBM sudah sebanyak 70 desa se kabupaten Enrekang.

Pembangunan Jamban MCK Plus-Plus (Kab. Kep. Selayar)

Rendahnya perilaku hidup bersih masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Kep.Selayar, merupakan implikasi dari rendahnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang layak. Rendahnya pendapatan, atau situasi ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu atas rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki/mengakses sarana sanitasi yang baik tersebut. Karenanya perlu upaya dan dan pro aktivitas pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih kurang mampu dalam mengakses sarana sanitasi tersebut. Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyikapi situasi masalah sanitasi tersebut adalah melalui program pembangunan MCK umum plus-plus dan bantuan pembangunan jamban gratis dengan sistem septik komunal di beberapa wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya tidak bisa mengakses sarana jamban secara layak. Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran dari APBD dan melibatkan pihak ke tiga dalam proses pembangunan jamban MCK plus-plus tersebut yang kemudian diserahkan terimakan kepada warga yang dikelola secara swadaya dengan membentuk KSM.

Program ini mulai berlangsung sejak tahun 2011, melalui Sharing 90% : 10% DAK dan APBD atau 200.000.000 dari DAK dan 26.000.000 dari APBD untuk pembangunan/pengadaan MCK plus-plus sebanyak 2 unit di Benteng Selatan, dan Kel. Benteng dengan kapasitas akses 50 - 70 KK dengan rasio 4 orang per KK, dengan fasilitas MCK, tempat cuci, Kantor pengelola, bak pengolahan lumpur tinja, Fasilitas untuk pemanfaatan GAS. Namun GAS hingga saat ini masih dimanfaatkan secara terbatas oleh kantor pengelola KSM, belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas, disebabkan oleh beberapa factor, yakni masyarakat masih merasa jijik memanfaatkan GAS dari sumber tinja untuk memasak, kemudian faktor lainnya sarana untuk pengolahan lumpur tinja dan sarana pemanfaatan dalam skala Rumah Tangga juga masih sangat kurang.

Pada tahun 2012 program ini kembali dilaksanakan dengan mekanisme yang sama sharing DAK dan APBD , total dana sebesar 324.500.000 digelontorkan untuk

pembangunan/pengadaan MCK plus-plus di Benteng Selatan (2 Unit), Benteng Utara (1unit), Kel. Putabangun (1 Unit) dan Desa Buki (1unit). Dengan kapasitas akses masing-masing 50 – 70 K dengan rasio 4 orang/KK dengan fasilitas yang sama dengan MCK plus-plus di tahun 2011, namun terdapat penambahan 8 bilik. Kemudian Tahun 2012 ada alokasi dana APBD yang masing-masing dialokasikan sebesar 112.000.000 untuk pengadaan/pembangunan sarana jamban keluarga dengan sistem septik komunal di 8 lokasi (benteng Selatan 3 unit, Benteng Utara 3 unit, dan Benteng 2 Unit) dengan kapasitas 5 rumah per satu unit Septik Komunal. Dampak Jangka pendek dari program ini sudah dapat idrasakan, Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disekitar fasilitas saat ini sudah memanfaatkan/mengakses secara optimal fasilitas-fasilitas sanitasi tersebut, dan terdapat tren penurunan penyakit diare dari tahun-tahun sebelumnya.

Arisan Jamban, Percepatan Pembangunan Sanitasi (Kab. Soppeng)

Mengatasi keterbatasan ekonomi masyarakatnya dalam membuat jamban keluarga. Pemerintah menawarkan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membuat jamban melalui program Arisan Jamban Keluarga. Program ini diluncurkan untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat (BABS).Dimulai pada 2011, Program ini menggunakan metode yang digunakan sangat sederhana. Diawali dari pemicuan melalui sosialisasi,setelah itu diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya arti kesehatan.

Pelaksanaan program melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat.Selain dari unsur Dinas Kesehatan, pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat, unsur muspida, dan pemerintah setempat.

Setelah pemicuan selesai dilakukan, maka dibuatlah arisan jamban.Dalam masyarakat dibentuk kelompok dengan anggota 10 orang perkelompok.Tiap bulannya mereka mengadakan pertemuan untuk memastikan giliran rumah yang mendapatkan jatah jamban. Tiap anggota membayar paket jamban Rp. 500 ribu dengan cara menyicil Rp. 50 ribu perbulan selama 10 bulan.

Keterbatasan anggaran disiasati tukang bangunan yang bersedia membiayai semua pembuatan jamban dalam kelompok. Kekurangannya dikerjasamakan dengan toko bahan bangunan untuk dicicil.Hanya dalam tiga bulan, semua jatah jamban dalam kelompok selesai dikerjakan.Sedangkan pengembalian pinjaman uang ke tukang dan pinjaman bahan bangunan ke toko bangunan, dananya dipungut tiap bulannya dari anggota.

Program Arisan Jamban membawa dampak signifikan.Hingga 2012, khusus program arisan jamban, jumlah kelompok rumah tangga yang ikut program tersebut sebanyak empat kelompok.Setiap kelompok diikuti rata-rata 10 anggota rumah tangga.

Kampung Bebas Buang Air Sembarangan (Kab. Luwu Utara)

Kondisi geografis Luwu Utara yang banyak dilalui aliran sungai dan luas wilayah yang belum dihuni masyarakat.Menjadi tanggung jawab pemerintah agar menjaga kesehatan lingkungan khususnya terbebas dari tinja manusia.

Upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat program sanitasi Kampung ODF (bebas buang air besar sembarangan). Program sanitasi pemerintah Luwu Utara pada dasarnya sudah dijalankan pada 2010.

Guna mencapai target 80 persen ODF pada 2015, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Luwu Utara membuat berbagai kebijakan. Program pemicuan salah satu agenda rutin yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.

Pemicuan ini dilakukan yang melibatkan berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat berperang penting, khususnya pada saat memberikan materi penyuluhan.

Selain itu, pemerintah menawarkan paket hemat pengadaan jamban keluarga yang dikemas dalam arisan jamban keluarga (arisan jaga). Anggota kelompok arisan jaga dapat mengangsur pembayaran sesuai kemampuan keuangannya dengan paket jamban yang dipilihnya. Besarnya biaya tiap paketnya bervariasi. Paket satu Rp175 ribu, paket dua Rp375 ribu, paket tiga Rp500 ribu, dan paket empat Rp875 ribu. Perbedaan paket ini berdasarkan bahan bangunan yang diberikan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat cetak gorong-gorong kepada masyarakat. Alat tersebut dimanfaatkan khususnya bagi masyarakat yang ingin membangun jamban keluarga secara mandiri. Pada 2013 ini, terdapat 19 desa yang telah ODF. Capaian ini telah melewati target 80 persen kampung ODF pada 2015.

Membangun Kesadaran Melalui Metode Pemicuan Mandiri (Kab. Sidrap)

Pelaksanaan program diawali dengan proses pemicuan, yaitu semacam metode dan teknik yang dapat memberikan rasa jijit kepada masyarakat. Metode ini berupa simulasi, diantaranya; Membentuk dan merubah persepsi yang dibarengi dengan simulasi dua buah gelas yang di isi air bersih, satu air yang tidak tersentuh lalat dan satunya lagi yang tersentuh lalat. Lalat ini dipastikan sudah hinggap sebelumnya di tinja manusia. Air yang tersentuh lalat kemudian di aduk dan ditawarkan untuk diminum. Dari sini masyarakat disadarkan jika air yang terkontaminasi dengan kotoran manusia sangat jorok dan tidak layak di minum. Menancapkan kesadaran akan rasa berdosa dan bersalah ketika membuang tinja disembarang tempat.

Tujuan dari pemicuan ini adalah menyadarkan kepada masyarakat pentingnya hidup sehat dan bersih dan untuk mengubah pola perilaku dan cara pandang mereka agar tidak BABS. Pada saat pemicuan dilakukan, muncullah ide masyarakat untuk membangun sarana pembuangan tinja. Ide ini diawali dengan pembentukan tim kerja STBM. Tim Kerja ini bertugas untuk mendorong lahirnya program, mengawal, dan memantau agar berjalan dengan baik. Anggota tim Kerja terdiri dari tokoh masyarakat dan dibantu oleh kader kesehatan (kader posyandu, kader kesling)

Pembentukan tim Kerja ini difasilitasi oleh Dinkes. Masyarakat diundang untuk membicarakan masalah sanitasi. Dalam pertemuan tersebut dibentuklah tim kerja. Tim kerja meliputi diantaranya Bapinsa, polsek, lurah, ketua2 rt dan rw, kader, tim penggerak PKK, dll. Mereka ini bekerja secara sukarela dan tidak mendapatkan insentif dari pemerintah. Tim Kerja berperan dalam menjaga dan mendorong terkait sanitasi agar masyarakat tidak BABS.

Sosialisasi dengan metode pemicuan dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja dan sekaligus pemutaran film. Di saat sosialisasi dilakukan identifikasi kepada peserta yang hadir siapa-siapa yang belum punya jamban. Hal ini menghindari jangan sampai mereka ini sebagai tim anggota kerja tetapi justru mereka yang tidak punya jamban. Di sini juga sudah penetapan wilayah kerja. Setelah terbentuk, Tim kerja turun mendata di wilayah kerja masing-masing.

Untuk menindaklanjuti hasil temuan, selanjutnya dilakukan pertemuan di Kantor Kelurahan dengan jalan memanggil seluruh masyarakat yang belum memiliki jamban. Pada Pertemuan itu dihadirkan juga dari puskesmas, polsek, sama seperti pertemuan pertama kalinya. Mencari jalan keluar atau solusi. Melalui pertemuan tersebut kemudian dibuat komitmen untuk tidak BABS dalam bentuk SURAT PERNYATAAN. Selain itu ada juga pernyataan dari yang punya jamban untuk bersedia memberikan tumpangan sementara kepada tetangga hingga jamban mereka selesai.

